



Katalog BPS: 9199017

Edisi 65
Oktober 2015

Laporan Bulanan **Data Sosial Ekonomi**



BADAN PUSAT STATISTIK

HEADLINES

1. Inflasi

Pada September 2015 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi September 2015 terhadap September 2014 (tahun ke tahun) sebesar 6,83 persen.

2. Pertumbuhan PDB

- Ekonomi Indonesia triwulan II-2015 terhadap triwulan II-2014 (y-on-y) tumbuh 4,67 persen melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan II-2015 dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 3,78 persen.

3. Ekspor

- Nilai ekspor Agustus 2015 sebesar US\$12,70 miliar, naik 10,79 persen jika dibanding ekspor Juli 2015 dan turun 12,28 persen dibanding ekspor Agustus 2014.
- Nilai ekspor nonmigas Agustus 2015 mencapai US\$11,17 miliar yang terdiri dari produk hasil pertanian US\$0,58 miliar, hasil industri pengolahan US\$8,90 miliar, serta hasil tambang dan lainnya US\$1,69 miliar.

4. Impor

- Nilai impor Agustus 2015 sebesar US\$12,27 miliar, naik 21,69 persen dibanding impor Juli 2015 dan turun 17,06 persen jika dibanding impor Agustus 2014.
- Nilai impor menurut golongan penggunaan barang Agustus 2015 mencakup barang konsumsi sebesar US\$1,08 miliar, bahan baku/penolong US\$9,15 miliar, dan barang modal US\$2,04 miliar.

5. Kependudukan

- Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa penduduk Indonesia Juni 2014 berjumlah 252.164,8 ribu orang.
- Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2014 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.

6. Ketenagakerjaan

- Pada Februari 2015, jumlah penganggur sebesar 7,4 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,81 persen.

- Dalam setahun terakhir (Februari 2014–Februari 2015), jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 2,7 juta orang.

7. Upah Buruh

- Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Agustus 2015 naik masing-masing sebesar 0,12 persen dan 0,06 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya.
- Upah riil harian buruh tani Agustus 2015 turun sebesar 0,34 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, upah riil harian buruh bangunan Agustus 2015 turun 0,33 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya.

8. Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Pedesaan, dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- NTP September 2015 naik 1,04 persen dibanding Agustus 2015.
- Pada September 2015, terjadi deflasi pedesaan sebesar 0,02 persen.
- NTUP September 2015 naik 0,87 persen dibanding Agustus 2015.

9. Harga Pangan

- Rata-rata harga beras September 2015 sebesar Rp12.968,00 per kg, naik 2,04 persen dari bulan sebelumnya.
- Harga ikan kembung naik 1,91 persen; cabai rawit turun 12,27 persen; cabai merah turun 10,98 persen; daging ayam ras turun 9,31 persen; dan minyak goreng turun 1,95 persen.

10. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

- IHPB Umum Nonmigas September 2015 turun sebesar 0,05 persen dibanding bulan sebelumnya.
- Pada Agustus 2015 IHPB Umum naik sebesar 1,34 persen dibanding bulan sebelumnya.

11. Indeks Tendensi Bisnis dan Konsumen

- Kondisi bisnis triwulan II-2015 meningkat dari triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 105,46). Tingkat optimisme pelaku bisnis lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2015 (nilai ITB sebesar 96,30).
- Kondisi bisnis triwulan III-2015 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 106,09). Tingkat optimisme pelaku bisnis diperkirakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II-2015 (nilai ITB sebesar 105,46).

- Kondisi ekonomi konsumen triwulan II-2015 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITK sebesar 105,22). Tingkat optimisme konsumen lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITK sebesar 100,87).
- Kondisi ekonomi konsumen triwulan III-2015 diperkirakan meningkat (nilai ITK diperkirakan 112,18). Tingkat optimisme konsumen diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2015 (nilai ITK sebesar 105,22).

12. a. Produksi Tanaman Pangan Angka Tetap Tahun 2014

- Produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,85 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 0,61 persen dibandingkan tahun 2013.
- Produksi jagung tahun 2014 sebanyak 19,01 juta ton pipilan kering atau naik 2,68 persen dibandingkan tahun 2013.
- Produksi kedelai tahun 2014 sebanyak 955,00 ribu ton biji kering atau naik 22,44 persen dibandingkan tahun 2013.

b. Produksi Tanaman Pangan Angka Ramalan I Tahun 2015

- Produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 6,64 persen dibandingkan tahun 2014.
- Produksi jagung tahun 2015 diperkirakan sebanyak 20,67 juta ton pipilan kering atau naik 8,72 persen dibandingkan tahun 2014.
- Produksi kedelai tahun 2015 diperkirakan sebanyak 998,87 ribu ton biji kering atau naik 4,59 persen dibandingkan tahun 2014.

13. Industri

- Pertumbuhan produksi industri pengolahan/manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan II-2015 naik 5,44 persen dibanding triwulan II-2014 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan sebesar 2,34 persen dari triwulan I-2015 (*q-to-q*).
- Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan II-2015 naik 4,57 persen dibanding triwulan II-2014 (*y-on-y*), dan juga mengalami pertumbuhan 5,09 persen dari triwulan I-2015 (*q-to-q*).

14. Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) selama Januari–Agustus 2015 mencapai 6,32 juta kunjungan atau naik 2,71 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2014.
- TPK Hotel Berbintang pada bulan Agustus 2015 mencapai 55,61 persen atau naik 3,59 poin dibanding TPK Agustus 2014, dan mengalami kenaikan 4,36 poin dibandingkan TPK Juli 2015.

- Sementara itu, rata-rata TPK hotel berbintang selama Januari-Agustus 2015 tercatat sebesar 51,25 persen, naik 0,17 poin dibandingkan rata-rata TPK pada periode yang sama tahun 2014.

15. Transportasi

- Jumlah penumpang angkutan udara domestik Agustus 2015 turun 1,20 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang angkutan udara internasional Agustus 2015 naik 9,09 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Agustus 2015 turun 18,77 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang kereta api Agustus 2015 naik 0,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

16. Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Sementara untuk ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Rasio pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,41.

17. Produksi Hortikultura

- Produksi cabai besar pada tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton.
- Produksi cabai rawit pada tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton.
- Produksi bawang merah pada tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton.

18. a. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2014

Biaya produksi per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Sedangkan nilai produksinya masing-masing adalah sebesar Rp17,2 juta; Rp10,2 juta; Rp12,0 juta; dan Rp9,0 juta.

b. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Jeruk Tahun 2014

- Biaya produksi usaha tanaman cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 masing-masing mencapai Rp52,1 juta; Rp34,0 juta; dan Rp67,2 juta.
- Biaya produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri dan yang ditebaskan tahun 2014 masing-masing mencapai Rp5,4 juta dan Rp5,7 juta.

- c. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014**
Rata-rata biaya produksi usaha setahun per hektar untuk komoditas kelapa sawit sebesar Rp9,7 juta (57,05 persen dari total nilai produksi); karet sebesar Rp9,2 juta (71,54 persen dari total nilai produksi); dan tebu Rp24,2 juta (77,98 persen dari total nilai produksi).
- d. Struktur Ongkos Usaha Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras Petelur, dan Ayam Ras Pedaging Tahun 2014.**
- Biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen).
 - Biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen).
 - Biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen).
 - Biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).
- e. Struktur Ongkos Usaha Perikanan Tahun 2014**
- Biaya produksi per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen terhadap nilai produksi); Rp4,2 juta (71,91 persen terhadap nilai produksi); dan Rp3,2 juta (44,16 persen terhadap nilai produksi).
 - Biaya produksi per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor dan perahu motor tempel masing-masing sebesar Rp4,1 juta (66,54 persen terhadap nilai produksi) dan Rp436 ribu (53,71 persen terhadap nilai produksi).
- f. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jati, Mahoni, Sengon Tahun 2014**
Biaya produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, dan sengon masing-masing Rp0,9 juta; Rp1,2 juta; dan Rp0,8 juta atau masing-masing sebesar 10,20 persen; 19,30 persen; dan 20,71 persen terhadap nilai produksi.
- g. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Tahun 2014**
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan

dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

19. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

- Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa¹, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.
- Sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.
- Terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005².
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

20. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Agustus 2015

- Rupiah terdepresiasi 4,69 persen terhadap dolar Amerika.
- Rupiah terdepresiasi 2,02 persen terhadap dolar Australia.
- Rupiah terdepresiasi 7,71 persen terhadap yen Jepang.
- Rupiah terdepresiasi 8,61 persen terhadap euro.

21. Indeks Demokrasi Indonesia 2014

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014 mencapai angka 73,04 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 9,32 poin dibandingkan dengan angka IDI 2013 yang sebesar 63,72. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang” untuk klasifikasi tingkat demokrasi

¹ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat.

² Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni: “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

- Kenaikan IDI dari 2013–2014 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil naik 3,62 poin (dari 79,00 menjadi 82,62), (2) Hak-Hak Politik yang naik 17,47 poin (dari 46,25 menjadi 63,72), dan (3) Lembaga-Lembaga Demokrasi yang naik 3,57 poin (dari 72,24 menjadi 75,81).

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap awal bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi Oktober 2015 ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan inflasi (s.d. September 2015), perkembangan triwulanan pertumbuhan ekonomi (s.d. triwulan II-2015), ekspor-impor (s.d. Agustus 2015), perkembangan tahunan penduduk (s.d. Juni 2014), ketenagakerjaan (s.d. Februari 2015), upah buruh (s.d. Agustus 2015), nilai tukar petani dan harga pangan (s.d. September 2015), harga produsen (s.d. triwulan II-2015) dan harga perdagangan besar (s.d. September 2015), perkembangan triwulanan indeks tendensi bisnis dan konsumen (s.d. triwulan II-2015), produksi tanaman pangan (angka tetap tahun 2014 dan angka ramalan I tahun 2015), perkembangan triwulanan indeks produksi industri (s.d. triwulan II-2015), pariwisata dan transportasi (s.d. Agustus 2015), data kemiskinan (Maret 2015), struktur ongkos usaha pertanian dan survei kesehatan 2014, nilai tukar eceran rupiah Agustus 2015, produksi cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah tahun 2014, serta indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2014.

Lebih lanjut, keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (*official statistics*) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Apabila masih diperlukan data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, dipersilahkan melihat publikasi BPS lainnya atau melalui website BPS: <http://www.bps.go.id>.

Jakarta, 5 Oktober 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

<i>HEADLINES</i>	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
FOKUS PERHATIAN	1
I. INFLASI SEPTEMBER 2015	14
II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II-2015	19
III. EKSPOR AGUSTUS 2015	33
IV. IMPOR AGUSTUS 2015.....	38
V. KEPENDUDUKAN JUNI 2014	45
VI. KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2015	51
VII. UPAH BURUH AGUSTUS 2015	57
VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN SEPTEMBER 2015	59
IX. HARGA PANGAN SEPTEMBER 2015	66
X. INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR SEPTEMBER 2015	73
XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN II-2015	77
XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA TETAP (ATAP) 2014 DAN ANGKA RAMALAN I (ARAM I) 2015.....	85
XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN II-2015.....	91
XIV. PARIWISATA AGUSTUS 2015	96
XV. TRANSPORTASI NASIONAL AGUSTUS 2015	100
XVI. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN MARET 2015	103
XVII. PRODUKSI HORTIKULTURA 2014	110
XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014.....	115
XIX. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014	129
XX. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH AGUSTUS 2015	146

XXI. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2014 151

XXII. SUPLEMEN: METODOLOGI..... 157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota September 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	16
Tabel 1.2	Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi September 2015 Menurut Komponen Perubahan Harga (2012=100).....	16
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)	17
Tabel 1.4	Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen).....	17
Tabel 1.5	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, Juli–Agustus 2015 (persen).....	18
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen).....	21
Tabel 2.2	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah).....	23
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran (persen)	25
Tabel 2.4	Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran.....	25
Tabel 2.5	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)	26
Tabel 2.6	Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan II-2015 (persen).....	27
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha, 2012–2014 (persen)	29
Tabel 2.8	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2012–2014 (triliun rupiah).....	30
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran, 2012–2014 (persen)	31
Tabel 2.10	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran 2012–2014 (triliun rupiah)	31
Tabel 2.11	PDB Per Kapita Indonesia, 2010–2014.....	32
Tabel 3.1	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$)	34
Tabel 3.2	Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$) Triwulanan 2014–2015.....	35
Tabel 3.3	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)	35

Tabel 3.4	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ).....	36
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2013–2015 (FOB: juta US\$).....	36
Tabel 3.6	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang dan Pelabuhan Muat, Januari–Agustus 2015.....	37
Tabel 4.1	Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya Januari–Agustus 2014 dan 2015	40
Tabel 4.2	Perkembangan Impor Indonesia Agustus 2014–Agustus 2015	40
Tabel 4.3	Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijiit dan Perubahannya Januari–Agustus 2014 dan 2015	41
Tabel 4.4	Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang Januari–Agustus 2015.....	41
Tabel 4.5	Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang Januari–Agustus 2014 dan 2015	42
Tabel 4.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2014–Agustus 2015 (Nilai CIF: Juta US\$)	42
Tabel 4.7	Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari–Agustus 2015 (juta US\$)	43
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Indonesia, Agustus 2014–Agustus 2015(miliar US\$).....	43
Tabel 4.9	Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Triwulan II 2015.....	44
Tabel 5.1	Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014 (ribu orang).....	45
Tabel 5.2	Demografi Penduduk Indonesia, 2014	50
Tabel 6.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2013–2015 (juta orang)	51
Tabel 6.2	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2013–2015 (juta orang).....	53
Tabel 6.3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2013–2015 (juta orang).....	54
Tabel 6.4	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (juta orang).....	54

Tabel 6.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (persen).....	55
Tabel 6.6	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 2014–2015.....	56
Tabel 7.1	Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah) Agustus 2013–Agustus 2015	58
Tabel 8.1	Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100).....	61
Tabel 8.2	Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran September 2013–September 2015	64
Tabel 8.3	Tingkat Inflasi Perdesaan September 2015, Tahun Kalender 2015, dan <i>Year on Year</i> 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	64
Tabel 8.4	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya, September 2015 (2012=100).....	65
Tabel 9.1	Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, September 2014–September 2015	67
Tabel 9.2	Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, September 2014–September 2015 ...	69
Tabel 9.4	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok September 2014–September 2015 (rupiah).....	71
Tabel 10.3	Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (2010=100), Indonesia Juli–September 2015	73
Tabel 10.4	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar (2010=100), September 2015	74
Tabel 10.5	Tingkat Inflasi Konstruksi Menurut Jenis Bangunan (2010=100) Indonesia, September 2015	75
Tabel 11.1	Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan II-2015 Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha	78
Tabel 11.2	Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan III-2015 Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk	79
Tabel 11.3	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2015 dan Triwulan II-2015 Menurut Variabel Pembentuk.....	81
Tabel 11.4	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2015 Menurut Variabel Pembentuk	83

Tabel 11.5	Indeks Tendensi Konsumen ¹⁾ Triwulan II-2014–Triwulan II-2015 dan Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi	84
Tabel 12.1	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013–2015.....	86
Tabel 12.2	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija, 2013–2015	90
Tabel 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2013–2015 (persen) 2010=100	92
Tabel 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2012–2015 (persen) 2010=100	92
Tabel 13.3	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan II-2015 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	93
Tabel 13.4	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan Triwulan I-2013–Triwulan II-2015 (persen)	95
Tabel 13.5	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan II-2015 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	95
Tabel 14.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Agustus 2014–Agustus 2015	99
Tabel 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi Agustus 2014–Agustus 2015.....	102
Tabel 16.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2014–Maret 2015.....	104
Tabel 16.2	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2015	105
Tabel 16.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2).....	106
Tabel 16.4	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2015.....	108
Tabel 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014.....	111
Tabel 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014.....	112

Tabel 17.3	Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014	114
Tabel 18.1	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014	115
Tabel 18.2	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014	116
Tabel 18.3	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014	117
Tabel 18.4	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014	118
Tabel 18.5	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014	118
Tabel 18.6	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditebaskan 2014.....	119
Tabel 18.7	Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014.....	120
Tabel 18.8	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah 2014	121
Tabel 18.9	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014	123
Tabel 18.10	Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014	124
Tabel 18.11	Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014	125
Tabel 18.12	Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014	126
Tabel 18.13	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014.....	127
Tabel 19.1	Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014	134
Tabel 19.2	Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014	135
Tabel 19.3	IKG Desa Menurut Provinsi, 2014.....	136
Tabel 21.1	Perkembangan Skor Variabel, 2013–2014	153

Tabel 21.2	Perkembangan Skor Indikator 2013 dan 2014.....	154
Tabel 21.3	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2013–2014.....	155

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 82 Kota, 2013–2015	14
Grafik 1.2	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2014–2015	18
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2014 s.d. Triwulan II-2015 (persen) ...	20
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2015 (persen)	20
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan II-2015 (persen)	24
Grafik 2.4	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan II-2015 (persen)	26
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDB, 2012–2014 (persen)	28
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB) Agustus 2013–Agustus 2015	33
Grafik 4.1	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF) Agustus 2014–Agustus 2015	38
Grafik 4.2	Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF) Januari–Agustus 2014 dan 2015	39
Grafik 5.1	Piramida Penduduk Indonesia, 2014	46
Grafik 5.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2014	47
Grafik 5.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971–2014	48
Grafik 6.1	Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur 2013–2015 (juta orang).....	52
Grafik 7.1	Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan Agustus 2013–Agustus 2015	57
Grafik 8.1	Nilai Tukar Petani (NTP), September 2014–September 2015 (2012=100)	59
Grafik 8.2	Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) September 2014–September 2015 (2012=100).....	60
Grafik 8.3	Inflasi Perdesaan, September 2013–September 2015	63
Grafik 9.1	Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas September 2014–September 2015.....	66

Grafik 9.2	Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas September 2014–September 2015.....	68
Grafik 9.3	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok Agustus 2014–September 2015 (rupiah)	72
Grafik 10.2	Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia September 2012–September 2015.....	74
Grafik 10.3	Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan April–September 2015.....	76
Grafik 11.1	Indeks Tendensi Bisnis ¹ Triwulan II-2010–Triwulan II-2015 dan Perkiraan Triwulan III-2015	80
Grafik 11.2	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	82
Grafik 11.3	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi	83
Grafik 12.1	Produksi Padi Per Bulan, 2014–2015	86
Grafik 12.2	Pola Panen Padi, 2013–2015.....	87
Grafik 12.3	Produksi Jagung Per Bulan, 2014–2015	88
Grafik 12.4	Produksi Kedelai Per Bulan, 2014–2015	89
Grafik 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (<i>y-on-y</i>) Triwulan III-2013–Triwulan II-2015.....	91
Grafik 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (<i>y-on-y</i>) Triwulan II-2013–Triwulan II-2015.....	94
Grafik 14.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk Agustus 2013–Agustus 2015	96
Grafik 14.2	Perkembangan Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di 27 Provinsi Indonesia, Agustus 2013–Agustus 2015	98
Grafik 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Agustus 2014–Agustus 2015	100
Grafik 16.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah September 2014–Maret 2015 Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah,	107
Grafik 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014	110

Grafik 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014	112
Grafik 17.3	Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014	
Grafik 18.1	Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014	126
Grafik 18.2	Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014.....	128
Grafik 18.3	Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014	128
Grafik 19.1	Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014	129
Grafik 19.2	Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014	130
Grafik 19.3	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014	131
Grafik 19.4	Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014	131
Grafik 19.5	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama	132
Grafik 19.6	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik.....	132
Grafik 19.7	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih.....	133
Grafik 19.8	Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014	137
Grafik 20.1	Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Agustus dibanding Juli M.V).....	150
Grafik 20.2	Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Minggu Terakhir).....	150
Grafik 21.1	Perkembangan IDI Nasional Tahun 2009–2014.....	151
Grafik 21.2	Perkembangan Indeks Aspek, 2009–2014.....	152
Grafik 21.3	Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional, 2013–2014.....	153

FOKUS PERHATIAN**1. Pada September 2015 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen**

Pada September 2015 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen. Dari 82 kota, tercatat 36 kota mengalami deflasi dan 46 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,85 persen dengan IHK 120,15 dan terendah terjadi di Bandung sebesar 0,01 persen dengan IHK 120,61, sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 1,33 persen dengan IHK 123,20 dan terendah terjadi di Jakarta sebesar 0,01 persen dengan IHK 122,38. Deflasi September 2015 sebesar 0,05 persen adalah lebih rendah dibanding kondisi September 2014 yang mengalami inflasi 0,27 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2015 terhadap September 2014) sebesar 6,83 persen.

2. Triwulan II-2015 Ekonomi Indonesia tumbuh 4,67 persen

Ekonomi Indonesia triwulan II-2015 dibanding triwulan II-2014 (*y-on-y*) tumbuh 4,67 persen, melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 5,87 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Pendidikan yang tumbuh 12,16 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,97 persen dan diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,55 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2015 (*q-to-q*) tumbuh sebesar 3,78 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10,09 persen yang dipengaruhi efek musiman pada tanaman perkebunan. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan

II-2015 didorong oleh semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 32,17 persen.

3. Nilai ekspor Indonesia Agustus 2015 mencapai US\$12,70 miliar, turun 12,28 persen (*year-on-year*)

Nilai ekspor Indonesia Agustus 2015 mencapai US\$12,70 miliar, turun 12,28 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), sedangkan dibanding ekspor Juli 2015 naik 10,79 persen. Nilai ekspor nonmigas Agustus 2015 mencapai US\$11,17 miliar atau naik 11,23 persen dibanding ekspor nonmigas Juli 2015. Ekspor migas pada Agustus 2015 mencapai US\$1,53 miliar atau naik 7,67 persen dibanding bulan sebelumnya. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Agustus 2015 turun sebesar 7,36 persen dibanding ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2014, dan ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya turun 9,15 persen, sementara ekspor nonmigas hasil pertanian naik 1,77 persen.

4. Nilai impor Indonesia Agustus 2015 sebesar US\$12,27 miliar, turun sebesar 17,06 persen (*year-on-year*)

Nilai impor Indonesia Agustus 2015 sebesar US\$12,27 miliar, atau naik sebesar 21,69 persen dibanding impor Juli 2015, dan turun 17,06 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor nonmigas Agustus 2015 sebesar US\$10,16 miliar atau naik 30,48 persen dibanding Juli 2015. Sementara impor migas Agustus 2015 tercatat sebesar US\$2,11 miliar, turun 8,12 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Agustus 2015 adalah golongan mesin dan peralatan mekanik dengan nilai US\$1,95 miliar, atau naik 26,46 persen dibanding Juli 2015 (US\$1,55 miliar). Negara asal barang impor nonmigas terbesar Januari–Agustus 2015 ditempati oleh Tiongkok (US\$19,02 miliar) dengan pangsa 24,13 persen.

5. Jumlah penduduk Indonesia Juni 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang

Hasil proyeksi penduduk Indonesia keadaan Juni 2014 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 252.164,8 ribu orang terdiri dari 126.715,2 ribu orang laki-laki dan 125.449,6 ribu orang perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010-2014 sekitar 1,40 persen per tahun.

6. Pada Februari 2015, penduduk yang bekerja pada Sektor Industri meningkat 6,43 persen dibandingkan Februari 2014

Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, penduduk yang bekerja meningkat terutama pada Sektor Industri sebanyak 1,0 juta orang (6,43 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang (5,03 persen), dan Sektor Perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,25 persen). Sedangkan yang mengalami penurunan Sektor Pertanian sebanyak 710 ribu orang (1,74 persen), Sektor Lainnya sebanyak 200 ribu orang (10,36 persen), dan Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi sebanyak 140 ribu orang (2,63 persen).

7. Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Agustus 2015 masing-masing sebesar Rp46.629,00 dan Rp80.342,00

Rata-rata upah nominal buruh tani pada Agustus 2015 sebesar Rp46.629,00, naik 0,12 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, dan upah riil turun sebesar 0,34 persen. Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Agustus 2015 tercatat Rp80.342,00, naik 0,06 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, sedangkan upah riil turun sebesar 0,33 persen.

8. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2015 tercatat 102,33, naik 1,04 persen dibanding Agustus 2015, deflasi perdesaan sebesar 0,02 persen dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) naik sebesar 0,87 persen dibanding Agustus 2015

NTP September 2015 tercatat 102,33 atau naik sebesar 1,04 persen dibanding NTP Agustus 2015 sebesar 101,28. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di empat subsektor yaitu Tanaman Pangan sebesar 2,51 persen, Tanaman

Hortikultura 0,20 persen, Peternakan 1,26 persen, dan Perikanan 0,07 persen, sebaliknya Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun sebesar 0,44 persen.

Pada September 2015 terjadi deflasi perdesaan sebesar 0,02 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 123,47. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 19 provinsi dan deflasi perdesaan di 14 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,11 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,06 persen. Deflasi perdesaan terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,84 persen, sedangkan deflasi perdesaan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,01.

Pada September 2015 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,87 persen. Hal ini karena terjadi kenaikan It (1,09 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks BPBBM (0,22 persen). Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya empat subsektor penyusun NTUP yaitu Tanaman Pangan (2,21 persen), Tanaman Hortikultura (0,11 persen), Peternakan (1,15 persen), dan Perikanan (0,02 persen). Sebaliknya, NTUP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun sebesar 0,57 persen.

9. Rata-rata harga beras pada September 2015 sebesar Rp12.968,00 per kg, naik 2,04 persen

Rata-rata harga beras pada September 2015 sebesar Rp12.968,00 per kg, naik 2,04 persen dari bulan sebelumnya. Harga beras pada September 2015 (tahun ke tahun) naik 13,43 persen, lebih tinggi dari inflasi periode yang sama (6,83 persen). Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah ikan kembung naik 1,91 persen; sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain cabai rawit turun 12,27 persen; cabai merah turun 10,98 persen; daging ayam ras turun 9,31 persen; dan minyak goreng turun 1,95 persen.

10. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nonmigas September 2015 turun sebesar 0,05 persen dari bulan sebelumnya

IHPB Umum Nonmigas September 2015 turun sebesar 0,05 persen dari bulan sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada Kelompok Barang Ekspor Nonmigas, yaitu 1,24 persen dan terkecil terjadi pada Sektor Industri, yaitu 0,74 persen. Sedangkan, Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Kelompok Barang Impor Nonmigas naik berturut-turut 2,60 persen, 0,51 persen, dan 0,90 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, IHPB Umum Agustus 2015 naik 1,34 persen. Kenaikan IHPB terbesar terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 6,90 persen. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi September 2015 naik 0,15 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian sebesar 0,38 persen.

11. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan II-2015 sebesar 105,46 dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2015 sebesar 105,22

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan II-2015 sebesar 105,46, berarti kondisi bisnis meningkat dari triwulan sebelumnya. Hal ini karena adanya peningkatan pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 107,04), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 107,36), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 103,35). Pada triwulan III-2015 kondisi bisnis diprediksi meningkat dari triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 106,09).

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional pada triwulan II-2015 sebesar 105,22 artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh tingkat konsumsi yang meningkat, disertai rendahnya pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi dan pendapatan yang juga meningkat. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 31 provinsi (93,94 persen).

Pada triwulan III-2015 kondisi ekonomi konsumen diprediksi akan meningkat (ITK sebesar 112,18). Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan mendatang terjadi di semua provinsi di Indonesia.

12. Produksi padi tahun 2015 (ARAM I) diperkirakan sebanyak 75,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 6,64 persen dibandingkan tahun 2014

Produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,85 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 0,61 persen dibandingkan tahun 2013. Sementara itu, produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 75,55 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 4,70 juta ton (6,64 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 0,51 juta hektar (3,71 persen) dan peningkatan produktivitas sebanyak 1,45 kuintal/hektar (2,82 persen). Dibandingkan tahun 2014, produksi jagung tahun 2015 diperkirakan naik sebanyak 1,66 juta ton (8,72 persen) yang disebabkan oleh kenaikan luas panen seluas 160,48 ribu hektar (4,18 persen) dan peningkatan produktivitas sebanyak 2,16 kuintal/hektar (4,36 persen). Produksi kedelai 2015 diperkirakan naik sebanyak 43,87 ribu ton (4,59 persen) dibandingkan tahun 2014 yang disebabkan adanya kenaikan luas panen seluas 24,67 ribu hektar (4,01 persen) dan peningkatan produktivitas sebanyak 0,09 kuintal/hektar (0,58 persen).

13. Pertumbuhan produksi IBS naik 5,44 persen dan IMK naik 4,57 persen pada triwulan II-2015 (year-on-year)

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan II-2015 naik 5,44 persen dibanding triwulan II-2014 (*year-on-year*) dan mengalami kenaikan 2,34 persen dari triwulan I-2015 (*q-to-q*). Pertumbuhan bulanan produksi IBS pada Juni 2015 naik 3,56 persen dari Mei 2015 (*m-to-m*), Mei 2015 turun 3,35 persen dari April 2015, dan April 2015 naik 1,28 persen dari Maret 2015. Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan II-2015 naik 4,57 persen dibanding triwulan II-2014 (*y-on-y*), dan juga mengalami kenaikan 5,09 persen dari triwulan I-2015 (*q-to-q*).

14. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Agustus 2015 mencapai 850,5 ribu kunjungan, naik 2,87 persen dibanding Agustus 2014

Jumlah kunjungan wisman pada bulan Agustus 2015 mencapai 850,5 ribu kunjungan atau naik 2,87 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada bulan yang sama tahun 2014. Demikian pula, jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Juli 2015, jumlah kunjungan wisman naik sebesar 4,46 persen. Sekitar 35,11 persen dari jumlah kunjungan wisman bulan Agustus 2015 datang melalui Bandara Ngurah Rai, Bali.

Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada Agustus 2015 mencapai 55,61 persen, atau mengalami kenaikan 3,59 poin dibandingkan TPK Agustus 2014.

15. Jumlah penumpang angkutan udara domestik Agustus 2015 mencapai 6,3 juta orang, naik 11,26 persen (year-on-year)

Pada Agustus 2015, jumlah penumpang angkutan udara domestik mencapai 6,3 juta orang atau naik 11,26 persen (year-on-year), angkutan udara internasional naik 11,99 persen, penumpang pelayaran dalam negeri turun 6,04 persen, dan penumpang kereta api naik 19,82 persen. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angkutan udara domestik turun 1,20 persen, angkutan udara internasional naik 9,09 persen, penumpang pelayaran dalam negeri turun 18,77 persen, dan penumpang kereta api naik 0,67 persen.

16. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen)

Selama periode September 2014–Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015). Sementara untuk ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Rasio pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,41.

17. Produksi cabai besar sebesar 1,075 juta ton, cabai rawit sebesar 0,800 juta ton dan bawang merah sebesar 1,234 juta ton

Produksi cabai besar segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan produksi sebesar 61,73 ribu ton (6,09 persen). Produksi cabai rawit segar dengan tangkai tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, terjadi kenaikan produksi sebesar 86,98 ribu ton (12,19 persen). Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton. Dibandingkan tahun 2013, produksi meningkat sebesar 223,22 ribu ton (22,08 persen).

18. a. Biaya produksi per musim tanam per hektar padi sawah sebesar 12,7 juta dengan komponen terbesar upah pekerja dan jasa pertanian sebesar 48,23 persen

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Komponen terbesar dari total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai adalah untuk upah pekerja dan jasa pertanian yang masing-masing adalah sebesar 48,23 persen (Rp6,1 juta); 62,36 persen (Rp4,9 juta); 44,93 persen (Rp4,1 juta); dan 44,82 persen (Rp4,1 juta) dari total biaya.

b. Biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta

Total biaya produksi usaha per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri untuk tanaman cabai merah Rp52,1 juta; tanaman cabai rawit Rp34,0 juta; tanaman bawang merah Rp67,2 juta; tanaman jeruk Rp5,4 juta. Persentase biaya produksi terbesar adalah upah pekerja, yaitu untuk cabai merah sebesar 47,74 persen; cabai rawit sebesar 54,85 persen; dan tanaman jeruk sebesar 32,07 persen. Untuk bawang merah persentase biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen.

c. Rata-rata biaya produksi kelapa sawit setahun per hektar mencapai Rp9,7 juta

Pengeluaran paling besar digunakan untuk tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Sedangkan rata-rata biaya usaha perkebunan karet setahun per hektar mencapai Rp9,2 juta dengan pengeluaran paling besar digunakan untuk biaya tenaga kerja sebesar 57,09 persen. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya produksi setahun per hektar mencapai Rp24,2 juta, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran sewa lahan yang mencapai 32,37 persen dari total biaya produksi.

d. Biaya produksi sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen). Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).

e. Biaya produksi per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta

Jumlah biaya per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit sebesar Rp3,0 juta (41,33 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha bandeng dan udang windu adalah upah pekerja, yaitu sebesar Rp965 ribu (23,21 persen) dan Rp796 ribu (24,73 persen).

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar

Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing sebesar Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen).

f. Biaya produksi terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen

Pengeluaran terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen. Upah pekerja usaha untuk tanaman mahoni sebesar 63,00 persen dan tanaman sengon sebesar 59,00 persen.

g. Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga

Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

19. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014, pada April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa³, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.

1. Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaan infrastruktur:

³ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

- Terdapat 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) tidak ada SD (termasuk MI).
 - Terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) tidak ada SLTP.
 - Terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) tidak ada SLTA.
 - Sebanyak 117 kecamatan (1,65 persen) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu).
 - Sebanyak 1.495 kecamatan (21,13 persen) tidak ada pasar dengan bangunan.
 - Sebanyak 12.659 desa/kelurahan (15,40 persen) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN.
 - Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) tidak ada penerangan di jalan utama desa.
 - Sebanyak 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, ternyata kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.
2. Berdasarkan Podes 2014 teridentifikasi sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.
 3. Menurut Podes 2014, terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005⁴.
 4. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang

⁴ Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional

dengan skala 0–100 yang dihitung untuk setiap desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

20. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Juli 2015

a. Rupiah terdepresiasi 4,69 persen terhadap dolar Amerika

Rupiah terdepresiasi 4,69 persen terhadap dolar Amerika di Agustus 2015. Level terendah rata-rata kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Amerika di 34 provinsi terjadi pada minggu keempat Agustus 2015 yaitu Rp14.048,60 per dolar Amerika.

b. Rupiah terdepresiasi 2,02 persen terhadap dolar Australia

Rupiah terdepresiasi 2,02 persen terhadap dolar Australia di Agustus 2015. Level terendah rata-rata kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Australia di 34 provinsi terjadi pada minggu ketiga Agustus 2015 yang mencapai Rp10.115,21 per dolar Australia.

c. Rupiah terdepresiasi 7,71 persen terhadap yen Jepang

Rupiah terdepresiasi 7,71 persen terhadap yen Jepang di Agustus 2015. Level terendah rata-rata kurs tengah eceran rupiah terhadap yen Jepang di 34 provinsi terjadi pada minggu keempat Agustus 2015 yang mencapai Rp116,62 per yen Jepang.

d. Rupiah terdepresiasi 8,61 persen terhadap euro

Rupiah terdepresiasi 8,61 persen terhadap euro di Agustus 2015. Level terendah rata-rata kurs tengah eceran rupiah terhadap euro di 34 provinsi terjadi pada minggu keempat Agustus 2015 yang mencapai Rp16.079,25 per euro.

21. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional 2014 mencapai 73,04 naik dibandingkan dengan IDI nasional 2013 yang sebesar 63,72

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014 mencapai angka 73,04 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini naik 9,32 poin dibandingkan dengan angka IDI 2013 yang sebesar 63,72. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

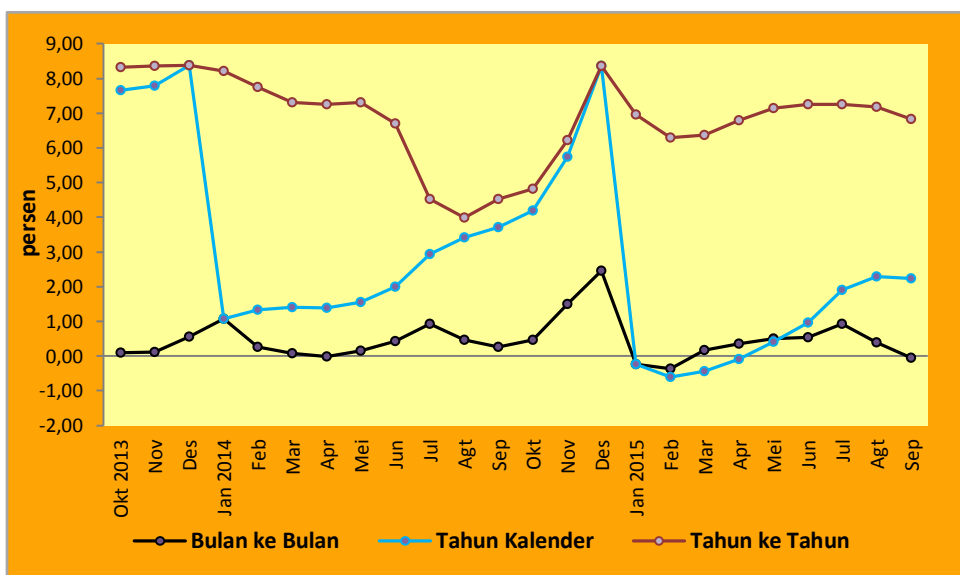
Kenaikan IDI dari 2013–2014 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil naik 3,62 poin (dari 79,00 menjadi 82,62), (2) Hak-Hak Politik yang naik 17,47 poin (dari 46,25 menjadi 63,72), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 3,57 poin (dari 72,24 menjadi 75,81).

I. INFLASI SEPTEMBER 2015

1. Pada September 2015 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen. Dari 82 kota, tercatat 36 kota mengalami deflasi dan 46 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,85 persen dengan IHK 120,15 dan terendah terjadi di Bandung sebesar 0,01 persen dengan IHK 120,61, sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 1,33 persen dengan IHK 123,20 dan terendah terjadi di Jakarta sebesar 0,01 persen dengan IHK 122,38. Deflasi September 2015 sebesar 0,05 persen adalah lebih rendah dibanding kondisi September 2014 yang mengalami inflasi 0,27 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2015 terhadap September 2014) sebesar 6,83 persen.

Pada September 2015 terjadi deflasi sebesar 0,05

Grafik 1.1
Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun
Gabungan 82 Kota, 2013–2015



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga, deflasi umum (*headline deflation*) terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks kelompok bahan makanan 1,07 persen; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,40 persen, dan kenaikan harga ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok

makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,39 persen; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,20 persen; sandang 0,83 persen; kesehatan 0,44 persen; pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,89 persen.

3. Dari deflasi 0,05 persen, andil daging ayam ras -0,13 persen; andil cabai merah dan tarif angkutan udara masing-masing sebesar -0,09 persen; andil bawang merah -0,04 persen; dan andil cabai rawit, minyak goreng dan bensin masing-masing sebesar -0,02 persen; andil telur ayam ras, jengkol, dan kangkung masing-masing sebesar -0,01 persen.
4. Deflasi September 2015 sebesar 0,05 persen, angka tersebut adalah lebih rendah dibanding kondisi September 2014 yang mengalami inflasi 0,27 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2015 terhadap September 2014) sebesar 6,83 persen.
5. Menurut karakteristik perubahan harga, deflasi September 2015 sebesar 0,05 persen dipengaruhi oleh penurunan indeks pada komponen yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) 0,40 persen, komponen bergejolak (*volatile*) 1,25 persen, dan kenaikan indeks pada komponen inti (*core*) 0,44 persen.
6. Deflasi September 2015 sebesar 0,05 persen berasal dari sumbangan inflasi komponen inti 0,26 persen, barang/jasa yang harganya diatur pemerintah memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,08 persen dan komponen bergejolak memberikan sumbangan deflasi 0,23 persen.
7. Inflasi komponen inti September 2015 sebesar 0,44 persen, tahun kalender 2015 sebesar 3,32 persen, dan tahun ke tahun (September 2015 terhadap September 2014) sebesar 5,07 persen.
8. Pada Agustus 2015, Amerika Serikat menjadi negara yang mengalami deflasi tertinggi dibandingkan beberapa negara lain, yaitu 0,10 persen.

Tabel 1.1
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota September 2015
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK September 2014	IHK Desember 2014	IHK September 2015	Inflasi September 2015 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2015 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	113,89	119,00	121,67	-0,05	2,24	6,83	-0,05
1. Bahan Makanan	119,92	126,76	129,83	-1,07	2,42	8,26	-0,23
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	115,23	118,84	124,75	0,39	4,97	8,26	0,07
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	112,17	115,55	118,65	0,20	2,68	5,78	0,05
4. Sandang	105,68	106,49	110,01	0,83	3,31	4,10	0,06
5. Kesehatan	109,07	111,00	115,78	0,44	4,31	6,15	0,02
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	109,63	110,37	114,44	0,89	3,69	4,39	0,07
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	115,44	127,27	124,67	-0,40	-2,04	8,00	-0,09

¹⁾ Persentase perubahan IHK September 2015 terhadap IHK bulan sebelumnya.

²⁾ Persentase perubahan IHK September 2015 terhadap IHK Desember 2014.

³⁾ Persentase perubahan IHK September 2015 terhadap IHK September 2014.

Tabel 1.2
Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi September 2015
Menurut Komponen Perubahan Harga
(2012=100)

Komponen	IHK September 2014	IHK Desember 2014	IHK September 2015	Inflasi September 2015 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2015 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	113,89	119,00	121,67	-0,05	2,24	6,83	-0,05
Inti	109,42	111,28	114,97	0,44	3,32	5,07	0,26
Harga Diatur Pemerintah	124,31	139,27	138,31	-0,40	-0,69	11,26	-0,08
Bergejolak	120,50	128,01	130,77	-1,25	2,16	8,52	-0,23

Tabel 1.3
Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)

Bulan	Tingkat Inflasi Nasional (bulan ke bulan)						Tingkat Inflasi Nasional (kalender)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	0,84	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,84	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24
Februari	0,30	0,13	0,05	0,75	0,26	-0,36	1,14	1,03	0,81	1,79	1,33	-0,61
Maret	-0,14	-0,32	0,07	0,63	0,08	0,17	0,99	0,70	0,88	2,43	1,41	-0,44
April	0,15	-0,31	0,21	-0,10	-0,02	0,36	1,15	0,39	1,09	2,32	1,39	-0,08
Mei	0,29	0,12	0,07	-0,03	0,16	0,50	1,44	0,51	1,15	2,30	1,56	0,42
Juni	0,97	0,55	0,62	1,03	0,43	0,54	2,42	1,06	1,79	3,35	1,99	0,96
Juli	1,57	0,67	0,70	3,29	0,93	0,93	4,02	1,74	2,50	6,75	2,94	1,90
Agustus	0,76	0,93	0,95	1,12	0,47	0,39	4,82	2,69	3,48	7,94	3,42	2,29
September	0,44	0,27	0,01	-0,35	0,27	-0,05	5,28	2,97	3,49	7,57	3,71	2,24
Oktober	0,06	-0,12	0,16	0,09	0,47		5,35	2,85	3,66	7,66	4,19	
November	0,60	0,34	0,07	0,12	1,50		5,98	3,20	3,73	7,79	5,75	
Desember	0,92	0,57	0,54	0,55	2,46		6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	

Tabel 1.4
Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)

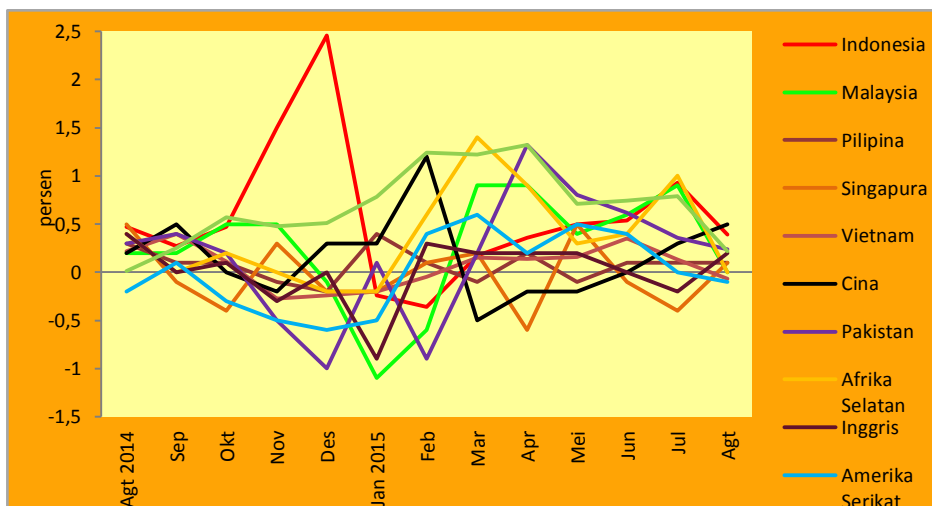
Bulan	2010:2009	2011:2010	2012:2011	2013:2012	2014:2013	2015:2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	3,72	7,02	3,65	4,57	8,22	6,96
Februari	3,81	6,84	3,56	5,31	7,75	6,29
Maret	3,43	6,65	3,97	5,90	7,32	6,38
April	3,91	6,16	4,50	5,57	7,25	6,79
Mei	4,16	5,98	4,45	5,47	7,32	7,15
Juni	5,05	5,54	4,53	5,90	6,70	7,26
Juli	6,22	4,61	4,56	8,61	4,53	7,26
Agustus	6,44	4,79	4,58	8,79	3,99	7,18
September	5,80	4,61	4,31	8,40	4,53	6,83
Oktober	5,67	4,42	4,61	8,32	4,83	
November	6,33	4,15	4,32	8,37	6,23	
Desember	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	

Tabel 1.5
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, Juli–Agustus 2015 (persen)

Negara	Bulan ke Bulan		Tahun ke Tahun (<i>Y-on-Y</i>)	
	Juli 2015	Agustus 2015	Juli 2015	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Indonesia	0,93	0,39	7,26	7,18
2. Malaysia	0,90	0,00	3,30	3,10
3. Pilipina	0,10	0,10	0,80	0,60
4. Singapura	-0,40	0,10	-0,40	-0,80
5. Vietnam	0,13	-0,07	0,90	0,61
6. Cina	0,30	0,50	1,60	2,00
7. Pakistan	0,36	0,24	1,80	1,72
8. Afrika Selatan	1,00	0,00	5,00	4,60
9. Inggris	-0,20	0,20	0,10	0,00
10. Amerika Serikat	0,00	-0,10	0,20	0,20
11. Brazil	0,62	0,22	9,56	9,53

Sumber: <http://www.stats.gov.cn>, <http://www.statistics.gov.my>, <http://www.statpak.gov.pk>,
<http://www.census.gov.ph>, <http://www.singstat.gov.sg>, <http://www.gso.gov.vn>,
<http://www.bls.gov>, <http://www.ibge.gov.br>, <http://www.statistics.gov.uk>,
<http://www.statssa.gov.za>, dan www.bloomberg.com

Grafik 1.2
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2014–2015



II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II-2015

1. Ekonomi Indonesia triwulan II-2015 dibandingkan triwulan II-2014 (*y-on-y*) tumbuh 4,67 persen dan dibandingkan triwulan I-2015 (*q-to-q*) tumbuh sebesar 3,78 persen.
2. Dari sisi produksi pertumbuhan triwulan II-2015 (*y-on-y*) didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 5,87 persen. Jasa Pendidikan menunjukkan kinerja terbaik dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen.
3. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi dipengaruhi faktor musiman Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, khususnya Tanaman Perkebunan yang tumbuh sebesar 35,78 persen. Hal ini mendorong Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 10,09 persen. Di samping itu, pertumbuhan juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya. Namun demikian, pertumbuhan sedikit terkoreksi oleh kontraksi yang terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dan Jasa Keuangan dan Asuransi masing-masing turun sebesar 2,57 persen dan 1,21 persen.

**Pada triwulan II-2015,
perekonomian Indonesia
tumbuh sebesar 4,67**

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2014 s.d. Triwulan II-2015 (persen)



Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2015 (persen)



4. Perekonomian Indonesia triwulan II-2015 yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.866,9 triliun, dan PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.239,3 triliun.
5. Struktur PDB triwulan II-2015 didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Perdagangan Besar-Eceran, dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor masing-masing memberikan kontribusi sebesar 20,91 persen, 14,33 persen dan 13,26 persen.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw I- 2015	Triw II- 2015	Triw I- 2015	Triw II- 2015	Semester I-2015	Sumber Pertumbuhan
	Terhadap Triw IV- 2014 (q-to-q)	Terhadap Triw I- 2015 (q-to-q)	Terhadap Triw I- 2014 (y-on-y)	Terhadap Triw II- 2014 (y-on-y)	Terhadap Semester I-2014	Triw II- 2015 (y-on-y)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,85	10,09	4,00	6,64	5,37	0,91
2. Pertambangan dan Penggalian	-8,18	-2,57	-1,23	-5,87	-3,58	-0,54
3. Industri Pengolahan	-0,53	3,86	3,97	4,42	4,20	0,96
4. Pengadaan Listrik dan Gas	-7,17	4,43	1,73	0,76	1,23	0,01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,19	2,27	2,15	2,21	0,00
6. Konstruksi	-5,95	3,14	6,03	5,35	5,68	0,51
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,41	3,94	3,96	1,69	2,79	0,24
8. Transportasi dan Pergudangan	-1,25	3,62	6,26	6,59	6,43	0,25
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	1,74	3,56	3,87	3,72	0,12

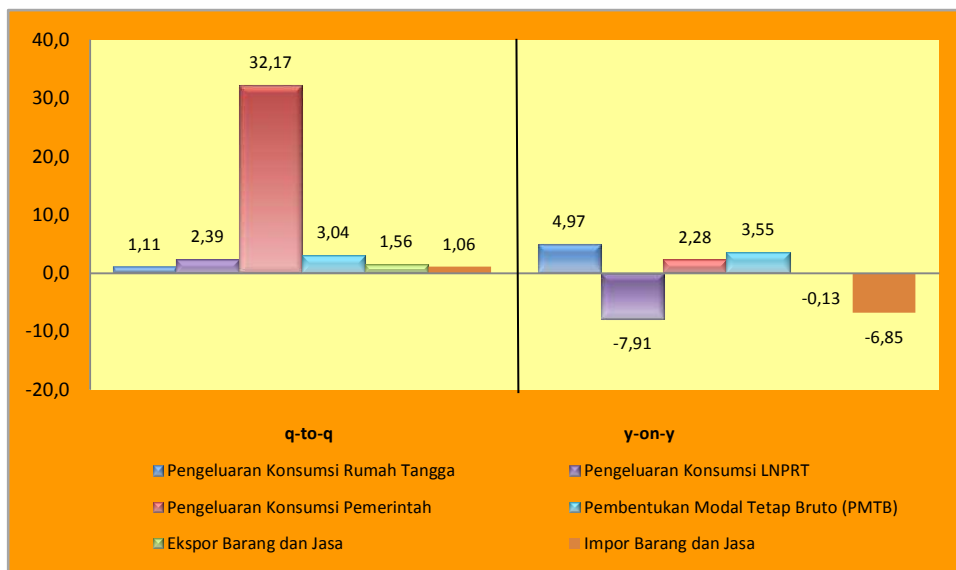
Lapangan Usaha	Triw I- 2015 Terhadap Triw IV- 2014 (q-to-q)	Triw II- 2015 Terhadap Triw I- 2015 (q-to-q)	Triw I- 2015 Terhadap Triw I- 2014 (y-on-y)	Triw II- 2015 Terhadap Triw II- 2014 (y-on-y)	Semester I-2015 Terhadap Semester I-2014	Sumber Pertumbuhan Triw II- 2015 (y-on-y)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
10. Informasi dan Komunikasi	2,61	2,08	10,06	9,56	9,81	0,43
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,71	-1,21	7,57	2,46	4,97	0,09
12. Real Estat	1,17	1,08	5,26	5,03	5,14	0,15
13. Jasa Perusahaan	2,24	1,78	7,36	7,64	7,50	0,12
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,43	0,48	4,71	6,46	5,58	0,21
15. Jasa Pendidikan	-10,89	6,31	5,92	12,16	9,05	0,36
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-6,39	3,30	7,34	8,16	7,76	0,08
17. Jasa lainnya	1,84	1,99	8,00	8,07	8,04	0,13
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR PAJAK	-0,43	3,50	4,44	4,13	4,28	4,03
DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK PRODUK DOMESTIK BRUTO	10,31	13,96	16,25	26,70	21,59	0,64
	-0,17	3,78	4,72	4,67	4,70	4,67

Tabel 2.2
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010=100		Distribusi (persen)	
	Triw I- 2015	Triw II- 2015	Triw I- 2015	Triw II- 2015	Triw I- 2015	Triw II- 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	375,2	410,9	283,0	311,6	13,75	14,33
2. Pertambangan dan Penggalian	230,2	231,2	188,6	183,8	8,44	8,06
3. Industri Pengolahan	576,7	599,4	468,6	486,6	21,13	20,91
4. Pengadaan Listrik dan Gas	29,4	33,1	22,7	23,7	1,08	1,16
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,0	2,0	1,7	1,7	0,07	0,07
6. Konstruksi	273,1	282,8	206,8	213,2	10,01	9,86
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	362,9	380,1	291,1	302,6	13,30	13,26
8. Transportasi dan Pergudangan	127,1	134,3	84,8	87,9	4,66	4,69
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87,1	89,1	65,7	66,8	3,19	3,11
10. Informasi dan Komunikasi	97,8	99,8	102,0	104,1	3,58	3,48
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	109,8	109,5	83,6	82,6	4,02	3,82
12. Real Estat	80,3	81,8	66,1	66,9	2,94	2,85
13. Jasa Perusahaan	45,5	46,7	36,1	36,7	1,67	1,63
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	99,4	108,9	74,4	74,7	3,64	3,80
15. Jasa Pendidikan	85,8	96,3	66,7	70,9	3,14	3,36
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,0	29,9	23,0	23,8	1,03	1,04
17. Jasa lainnya	45,5	46,8	35,1	35,8	1,67	1,63
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK PRODUK DOMESTIK BRUTO	2 655,8	2 782,6	2 100,0	2 173,4	97,32	97,06
	73,0	84,3	57,8	65,9	2,68	2,94
	2 728,8	2 866,9	2 157,8	2 239,3	100,00	100,00

6. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 dibandingkan dengan triwulan I-2015 (*q-to-q*) didukung oleh kenaikan Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 32,17 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,04 persen, Konsumsi LNPRT sebesar 2,39 persen, Ekspor sebesar 1,56 persen, dan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,11 persen. Sementara Impor juga tumbuh 1,06 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan II-2015 (persen)



7. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2014 (*y-on-y*) didukung oleh kenaikan Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Konsumsi Pemerintah masing-masing sebesar 4,97 persen, 3,55 persen, dan 2,28 persen. Sementara itu, beberapa komponen mengalami kontraksi, Konsumsi LNPRT (minus 7,91 persen), Ekspor (minus 0,13 persen), dan Impor (minus 6,85 persen).

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran (persen)

Jenis Pengeluaran	Triw I- 2015	Triw II- 2015	Triw I- 2015	Triw II- 2015	Semester I-2015	Sumber Pertumbuhan Triw II-2015 (y-on-y)
	Terhadap Triw IV- 2014	Terhadap Triw I- 2015	Terhadap Triw I- 2015	Terhadap Triw I- 2015	Terhadap Triw I- 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,11	1,11	5,01	4,97	4,99	2,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,19	2,39	-8,25	-7,91	-8,08	-0,10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-48,43	32,17	2,71	2,28	2,47	0,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,77	3,04	4,29	3,55	3,92	1,14
5. Perubahan Inventori Diskrepani Statistik	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang & Jasa	-6,28	1,56	-0,85	-0,13	-0,49	-0,03
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang & Jasa	-10,04	1,06	-2,27	-6,85	-4,62	-1,63
PDB	-0,17	3,78	4,72	4,67	4,70	4,67

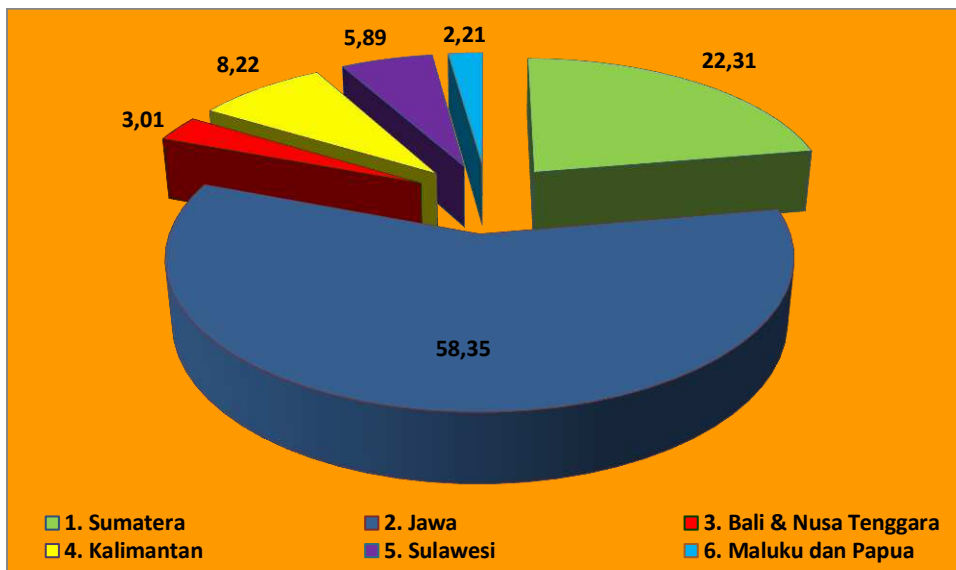
8. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDB atas dasar harga berlaku (adhb) yaitu 54,67 persen (triwulan II-2015), sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (56,04 persen). Sedangkan kontribusi Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor, Impor, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada triwulan II-2015 masing-masing sebesar 32,28 persen, 21,63 persen, 21,41 persen dan 8,87 persen.

Tabel 2.4
Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	Harga Berlakau (Triliun Rupiah)		Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah)		Distribusi ¹⁾ (Persen)	
	Triw I- 2015	Triw II- 2015	Triw I- 2015	Triw II- 2015	Triw I- 2015	Triw II- 2015
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 529,1	1 567,4	1 188,1	1 201,2	56,04	54,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	30,7	31,9	23,7	24,2	1,13	1,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	179,9	254,2	133,7	176,8	6,59	8,87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	891,1	925,5	688,7	709,6	32,65	32,28
5. Perubahan Inventori Diskrepani Statistik	77,8	80,9	55,0	56,2	2,85	2,82
6. Ekspor Barang & Jasa	5,2	0,8	39,4	39,2	0,19	0,03
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang & Jasa	600,3	620,1	497,3	505,1	22,00	21,63
	585,3	613,9	468,2	473,2	21,45	21,41
PDB	2 728,8	2 866,9	2 157,7	2 239,3	100,00	100,00

9. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan II-2015 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,35 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,31 persen, Pulau Kalimantan 8,22 persen, Pulau Sulawesi 5,89 persen, dan sisanya 5,22 persen di pulau-pulau lainnya.

Grafik 2.4
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan II-2015 (persen)



Tabel 2.5
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)

Wilayah/Pulau	2013	2014	2015	
			Trw I	Trw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumatera	23,08	23,17	22,45	22,31
2. Jawa	57,08	57,38	58,36	58,35
3. Bali dan Nusa Tenggara	2,81	2,87	2,98	3,01
4. Kalimantan	9,23	8,71	8,30	8,22
5. Sulawesi	5,49	5,65	5,72	5,89
6. Maluku dan Papua	2,31	2,22	2,19	2,21
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: atas dasar harga berlaku

10. Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan II-2015 menurut kelompok provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar dengan total kontribusi sebesar 53,34 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dengan pertumbuhan *y-on-y* masing-masing sebesar 5,15 persen, 5,25 persen, 4,88 persen, dan 4,84 persen.

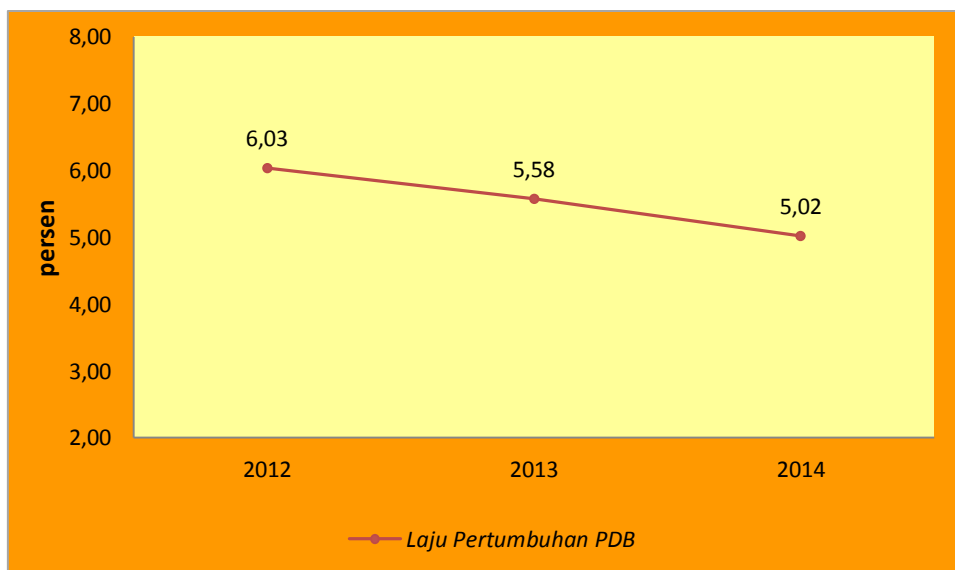
Tabel 2.6
Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan II-2015 (persen)

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>	<i>c-to-c</i>	Terhadap Pulau	Terhadap Total 33 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	1,68	2,85	3,20	100,00	22,31
01. Aceh	2,29	-1,72	-1,92	5,14	1,15
02. Sumatra Utara	0,23	5,11	4,97	21,81	4,86
03. Sumatra Barat	1,70	5,27	5,38	7,22	1,61
04. Riau	1,37	-2,64	-1,36	24,62	5,49
05. Jambi	1,49	5,18	5,56	6,26	1,40
06. Sumatra Selatan	3,51	4,87	4,80	12,95	2,89
07. Bengkulu	0,73	5,33	5,38	1,92	0,43
08. Lampung	4,17	5,07	5,00	9,92	2,21
09. Kep. Bangka Belitung	2,23	3,93	4,02	2,36	0,53
10. Kepulauan Riau	0,31	5,57	6,35	7,80	1,74
Jawa	2,68	5,07	5,10	100,00	58,35
11. DKI Jakarta	2,46	5,15	5,11	29,05	16,95
12. Jawa Barat	3,16	4,88	4,87	22,56	13,16
13. Jawa Tengah	2,61	4,84	5,17	14,93	8,72
14. DI Yogyakarta	-0,09	4,72	4,44	1,48	0,86
15. Jawa Timur	2,83	5,25	5,22	24,87	14,51
16. Banten	2,20	5,26	5,34	7,11	4,15
Bali dan Nusa Tenggara	3,44	8,88	8,88	100,00	3,01
17. Bali	2,90	6,02	6,12	50,26	1,51
18. Nusa Tenggara Barat	3,76	16,51	16,51	28,44	0,86
19. Nusa Tenggara Timur	4,24	5,03	4,84	21,30	0,64
Kalimantan	1,41	1,48	1,59	100,00	8,22
20. Kalimantan Barat	-0,30	4,01	4,40	14,77	1,21
21. Kalimantan Tengah	0,14	6,98	7,34	10,51	0,86
22. Kalimantan Selatan	7,92	3,18	3,53	15,14	1,24
23. Kalimantan Timur	0,62	-0,25	-0,28	59,57	4,90
Sulawesi	5,73	8,58	7,92	100,00	5,89
24. Sulawesi Utara	7,44	6,27	6,34	12,99	0,77
25. Sulawesi Tengah	2,21	15,72	16,26	15,34	0,90
26. Sulawesi Selatan	6,44	7,62	6,52	49,95	2,94
27. Sulawesi Tenggara	6,73	7,45	6,64	12,79	0,75
28. Gorontalo	0,86	6,36	5,54	4,08	0,24

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	q-to-q	y-on-y	c-to-c	Terhadap Pulau	Terhadap Total 33 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29. Sulawesi Barat	7,32	8,40	7,15	4,85	0,29
Maluku dan Papua	4,30	10,17	6,89	100,00	2,21
30. Maluku	2,99	5,80	4,94	13,34	0,30
31. Maluku Utara	2,51	6,54	5,90	10,29	0,23
32. Papua Barat	-1,46	7,39	2,57	24,24	0,54
33. Papua	7,26	12,77	9,29	52,13	1,15

11. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2014 meningkat sebesar 5,02 persen terhadap tahun 2013, terjadi pada semua lapangan usaha ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi 10,02 persen dan terendah di Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,55 persen.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan PDB, 2012–2014 (persen)



12. Pada tahun 2014, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 21,02 persen diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,38 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,38 persen.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha, 2012–2014 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,59	4,20	4,18	13,37	13,39	13,38
B Pertambangan dan Penggalian	3,02	1,74	0,55	11,61	10,95	9,82
C Industri Pengolahan	5,62	4,49	4,673	21,46	20,98	21,02
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,06	5,23	5,57	1,11	1,04	1,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,34	4,06	3,05	0,08	0,08	0,07
F Konstruksi	6,56	6,11	6,97	9,35	9,51	9,88
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,40	4,71	4,84	13,21	13,27	13,38
H Transportasi dan Pergudangan	7,11	8,38	8,00	3,64	3,87	4,27
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,64	6,80	5,91	2,93	3,04	3,14
J Informasi dan Komunikasi	12,28	10,39	10,02	3,61	3,58	3,50
K Jasa Keuangan dan Asuransi	9,54	9,09	4,93	3,78	3,87	3,88
L Real Estat	7,41	6,54	5,00	2,76	2,77	2,79
M,N Jasa Perusahaan	7,44	7,91	9,81	1,48	1,52	1,57
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,13	2,38	2,49	3,95	3,90	3,84
P Jasa Pendidikan	8,22	8,20	6,29	3,14	3,25	3,29
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,97	7,83	8,01	1,00	1,01	1,03
R,S,T,U Jasa Lainnya	5,76	6,41	8,92	1,42	1,47	1,56
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	5,85	5,21	5,02	97,84	97,50	97,50
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	15,05	22,10	5,13	2,16	2,50	2,50
PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,03	5,58	5,02	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

13. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku mencapai Rp10.542,7 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2010) mencapai Rp8.568,1 triliun.

Tabel 2.8
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
2012–2014 (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 152,3	1 275,0	1 410,7	1 039,4	1 083,2	1 128,5
B Pertambangan dan Penggalian	1 000,3	1 043,0	1 035,1	771,6	785,0	789,3
C Industri Pengolahan	1 848,1	1 998,7	2 215,8	1 697,8	1 774,1	1 856,3
D Pengadaan Listrik dan Gas	95,6	98,7	114,1	84,4	88,8	93,8
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,6	7,1	7,7	6,3	6,6	6,8
F Konstruksi	805,2	906,0	1 041,9	728,2	772,7	826,6
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 138,5	1 263,8	1 410,9	1 067,9	1 118,2	1 172,4
H Transportasi dan Pergudangan	313,2	368,7	450,6	284,7	308,5	333,2
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	252,6	289,5	330,7	228,2	243,7	258,2
J Informasi dan Komunikasi	311,4	341,0	368,9	316,3	349,2	384,1
K Jasa Keuangan dan Asuransi	320,5	368,9	408,6	280,9	306,4	321,5
L Real Estat	237,9	264,3	294,67	229,3	244,2	256,4
M,N Jasa Perusahaan	127,7	144,67	166,0	116,3	125,5	137,8
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	340,6	371,2	404,4	282,2	289,0	296,1
P Jasa Pendidikan	270,4	309,4	346,6	232,7	251,8	267,6
Q Jasa Keesehatan dan Kegiatan Sosial	86,2	96,7	109,1	78,4	84,5	91,3
R,S,T,U Jasa Lainnya	122,6	140,3	163,5	115,7	123,1	134,1
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	8 429,7	9 286,9	10 279,2	7 560,3	7 954,5	8 354,0
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	186,0	237,8	263,5	166,8	203,7	214,1
PRODUK DOMESTIK BRUTO	8 615,7	9 524,7	10 542,7	7 727,1	8 158,2	8 568,1

14. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,02 persen ditopang oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,14 persen. Sementara itu, , Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh 12,43 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh 1,98 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 4,12 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dari pertumbuhan tahun lalu lebih disebabkan oleh komponen Ekspor yang tumbuh hanya sebesar 1,02 persen dan Komponen Impor Barang dan Jasa yang tumbuh hanya 2,19 persen.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran, 2012–2014 (persen)

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,49	5,38	5,14	55,35	56,20	56,07
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,68	8,18	12,43	1,04	1,09	1,18
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,53	6,93	1,98	9,25	9,50	9,54
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	9,13	5,28	4,12	32,72	32,12	32,57
5 Perubahan Inventori	-	-	-	2,35	1,92	2,08
6 Ekspor Barang dan Jasa	1,61	4,17	1,02	24,59	23,98	23,78
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8,00	1,86	2,19	24,99	24,76	24,48
Diskrepani Statistik	-	-	-	-0,31	-0,05	-0,68
PDB	6,03	5,58	5,02	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

15. Pada tahun 2014, PDB dari sisi pengeluaran digunakan untuk memenuhi Konsumsi Rumah Tangga sebesar 56,07 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi Fisik 32,57 persen, Ekspor Barang dan Jasa 23,78 persen, Konsumsi Pemerintah 9,54 persen, dan Konsumsi LNPRT 1,18 persen. Sedangkan untuk penyediaan dari Impor sebesar 23,78 persen.

Tabel 2.10
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran 2012–2014 (triliun rupiah)

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4 768,7	5 352,7	5 911,2	4 195,8	4 421,7	4 649,1
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	89,6	103,9	124,5	81,9	88,6	99,6
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	796,8	905,0	1 005,4	681,8	729,1	743,5
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2 819,0	3 059,8	3 434,1	2 527,7	2 661,3	2 771,0
5 Perubahan Invenntori	202,6	183,3	219,0	174,2	149,1	162,9
6 Ekspor Barang dan Jasa	2 119,0	2 283,8	2 501,2	1 945,1	2 026,1	2 046,7
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 152,9	2 359,2	2 580,5	1 910,3	1 945,9	1 988,5
Diskrepani Statistik	-27,2	-4,5	-72,2	30,9	28,1	83,9
PDB	8 615,7	9 524,7	10 542,7	7 727,1	8 158,2	8 568,1

16. Dalam kurun waktu 2010-2014, PDB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp28,8 juta, tahun 2011 sebesar Rp32,4 juta, tahun 2012 sebesar Rp35,1 juta, pada tahun 2013 mencapai Rp38,3 juta, dan pada tahun 2014 mencapai Rp41,8 juta.

Tabel 2.11
PDB Per Kapita Indonesia, 2010–2014

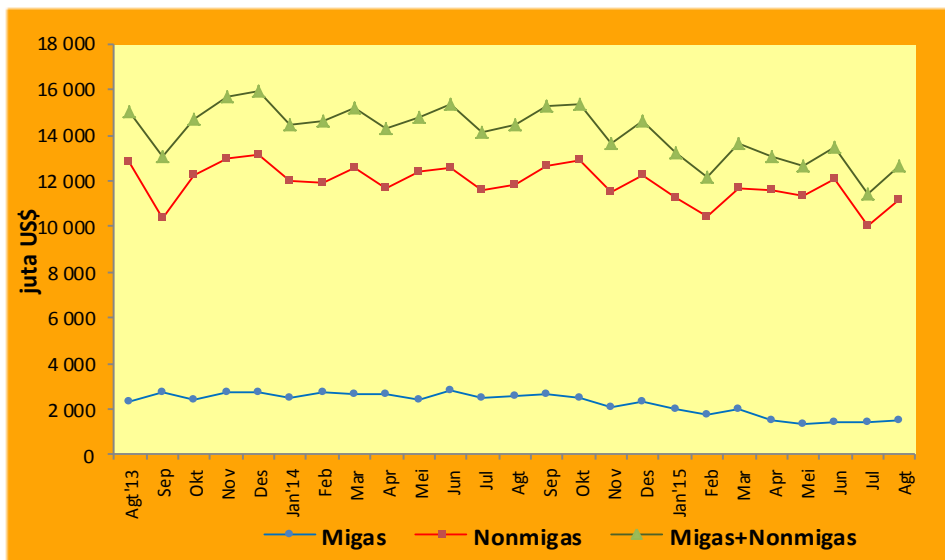
Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB Per Kapita					
Atas Dasar Harga Berlaku					
a. Nilai (juta rupiah)	28,8	32,4	35,1	38,3	41,8
b. Indeks Peningkatan (persen)	-	12,46	14,50	9,04	9,22
c. Nilai (US\$)	3 198,3	3 721,2	3 751,4	3 669,7	3 531,5

III. EKSPOR AGUSTUS 2015

1. Nilai ekspor Indonesia Agustus 2015 mencapai US\$12,70 miliar, atau naik sebesar 10,79 persen dibanding ekspor Juli 2015. Sementara itu dibanding Agustus 2014, ekspor turun sebesar 12,28 persen.

Nilai ekspor Agustus 2015 mencapai US\$12,70 miliar, naik 10,79 persen

Grafik 3.1
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB)
Agustus 2013–Agustus 2015



2. Ekspor nonmigas Agustus 2015 mencapai US\$11,17 miliar, naik 11,23 persen dibanding ekspor nonmigas Juli 2015, sementara itu turun 5,99 persen dibanding ekspor Agustus 2014.
3. Secara kumulatif nilai ekspor Januari–Agustus 2015 mencapai US\$102,52 miliar atau turun 12,70 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2014, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US\$89,60 miliar atau turun 7,30 persen.
4. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Agustus 2015 terhadap Juli 2015 terjadi pada perhiasan/permata sebesar US\$237,1 juta (121,75 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada timah sebesar US\$103,8 juta (99,96 persen).

5. Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat Agustus 2015 mencapai angka terbesar, yaitu US\$1,33 miliar, disusul Tiongkok US\$1,11 miliar dan Jepang US\$1,05 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 31,24 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US\$1,23 miliar.
6. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Agustus 2015 turun sebesar 7,36 persen dibanding ekspor hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2014, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 9,15 persen, sedangkan ekspor hasil pertanian naik 1,77 persen.
7. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada periode Januari–Agustus 2015 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US\$17,06 miliar (16,64 persen), diikuti Kalimantan Timur sebesar US\$12,92 miliar (12,60 persen) dan Jawa Timur sebesar US\$11,40 miliar (11,12 persen).

Tabel 3.1
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya (Δ %)

Uraian	2014		2015			Δ (%)			Peran (%) Jan–Agt 2015
	Agustus	Jan–Agt	Juli	Agustus	Jan–Agt	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan–Agt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	14 481,6	117 430,3	11 465,8	12 702,8	102 520,6	-12,28	10,79	-12,70	100,00
Migas	2 598,1	20 779,6	1 421,8	1 530,8	12 922,3	-41,08	7,67	-37,81	12,60
-Minyak Mentah	814,2	6 134,3	427,9	620,5	4 463,1	-23,79	45,01	-27,24	4,35
-Hasil Minyak	246,9	2 493,2	125,8	141,8	1 386,0	-42,57	12,69	-44,41	1,35
-Gas	1 537,0	12 152,1	868,1	768,5	7 073,2	-50,00	-11,47	-41,79	6,90
Nonmigas	11 883,5	96 650,7	10 044,0	11 172,0	89 598,3	-5,99	11,23	-7,30	87,40
-Pertanian	520,5	3 651,7	443,4	584,7	3 716,5	12,33	31,87	1,77	3,63
-Industri Pengolahan	9 448,5	77 955,0	7 909,9	8 897,0	72 214,1	-5,84	12,48	-7,36	70,44
-Pertambangan dan Lainnya	1 914,5	15 044,0	1 690,7	1 690,3	13 667,7	-11,71	-0,02	-9,15	13,33

Tabel 3.2
Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$)
Triwulanan 2014–2015

Uraian	2014			2015		Perubahan Triwulan (%)				
	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	III'14	IV'14	I'15	II'15	II'15
						thd	thd	thd	thd	thd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	II'14	III'14	IV'14	I'15	II'14
Total Ekspor	44 525,5	43 881,6	43 273,8	39 052,0	39 300,0	-1,45	-1,39	-9,76	0,63	-11,74
Migas	7 813,0	7 717,1	6 616,6	5 701,2	4 268,4	-1,23	-14,26	-13,83	-25,13	-45,37
-Minyak Mentah	2 432,1	2 547,1	2 025,6	1 859,7	1 555,0	4,73	-20,48	-8,19	-16,39	-36,06
-Hasil Minyak	1 024,4	862,0	822,9	607,5	510,8	-15,86	-4,53	-26,17	-15,93	-50,14
-Gas	4 356,5	4 308,0	3 768,1	3 234,0	2 202,6	-1,11	-12,53	-14,17	-31,89	-49,44
Nonmigas	36 712,5	36 164,5	36 657,2	33 350,8	35 031,6	-1,49	1,36	-9,02	5,04	-4,58
-Pertanian	1 386,5	1 568,6	1 548,5	1 317,6	1 370,8	13,13	-1,28	-14,91	4,04	-1,14
-Industri Pengolahan	29 844,0	28 743,3	29 480,4	26 838,8	28 568,4	-3,69	2,56	-8,96	6,44	-4,27
-Pertambangan dan Lainnya	5 482,0	5 852,6	5 628,3	5 194,4	5 092,4	6,76	-3,83	-7,71	-1,96	-7,11

Tabel 3.3
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)

Golongan Barang (HS)	Juli 2015	Agustus 2015	Δ	$\Delta\%$	Januari-Agustus			
					2014	2015	$\Delta\%$	Peran(%) 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Lemak dan minyak hewan/nabati (15)	1 460,8	1 397,7	-63,1	-4,32	13 777,7	12 613,7	-8,45	14,08
2. Bahan bakar mineral (27)	1 307,8	1 279,9	-27,9	-2,13	14 494,3	11 304,2	-22,01	12,62
3. Karet dan barang dari karet (40)	487,5	569,2	81,7	16,75	5 002,7	4 075,6	-18,53	4,55
4. Perhiasan/permata (71)	194,8	431,9	237,1	121,75	3 169,1	4 059,9	28,10	4,53
5. Kendaraan dan bagiannya (87)	360,2	508,0	147,8	41,04	3 269,7	3 661,9	11,99	4,09
6. Mesin-mesin/pesawat mekanik (84)	392,6	538,9	146,3	37,26	3 962,4	3 533,8	-10,82	3,94
7. Berbagai produk kimia (38)	230,3	197,6	-32,7	-14,19	2 946,2	1 834,8	-37,72	2,05
8. Kopi, teh, rempah-rempah (09)	201,6	300,6	99,0	49,06	1 127,1	1 450,3	28,68	1,62
9. Timah (80)	103,8	0,0	-103,8	-99,96	1 296,5	856,8	-33,91	0,95
10. Kapal terbang dan bagiannya (88)	26,0	7,4	-18,6	-71,67	66,8	127,1	90,16	0,14
Total 10 Golongan Barang	4 765,4	5 231,2	465,8	9,77	49 112,5	43 518,1	-11,39	48,57
Lainnya	5 278,6	5 940,8	662,2	12,55	47 538,2	46 080,2	-3,07	51,43
Total Ekspor Nonmigas	10 044,0	11 172,0	1 128,0	11,23	96 650,7	89 598,3	-7,30	100,00

Tabel 3.4
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)

Negara Tujuan	Juli 2015	Agustus 2015	Δ	Δ%	Januari-Agustus			Peran (%) 2015
					2014	2015	Δ%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASEAN	2 125,8	2 338,5	212,7	10,01	19 104,1	18 309,3	-4,16	20,43
1 Singapura	619,8	711,3	91,5	14,76	6 799,8	5 832,7	-14,22	6,51
2 Malaysia	499,4	467,5	-31,9	-6,38	4 248,4	4 284,3	0,84	4,78
3 Thailand	368,6	396,3	27,7	7,51	3 388,4	3 171,9	-6,39	3,54
ASEAN Lainnya	638,0	763,4	125,4	19,65	4 667,5	5 020,4	7,56	5,60
Uni Eropa	1 104,7	1 229,0	124,3	11,25	11 304,9	10 005,6	-11,49	11,17
4 Jerman	194,4	242,0	47,6	24,47	1 891,6	1 798,7	-4,91	2,01
5 Belanda	240,4	197,0	-43,4	-18,06	2 612,8	2 300,6	-11,95	2,57
6 Italia	142,5	153,7	11,2	7,89	1 570,1	1 334,5	-15,00	1,49
Uni Eropa Lainnya	527,4	636,3	108,9	20,65	5 230,4	4 571,8	-12,59	5,10
Negara Utama Lainnya	5 070,9	5 439,7	368,8	7,27	48 031,4	44 406,6	-7,55	49,56
7 Tiongkok	1 105,3	1 111,5	6,2	0,57	11 293,0	8 867,1	-21,48	9,89
8 Jepang	1 009,2	1 047,2	38,0	3,76	9 426,2	8 779,6	-6,86	9,80
9 Amerika Serikat	1 166,6	1 330,9	164,3	14,09	10 478,7	10 331,1	-1,41	11,53
10 India	833,5	774,0	-59,5	-7,14	7 890,2	8 010,5	1,52	8,94
11 Australia	289,1	321,3	32,2	11,13	2 540,9	2 004,8	-21,10	2,24
12 Korea Selatan	430,1	521,2	91,1	21,19	3 698,6	3 788,9	2,44	4,23
13 Taiwan	237,1	333,6	96,5	40,70	2 703,8	2 624,6	-2,93	2,93
Total 13 Negara Tujuan	7 136,0	7 607,5	471,5	6,61	68 542,5	63 129,3	-7,90	70,46
Lainnya	2 908,0	3 564,5	656,5	22,57	28 108,2	26 469,0	-5,83	29,54
Total Ekspor Nonmigas	10 044,0	11 172,0	1 128,0	11,23	96 650,7	89 598,3	-7,30	100,00

Tabel 3.5
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2013–2015
(FOB: juta US\$)

Bulan	2013			2014 ^r			2015		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan	2 653,7	12 721,8	15 375,5	2 501,7	11 970,6	14 472,3	1 959,0	11 285,9	13 244,9
Feb	2 567,5	12 448,1	15 015,6	2 729,2	11 904,9	14 634,1	1 753,4	10 419,4	12 172,8
Mar	2 928,3	12 096,3	15 024,6	2 641,3	12 551,3	15 192,6	1 988,9	11 645,4	13 634,3
Apr	2 452,0	12 308,9	14 760,9	2 651,4	11 641,1	14 292,5	1 458,2	11 645,5	13 103,7
Juli	2 926,3	13 207,1	16 133,4	2 375,7	12 447,9	14 823,6	1 370,3	11 319,9	12 690,2
Jun	2 800,4	11 958,5	14 758,9	2 786,0	12 623,5	15 409,5	1 439,9	12 066,2	13 506,1
Jul	2 282,6	12 805,3	15 087,9	2 496,3	11 627,8	14 124,1	1 421,8	10 044,0	11 465,8
Agt	2 720,5	10 363,2	13 083,7	2 598,1	11 883,5	14 481,6	1 530,8	11 172,0	12 702,8
Sep	2 414,7	12 292,1	14 706,8	2 622,6	12 653,2	15 275,8			
Okt	2 715,2	12 983,1	15 698,3	2 413,2	12 268,4	15 292,8			
Nov	2 766,9	13 171,7	15 938,6	2 035,4	11 509,3	13 544,7			
Des	3 405,1	13 562,7	16 967,8	2 168,0	12 268,3	14 436,3			
Total	32 633,0	149 918,8	182 551,8	30 018,8	145 961,2	175 980,0	12 922,3	89 598,3	102 520,6

Catatan: ^r Angka diperbaiki

Tabel 3.6
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang
dan Pelabuhan Muat, Januari–Agustus 2015

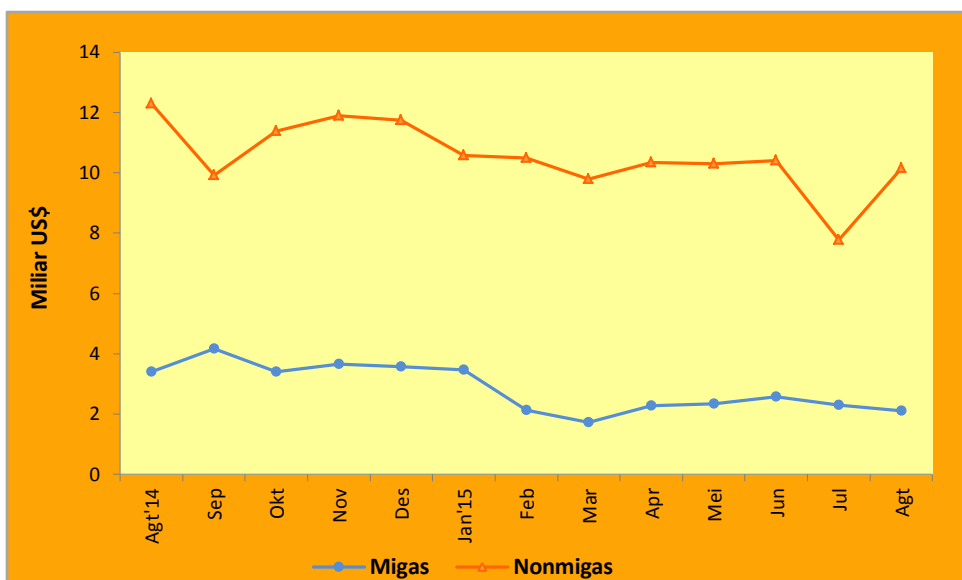
No Urut	Provinsi Asal Barang	Pelabuhan Muat						Total Ekspor		
		Prov Asal Barang			Prov Lain			Nilai	% Kolom	% Baris
		Nilai	% Kolom	% Baris	Nilai	% Kolom	% Baris			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	73,2	0,10	87,59	10,4	0,04	12,41	83,6	0,08	100,00
2	Sumatera Utara	5 054,0	6,68	99,40	30,7	0,11	0,60	5 084,7	4,96	100,00
3	Sumatera Barat	1 066,2	1,41	97,76	24,5	0,09	2,24	1 090,7	1,06	100,00
4	Riau	9 707,2	12,82	98,73	125,2	0,47	1,27	9 832,3	9,59	100,00
5	Kepulauan Riau	6 959,5	9,19	100,00	0,1	0,00	0,00	6 959,6	6,79	100,00
6	Jambi	746,2	0,99	39,59	1 138,9	4,25	60,41	1 885,1	1,84	100,00
7	Sumatera Selatan	1 708,6	2,26	96,22	67,1	0,25	3,78	1 775,7	1,73	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	912,5	1,21	95,89	39,1	0,15	4,11	951,6	0,93	100,00
9	Bengkulu	60,1	0,08	55,58	48,0	0,18	44,42	108,1	0,11	100,00
10	Lampung	2 545,4	3,36	99,09	23,4	0,09	0,91	2 568,7	2,51	100,00
11	DKI Jakarta	7 813,3	10,32	99,90	7,7	0,03	0,10	7 820,9	7,63	100,00
12	Jawa Barat	537,9	0,71	3,15	16 520,1	61,58	96,85	17 057,9	16,64	100,00
13	Banten	735,0	0,97	11,89	5 448,7	20,31	88,11	6 183,7	6,03	100,00
14	Jawa Tengah	3 491,3	4,61	81,94	769,6	2,87	18,06	4 260,9	4,16	100,00
15	DI Yogyakarta	5,6	0,01	2,58	209,8	0,78	97,42	215,4	0,21	100,00
16	Jawa Timur	11 173,6	14,76	98,02	226,3	0,84	1,98	11 399,9	11,12	100,00
17	Bali	135,5	0,18	41,45	191,4	0,71	58,55	326,9	0,32	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	1 048,6	1,39	99,50	5,3	0,02	0,50	1 053,9	1,03	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	14,7	0,02	89,46	1,7	0,01	10,54	16,4	0,02	100,00
20	Kalimantan Barat	382,3	0,51	98,50	5,8	0,02	1,50	388,2	0,38	100,00
21	Kalimantan Tengah	320,0	0,42	37,85	525,6	1,96	62,15	845,6	0,82	100,00
22	Kalimantan Selatan	3 844,8	5,08	96,33	146,4	0,55	3,67	3 991,2	3,89	100,00
23	Kalimantan Timur	12 149,4	16,05	94,05	768,7	2,87	5,95	12 918,1	12,60	100,00
24	Kalimantan Utara	4,4	0,01	61,69	2,7	0,01	38,31	7,1	0,01	100,00
25	Sulawesi Utara	572,7	0,76	79,23	150,2	0,56	20,77	722,8	0,71	100,00
26	Gorontalo	26,5	0,03	98,43	0,4	0,00	1,57	26,9	0,03	100,00
27	Sulawesi Tengah	165,7	0,22	96,81	5,5	0,02	3,19	171,2	0,17	100,00
28	Sulawesi Selatan	964,1	1,27	97,31	26,6	0,10	2,69	990,7	0,97	100,00
29	Sulawesi Barat	–	–	–	202,2	0,75	100,00	202,2	0,20	100,00
30	Sulawesi Tenggara	107,1	0,14	57,60	78,8	0,29	42,40	185,9	0,18	100,00
31	Maluku	20,2	0,03	57,43	15,0	0,06	42,57	35,2	0,03	100,00
32	Maluku Utara	7,4	0,01	90,12	0,8	0,00	9,88	8,3	0,01	100,00
33	Papua	1 400,6	1,85	100,00	0,0	0,00	0,00	1 400,6	1,37	100,00
34	Papua Barat	1 940,6	2,56	99,49	10,0	0,04	0,51	1 950,6	1,90	100,00
Total Ekspor		75 694,0	100,00	–	26 826,6	100,00	–	102 520,6	100,00	–

IV. IMPOR AGUSTUS 2015

1. Nilai impor Indonesia Agustus 2015 sebesar US\$12,27 miliar atau naik 21,69 persen dibanding impor Juli 2015. Dibanding impor Agustus 2014 turun 17,06 persen.

**Impor Agustus 2015
sebesar US\$12,27 miliar
atau naik 21,69 persen**

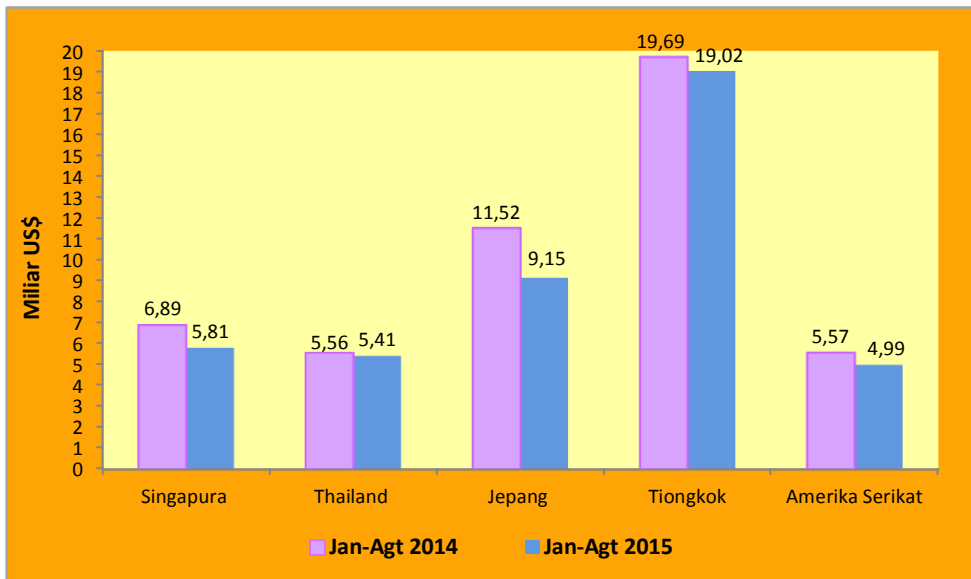
Grafik 4.1
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)
Agustus 2014–Agustus 2015



2. Impor nonmigas Agustus 2015 sebesar US\$10,16 miliar, naik 30,48 persen dibanding Juli 2015 (US\$7,79 miliar). Selama Januari–Agustus 2015 impor nonmigas mencapai US\$78,80 miliar atau turun 11,92 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$89,46 miliar).
3. Impor migas Agustus 2015 sebesar US\$2,11 miliar, turun 8,12 persen dibanding Juli 2015 (US\$2,29 miliar). Selama Januari–Agustus 2015 impor migas mencapai US\$17,50 miliar atau turun 40,41 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$29,37 miliar).

4. Peningkatan nilai impor nonmigas Agustus 2015 terbesar adalah mesin dan peralatan mekanik dengan nilai US\$1,95 miliar, naik 26,46 persen dibanding Juli 2015. Impor golongan barang tersebut selama Januari–Agustus 2015 mencapai US\$14,79 miliar, turun 14,34 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar periode Januari–Agustus 2015 ditempati Tiongkok 24,13 persen, Jepang 11,62 persen, dan Singapura 7,37 persen. Impor nonmigas dari ASEAN dan Uni Eropa masing-masing 21,93 persen dan 9,54 persen.

Grafik 4.2
Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF)
Januari–Agustus 2014 dan 2015



6. Nilai impor selama Januari-Agustus 2015 pada golongan barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal mengalami penurunan masing-masing sebesar 13,17 persen, 20,09 persen, dan 16,13 persen dibanding impor periode yang sama tahun sebelumnya.
7. Neraca perdagangan Indonesia Agustus 2015 surplus sebesar US\$0,43 miliar.

Tabel 4.1
Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya
Januari–Agustus 2014 dan 2015

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Jan–Agt '15 (%)
	Juli 2015	Agustus 2015	Jan–Agt 2014	Jan–Agt 2015	Agt 2015 thd Jul 2015	Jan–Agt 2015 thd Jan–Agt 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	10 081,9	12 269,0	118 828,6	96 300,3	21,69	-18,96	100,00
Migas	2 294,3	2 108,0	29 368,2	17 499,3	-8,12	-40,41	18,17
- Minyak Mentah	706,7	636,4	9 441,2	5 560,1	-9,95	-41,11	5,77
- Hasil Minyak	1 436,0	1 288,1	17 829,2	10 569,4	-10,30	-40,72	10,98
- Gas	151,6	183,5	2 097,8	1 369,8	21,04	-34,70	1,42
Nonmigas	7 787,6	10 161,0	89 460,4	78 801,0	30,48	-11,92	81,83

Tabel 4.2
Perkembangan Impor Indonesia
Agustus 2014–Agustus 2015

Periode	Nilai CIF (Juta US\$)			Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya (%)		
	Migas	Nonmigas	Total Impor	Migas	Nonmigas	Total Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014						
Triwulan II	10 793,0	35 929,5	46 723,0	-1,90	11,48	8,08
Agustus	3 399,3	11 393,9	14 793,2	-18,54	14,99	5,05
September	3 651,6	11 894,5	15 546,1	7,42	4,39	5,09
Triwulan III	11 223,9	33 197,1	44 421,0	3,99	-7,60	-4,93
Oktober	3 577,6	11 750,4	15 328,0	-2,03	-1,21	-1,40
November	3 473,0	10 568,6	14 041,6	-2,92	-10,06	-8,39
Desember	3 389,5	11 045,0	14 434,5	-2,40	4,51	2,80
Triwulan IV	10 440,1	33 364,0	43 804,1	-6,98	0,50	-1,39
Jan–Agt	29 368,2	89 460,4	118 828,6	-1,83	-5,76	-4,82
Jan–Des	43 459,9	134 718,9	178 178,8	-3,99	-4,70	-4,53
2015						
Januari	2 115,0	10 497,6	12 612,6	-37,60	-4,96	-12,62
Februari	1 719,6	9 790,5	11 510,1	-18,70	-6,74	-8,74
Maret	2 268,0	10 340,7	12 608,7	31,89	5,62	9,54
Triwulan I	6 102,6	30 628,8	36 731,4	-41,55	-8,20	-16,15
April	2 336,3	10 290,0	12 626,3	3,01	-0,49	0,14
Mei	2 080,5	9 533,1	11 613,6	-10,95	-7,36	-8,02
Juni	2 577,5	10 400,6	12 978,1	23,89	9,10	11,75
Triwulan II	6 994,3	30 226,7	37 218,0	14,61	-1,32	1,32
Juli	2 294,3	7 787,6	10 081,9	-10,99	-25,12	-22,32
Agustus	2 108,0	10 161,0	12 269,0	-8,12	30,48	21,69
Jan–Agt	17 499,3	78 801,0	96 300,3	-40,41	-11,92	-18,96

Tabel 4.3
Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya
Januari–Agustus 2014 dan 2015

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan–Agt'15 (%)
	Juli 2015	Agustus 2015	Jan–Agt 2014	Jan–Agt 2015	Agt 2015 thd Jul 2015	Jan–Agt '15 thd Jan–Agt '14	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Mesin dan peralatan mekanik (84)	1 545,9	1 954,9	17 261,6	14 786,6	26,46	-14,34	18,77
2. Mesin dan peralatan listrik (85)	1 049,8	1 264,3	11 556,85	10 184,5	20,43	-11,87	12,92
3. Plastik dan barang dari plastik (39)	441,7	619,6	5 083,1	4 580,1	40,28	-9,90	5,81
4. Besi dan baja (72)	295,3	477,0	5 553,4	4 215,1	61,53	-24,10	5,35
5. Sereal (10)	215,2	193,1	2 211,5	1 993,8	-10,27	-9,84	2,53
6. Kapal terbang dan bagiannya (88)	155,6	41,0	379,9	468,7	-73,65	23,37	0,60
7. Bijih, kerak dan abu logam (26)	27,6	18,7	272,9	341,8	-32,25	25,25	0,43
8. Perhiasan/permata (71)	208,7	77,0	58,0	325,4	-63,10	461,03	0,41
9. Senjata/amunisi (93)	4,8	108,5	314,4	188,1	2 160,42	-40,17	0,24
10. Timah hitam (78)	15,6	9,0	130,7	95,3	-42,31	-27,08	0,12
Total 10 Golongan Barang	3 960,2	4 763,1	42 822,3	37 179,4	20,27	-13,18	47,18
Barang Lainnya	3 827,4	5 397,9	46 638,1	41 621,6	41,03	-10,76	52,82
Total Impor Nonmigas	7 787,6	10 161,0	89 460,4	78 801,0	30,48	-11,92	100,00

Tabel 4.4
Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang
Januari–Agustus 2015

Negara	Nilai CIF (Juta US\$)				Persentase thd Total (%)			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (2 s.d. 4)	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (6 s.d. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 ASEAN	1 993,8	21 461,1	3 064,2	26 519,1	7,52	80,93	11,50	100,00
2 Jepang	368,3	6 511,0	2 294,1	9 173,4	4,01	70,98	25,01	100,00
3 Korea Selatan	263,9	4 928,6	638,7	5 831,2	4,53	84,52	10,95	100,00
4 Tiongkok	1 704,5	11 376,9	6 085,9	19 167,3	8,89	59,36	31,75	100,00
5 India	119,0	1 444,3	352,9	1 916,2	6,21	75,37	18,42	100,00
6 Australia	250,4	2 915,3	85,8	3 251,5	7,70	89,66	2,64	100,00
7 Selandia Baru	203,7	246,2	10,9	460,8	44,21	53,43	2,37	100,00
8 Amerika Serikat	437,7	3 896,5	688,2	5 022,4	8,71	77,58	13,70	100,00
9 Uni Eropa	961,3	4 276,4	2 323,9	7 561,7	12,71	56,55	30,73	100,00
10 Lainnya	905,3	15 691,8	799,7	17 396,8	5,20	90,20	4,60	100,00
Total Impor	7 207,9	72 748,1	16 344,3	96 300,3	7,49	75,54	16,97	100,00

Tabel 4.5
Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang
Januari–Agustus 2014 dan 2015

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan–Agt '15 (%)
	Juli 2015	Agustus 2015	Jan–Agt 2014	Jan–Agt 2015	Agt 2015 thd Jul 2015	Jan–Agt '15 thd Jan–Agt '14	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASEAN	1 912,6	2 265,2	20 011,3	17 282,1	18,44	-13,64	21,93
1 Singapura	798,8	785,1	6 889,1	5 809,7	-1,75	-15,67	7,37
2 Thailand	572,0	690,2	6 560,7	5 412,6	26,66	-17,50	6,87
3 Malaysia	331,3	446,1	3 818,1	3 375,8	34,65	-11,58	4,28
ASEAN Lainnya	210,5	343,8	2 743,4	2 684,0	63,33	-2,17	3,41
Uni Eropa	806,6	1 037,7	8 426,1	7 517,0	28,65	-10,97	9,54
4 Jerman	204,9	299,8	2 717,4	2 330,2	46,32	-14,25	2,96
5 Belanda	47,2	104,0	575,6	532,2	120,34	-7,54	0,68
6 Italia	99,4	152,7	1 172,8	948,2	53,62	-19,15	1,20
Uni Eropa Lainnya	455,1	481,2	3 960,3	3 706,4	5,74	-6,41	4,70
Negara Utama Lainnya	4 051,7	5 616,4	50 419,2	44 634,6	38,62	-11,47	56,64
7 Tiongkok	1 800,7	2 515,8	19 688,5	19 016,6	39,71	-3,41	24,13
8 Jepang	811,7	1 157,5	11 519,7	9 153,0	42,60	-20,54	11,62
9 Amerika Serikat	424,6	584,9	5 571,5	4 987,4	37,75	-10,48	6,33
10 Korea Selatan	382,1	499,4	5 155,5	4 272,8	30,70	-17,12	5,42
11 Australia	280,7	402,0	3 538,2	3 208,1	43,21	-9,33	4,07
12 Taiwan	182,7	246,6	2 405,7	2 147,2	34,98	-10,75	2,72
13 India	169,2	210,2	2 540,1	1 849,5	24,23	-27,19	2,35
Total 13 Negara Utama	6 105,3	8 094,3	72 152,9	63 043,3	32,58	-12,63	80,00
Negara Lainnya	1 682,3	2 066,7	17 307,5	15 757,7	22,85	-8,95	20,00
Total Impor Nonmigas	7 787,6	10 161,0	89 460,4	78 801,0	30,48	-11,92	100,00

Tabel 4.6
Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2014–Agustus 2015
(Nilai CIF: Juta US\$)

Bulan	2014				2015			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	985,1	11 302,0	2 629,1	14 916,2	786,3	9 618,3	2 208,1	12 612,7
Februari	898,6	10 552,5	2 339,6	13 790,7	823,8	8 762,8	1 923,5	11 510,1
Maret	1 081,9	11 197,7	2 244,1	14 523,7	930,3	9 331,1	2 347,3	12 608,7
April	1 130,1	12 453,8	2 671,1	16 255,0	910,4	9 680,9	2 035,0	12 626,3
Mei	1 045,6	11 349,7	2 375,0	14 770,3	944,2	8 720,0	1 949,4	11 613,6
Juni	1 152,4	11 947,8	2 597,6	15 697,8	1 027,9	9 773,5	2 176,7	12 978,1
Juli	841,2	11 108,1	2 132,4	14 081,7	705,6	7 715,0	1 661,3	10 081,9
Agustus	1 165,8	11 129,1	2 498,3	14 793,2	1 079,4	9 146,6	2 043,0	12 269,0
September	1 168,8	11 756,5	2 620,8	15 546,1				
Oktober	1 028,4	11 581,5	2 718,1	15 328,0				
November	1 026,7	10 737,0	2 277,9	14 041,6				
Desember	1 142,6	11 092,9	2 199,0	14 434,5				
Total	12 667,2	136 208,6	29 303,0	178 178,8	7 207,9	72 748,2	16 344,2	96 300,3
Persentase thd Total (%)	7,11	76,44	16,45	100,00	7,49	75,54	16,97	100,00

Tabel 4.7
Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari–Agustus 2015
 (juta US\$)

Negara Asal Barang	Juni 2015	Juli 2015	Agustus 2015	Jan–Agt 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Tiongkok	2 623,4	1 825,4	2 545,8	19 167,3
2 Singapura	1 607,1	1 691,7	1 497,8	12 255,1
3 Jepang	1 173,2	812,6	1 159,8	9 173,4
4 Malaysia	834,8	722,1	639,5	6 045,9
5 Korea Selatan	835,6	603,3	670,0	5 831,2
6 Thailand	745,4	577,9	697,2	5 457,3
7 Amerika Serikat	791,3	426,0	586,1	5 022,4
8 Australia	500,8	280,7	402,0	3 251,5
9 Saudi Arabia	357,6	231,5	386,6	2 380,5
10 Jerman	283,3	205,2	300,7	2 339,9
11 Taiwan	260,7	185,6	249,0	2 183,0
12 Vietnam	242,6	148,6	248,8	2 092,3
13 India	245,1	187,6	211,6	1 916,2
14 Brazil	164,3	94,6	231,0	1 639,0
15 Hongkong	136,3	126,6	149,4	1 140,6
Total 15 Negara	10 801,6	8 119,4	9 975,3	79 895,4
Negara Lainnya	2 176,5	1 962,5	2 293,8	16 404,9
Total Impor	12 978,1	10 081,9	12 269,0	96 300,3
Persentase Terhadap Total				
Total 15 Negara	83,23	80,53	81,30	82,96
Negara Lainnya	16,77	19,47	18,70	17,04

Tabel 4.8
Neraca Perdagangan Indonesia, Agustus 2014–Agustus 2015
 (miliar US\$)

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014									
Agustus	2,60	11,88	14,48	3,40	11,39	14,79	-0,80	0,49	-0,31
September	2,62	12,66	15,28	3,65	11,89	15,54	-1,03	0,77	-0,26
Oktober	2,47	12,88	15,35	3,58	11,75	15,33	-1,11	1,13	0,02
November	2,11	11,51	13,62	3,47	10,57	14,04	-1,36	0,94	-0,42
Desember	2,35	12,27	14,62	3,39	11,05	14,43	-1,04	1,22	0,19
Jan–Agt	20,78	96,64	117,42	29,37	89,46	118,83	-8,59	7,18	-1,41
Jan–Des	30,33	145,96	176,29	43,46	134,72	178,18	-13,13	11,24	-1,88
2015									
Januari	1,96	11,29	13,25	2,11	10,50	12,61	-0,15	0,79	0,64
Februari	1,75	10,42	12,17	1,72	9,79	11,51	0,03	0,63	0,66
Maret	1,99	11,64	13,63	2,27	10,34	12,61	-0,28	1,30	1,02
April	1,46	11,65	13,11	2,34	10,29	12,63	-0,88	1,36	0,48
Mei	1,37	11,32	12,69	2,08	9,53	11,61	-0,71	1,79	1,08
Juni	1,44	12,07	13,51	2,58	10,40	12,98	-1,14	1,67	0,53
Juli	1,42	10,05	11,47	2,29	7,79	10,08	-0,87	2,26	1,39
Agustus	1,53	11,17	12,70	2,11	10,16	12,27	-0,58	1,01	0,43
Jan–Agt	12,92	89,60	102,52	17,50	78,80	96,30	-4,58	10,80	6,22

Tabel 4.9
Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Triwulan II 2015

Periode	Ekspor		Impor	
	Berat Bersih (kg)	Nilai FOB (US\$)	Berat Bersih (kg)	Nilai CIF (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	2 585 718	1 191 376	472 664 654	246 002 090
Triwulan I	174 680	244 309	114 269 033	62 697 096
Triwulan II	561 014	425 064	129 548 175	64 587 922
Triwulan III	131 620	203 161	109 668 226	56 043 208
Triwulan IV	1 718 404	318 842	119 179 220	62 673 864
2014	516 069	759 928	844 163 741	388 178 457
Triwulan I	85 560	169 269	60 796 853	26 870 252
Triwulan II	161 455	264 660	115 480 643	49 336 490
Triwulan III	82 694	123 665	164 561 686	72 532 308
Triwulan IV	186 360	202 334	503 324 559	239 439 407
2015	241 869	329 855	225 029 106	97 858 429
Triwulan I	39 985	51 936	66 562 915	29 213 209
Triwulan II	160 770	206 334	127 866 410	55 705 088
Juli	16 800	30 377	27 228 655	11 413 546
Agustus	24 314	41 208	3 371 126	1 526 586

V. KEPENDUDUKAN JUNI 2014

1. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang. Penduduk laki-laki sebanyak 126.715,2 ribu orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 125.449,6 ribu orang. Rasio Jenis Kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya diantara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang

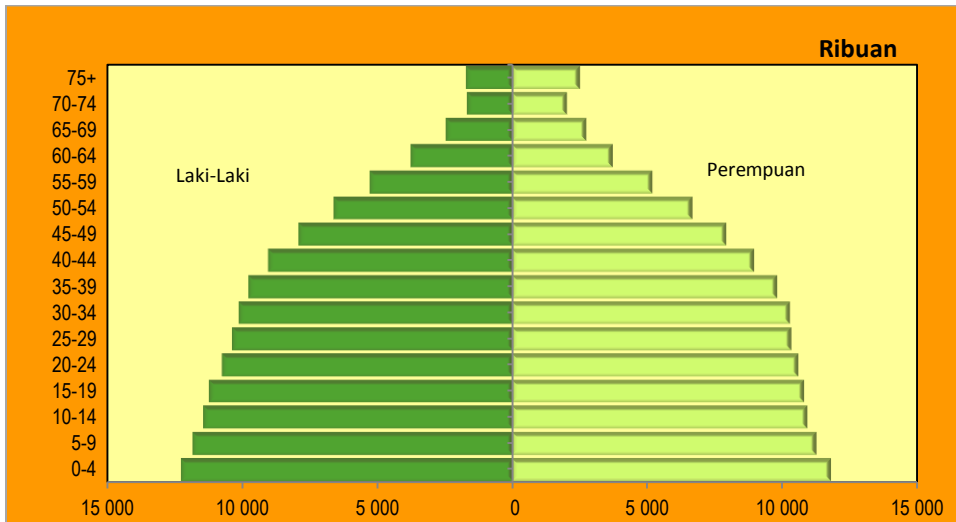
Tabel 5.1
Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014
(ribu orang)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12 301,4	11 785,4	24 086,8
5-9	11 857,3	11 252,2	23 109,5
10-14	11 448,3	10 911,9	22 360,2
15-19	11 237,8	10 786,9	22 024,7
20-24	10 768,5	10 583,9	21 352,4
25-29	10 398,2	10 318,1	20 716,3
30-34	10 150,2	10 280,7	20 430,9
35-39	9 802,6	9 784,5	19 587,1
40-44	9 054,2	8 950,5	18 004,7
45-49	7 949,2	7 918,2	15 867,4
50-54	6 650,6	6 663,1	13 313,7
55-59	5 319,6	5 198,5	10 518,1
60-64	3 804,7	3 714,1	7 518,8
65-69	2 500,2	2 753,2	5 253,4
70-74	1 715,0	2 042,0	3 757,0
75+	1 757,4	2 506,4	4 263,8
Total	126 715,2	125 449,6	252 164,8

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

2. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2014 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Grafik 5.1 menunjukkan piramida yang masih lebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah, sedangkan pada bagian atas meruncing.

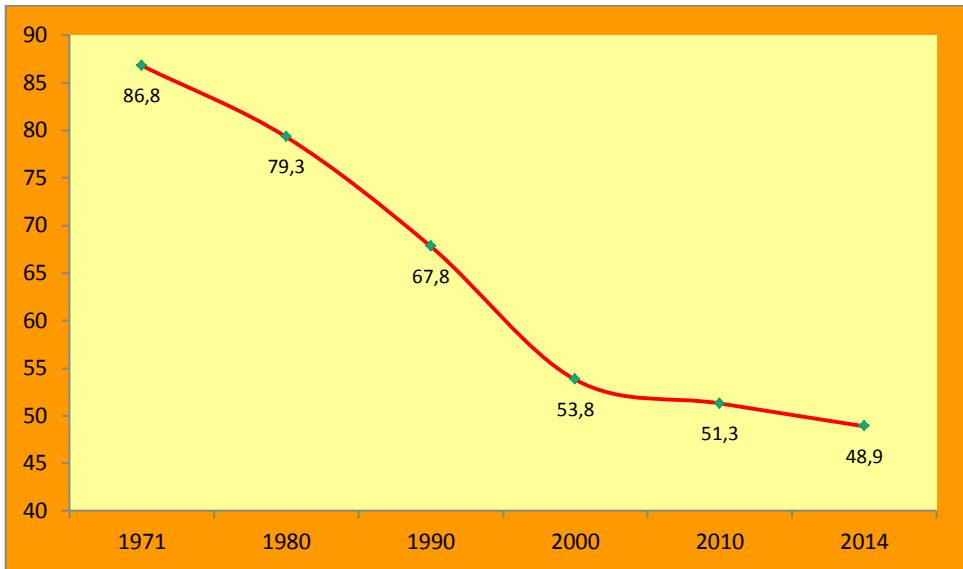
Grafik 5.1
Piramida Penduduk Indonesia, 2014



Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

3. Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971-2014. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara usia penduduk non produktif (penduduk 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 48,9. Angka ini mengandung makna bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sekitar 48 - 49 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio ketergantungan penduduk Indonesia memiliki tren yang menurun. Jika pada tahun 1971 rasio ketergantungan sebesar 86,8, maka pada tahun 2014 kondisinya semakin membaik dengan rasio ketergantungan sebesar 48,9. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Era bonus demografi akan mencapai puncaknya pada periode 2025-2030. Pulau dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Bali dan Nusa Tenggara (56,0), dan yang terendah Pulau Jawa (46,3). Tiga provinsi dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (67,5), Sulawesi Tenggara (61,0), dan Maluku (60,4). Sedangkan tiga provinsi dengan rasio ketergantungan terendah adalah DKI Jakarta (39,3), Jawa Timur (44,5), dan Yogyakarta (45,1).

Grafik 5.2
Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2014

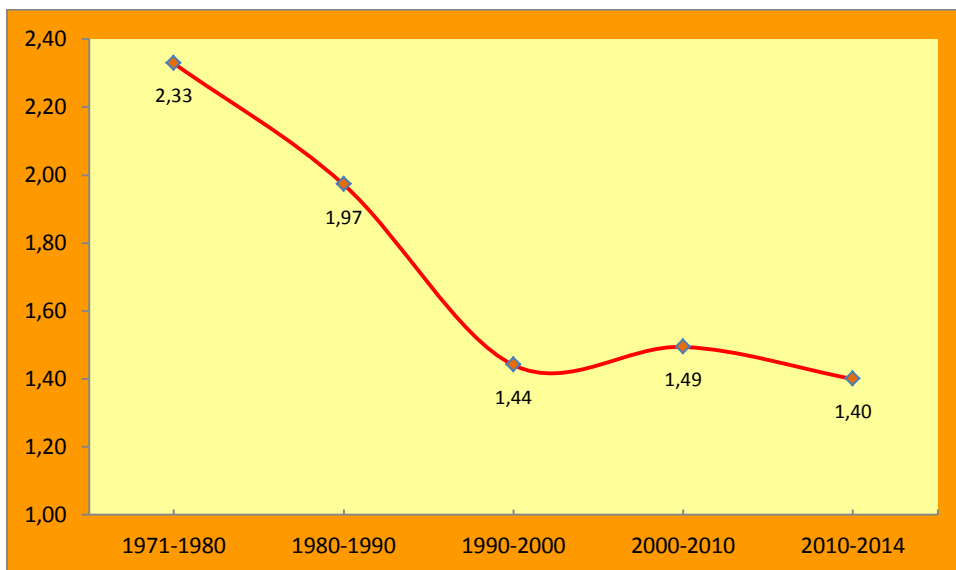


Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan
 Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

4. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010-2014 sebesar 1,40 persen. Dibandingkan dengan periode 1971-1980 (2,33 persen), 1980-1990 (1,97 persen), 1990-2000 (1,44 persen), dan 2000-2010 (1,49 persen), maka laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2014 menunjukkan penurunan.
5. Pulau dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kalimantan, yaitu sebesar 2,09 persen. Lima pulau lainnya secara berurutan Maluku dan Papua (2,07 persen), Sumatera (1,70 persen), Bali dan Nusa Tenggara (1,46 persen), Sulawesi (1,45 persen) serta Jawa (1,17 persen). Menurut provinsi, empat provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Provinsi Kepulauan Riau (3,16 persen), Papua Barat (2,65 persen), Riau (2,64 persen) dan Kalimantan Timur (2,64 persen). Tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Provinsi Jawa Timur (0,69 persen), Jawa Tengah (0,82 persen) dan DKI Jakarta (1,11 persen).

**Laju pertumbuhan
 penduduk Indonesia
 pada tahun 2010-2014
 sebesar 1,40 persen**

Grafik 5.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971-2014



Sumber : SP1971, SP1980, SP1990, SP2000, SP2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

6. Penduduk Indonesia sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56,9 persen. Kemudian, secara berturut-turut diikuti Pulau Sumatera (21,6 persen), Sulawesi (7,3 persen), Kalimantan (6,0 persen), Bali dan Nusa Tenggara (5,5 persen) serta Maluku dan Papua (2,7 persen). Menurut provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan proporsi penduduk terbesar yaitu masing-masing 18,3 persen; 15,3 persen; dan 13,3 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan provinsi dengan proporsi penduduk terendah adalah Papua Barat, Gorontalo dan Maluku Utara yaitu masing-masing 0,3 persen; 0,4 persen dan 0,5 persen.
7. Kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 132 jiwa per km². Pulau Jawa merupakan pulau yang terpadat penduduknya (1.109 per km²), kemudian secara berurutan Pulau Bali dan Nusa Tenggara (190 per km²), Sumatera (113 per km²), Sulawesi (98 per km²), Kalimantan (28 per km²), dan yang paling jarang penduduknya adalah Kepulauan Maluku dan Papua (14 per km²). Kepadatan penduduk menurut provinsi, terpadat di DKI Jakarta (15.173 per km²), Jawa Barat (1.301 per km²) dan Banten (1.211 per

**Kepadatan penduduk
 Indonesia pada tahun
 2014 sebesar 132 jiwa
 per km²**

- km²). Sedangkan tiga provinsi yang terjarang, yaitu Papua Barat (9 per km²), Papua (10 per km²) dan Kalimantan Tengah (16 per km²).
8. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua yaitu sebesar 108,0 sedangkan yang terendah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 97,7. Tiga provinsi dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu Papua (111,9), Papua Barat (111,5) dan Kalimantan Timur (110,8) sedangkan yang terendah Nusa Tenggara Barat (94,2), Sulawesi Selatan (95,4) dan Jawa Timur (97,4).
 9. Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, lansia di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 8,2 persen. Penduduk lansia terbesar terdapat di Pulau Jawa (9,4 persen), kemudian berturut-turut Bali dan Nusa Tenggara (8,3 persen), Sulawesi (7,9 persen), Sumatera (6,5 persen), Kalimantan (5,8 persen) serta Maluku dan Papua (4,2 persen). Menurut provinsi, tiga provinsi dengan penduduk lansia terbesar adalah Yogyakarta (13,2 persen), Jawa Tengah (11,4 persen) dan Jawa Timur (11,2 persen), sedangkan yang terkecil adalah Papua (2,7 persen), Papua Barat (3,8 persen) dan Kepulauan Riau (3,8 persen).
 10. Umur Harapan Hidup adalah kemungkinan umur yang akan dicapai seseorang dari sejak lahir. Hasil proyeksi penduduk tahun 2014 menunjukkan umur harapan hidup penduduk Indonesia sebesar 70,6 tahun. Tiga provinsi dengan umur harapan hidup tertinggi adalah Yogyakarta (74,5 tahun), Kalimantan Timur (73,7 tahun) dan Jawa Tengah (73,5 tahun). Sedangkan tiga provinsi dengan umur harapan hidup terendah adalah Sulawesi Barat (63,6 tahun), Papua (64,9 tahun) dan Nusa Tenggara Barat (65,1 tahun).

**Hasil proyeksi tahun
2014 menunjukkan
umur harapan hidup
penduduk Indonesia
sebesar 70,6 tahun**

Tabel 5.2
Demografi Penduduk Indonesia, 2014

Provinsi	Penduduk (000)		Laju Pertumbuh- an Penduduk 2010-2014 (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin	Rasio Ketergan- tungan	Penduduk Lansia (%)	Umur Harapan Hidup
	2010	2014	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Aceh	4 523	4 907	2,06	85	99,7	54,9	6,1	69,6
02. Sumatera Utara	13 029	13 767	1,39	189	99,6	56,6	6,5	68,2
03. Sumatera Barat	4 865	5 132	1,34	122	98,8	55,9	8,6	68,4
04. Riau	5 575	6 188	2,64	71	105,6	52,0	4,6	70,8
05. Kepulauan Riau	1 693	1 917	3,16	234	104,6	49,4	3,8	69,3
06. Jambi	3 108	3 344	1,85	67	104,2	47,9	6,2	70,5
07. Sumatera Selatan	7 482	7 942	1,50	87	103,3	49,9	6,8	69,0
08.Kep. Bangka Belitung	1 230	1 344	2,23	82	108,0	46,4	6,5	69,8
09. Bengkulu	1 722	1 845	1,74	93	104,1	48,4	6,3	68,5
10. Lampung	7 634	8 026	1,26	232	105,3	49,8	7,6	69,8
Sumatera	50 860	54 412	1,70	113	102,4	52,5	6,5	
11. DKI Jakarta	9 640	10 075	1,11	15 173	101,3	39,3	6,2	72,1
12. Jawa Barat	43 227	46 030	1,58	1 301	102,9	48,0	7,8	72,4
13. Banten	10 689	11 705	2,30	1 211	104,1	46,7	5,1	69,2
14. Jawa Tengah	32 444	33 523	0,82	1 022	98,4	48,4	11,4	73,5
15. Yogyakarta	3 468	3 637	1,20	1 161	97,7	45,1	13,2	74,5
16. Jawa Timur	37 566	38 610	0,69	808	97,4	44,5	11,2	70,5
Jawa	137 033	143 580	1,17	1 109	100,2	46,3	9,4	
17. Bali	3 907	4 105	1,24	710	101,4	46,0	10,1	71,3
18. Nusa Tenggara Barat	4 516	4 774	1,40	257	94,2	54,1	7,5	65,1
19. Nusa Tenggara Timur	4 706	5 037	1,71	103	98,2	67,5	7,4	66,0
Bali dan Nusa Tenggara	13 130	13 916	1,46	190	97,7	56,0	8,3	
20. Kalimantan Barat	4 411	4 716	1,68	32	103,9	51,1	6,6	69,9
21. Kalimantan Tengah	2 221	2 440	2,38	16	109,2	46,9	5,0	67,6
22. Kalimantan Selatan	3 643	3 923	1,87	101	102,7	48,8	6,3	67,6
23. Kalimantan Timur	3 576	3 970	2,64	19	110,8	46,7	4,9	73,7
Kalimantan	13 851	15 048	2,09	28	106,2	48,6	5,8	
24. Sulawesi Utara	2 278	2 387	1,17	172	104,2	46,7	9,4	71,0
25. Gorontalo	1 045	1 116	1,65	99	100,4	49,0	6,8	67,1
26. Sulawesi Tengah	2 646	2 831	1,71	46	104,5	50,7	7,1	67,3
27. Sulawesi Selatan	8 060	8 432	1,13	180	95,4	53,5	8,7	69,7
28. Sulawesi Barat	1 165	1 258	1,95	75	100,6	56,7	6,3	63,6
29. Sulawesi Tenggara	2 244	2 448	2,20	64	100,9	61,0	6,2	70,5
Sulawesi	17 437	18 472	1,45	98	99,2	53,0	7,9	
30. Maluku	1 542	1 657	1,82	35	101,8	60,4	6,5	65,1
31. Maluku Utara	1 043	1 139	2,21	36	104,3	59,2	5,3	67,4
32. Papua	2 857	3 091	1,99	10	111,9	48,5	2,7	64,9
33. Papua Barat	765	850	2,65	9	111,5	50,5	3,8	65,2
Maluku dan Papua	6 208	6 737	2,07	14	108,0	53,3	4,2	
Indonesia	238 519	252 165	1,40	132	101,0	48,9	8,2	70,6

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

VI. KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2015

A. Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2015

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2015 sebesar 5,81 persen menurun dibanding TPT Agustus 2014 (5,94 persen), dan meningkat dibandingkan TPT Februari 2014 (5,70 persen).

Jumlah penganggur Februari 2015 sebanyak 7,45 juta orang

Tabel 6.1
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2013–2015
(juta orang)

Jenis kegiatan	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja	123,17	120,17	125,32	121,87	128,30
Bekerja	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85
Penganggur	7,24	7,41	7,15	7,24	7,45
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,15	66,77	69,17	66,60	69,50
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,88	6,17	5,70	5,94	5,81
4. Pekerja tidak penuh	36,39	37,74	36,97	35,77	35,68
Setengah penganggur	13,68	11,00	10,57	9,68	10,04
Paruh waktu	22,71	26,74	26,40	26,09	25,64
Bekerja di bawah 15 jam perminggu	7,21	8,85	7,28	6,69	7,54

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

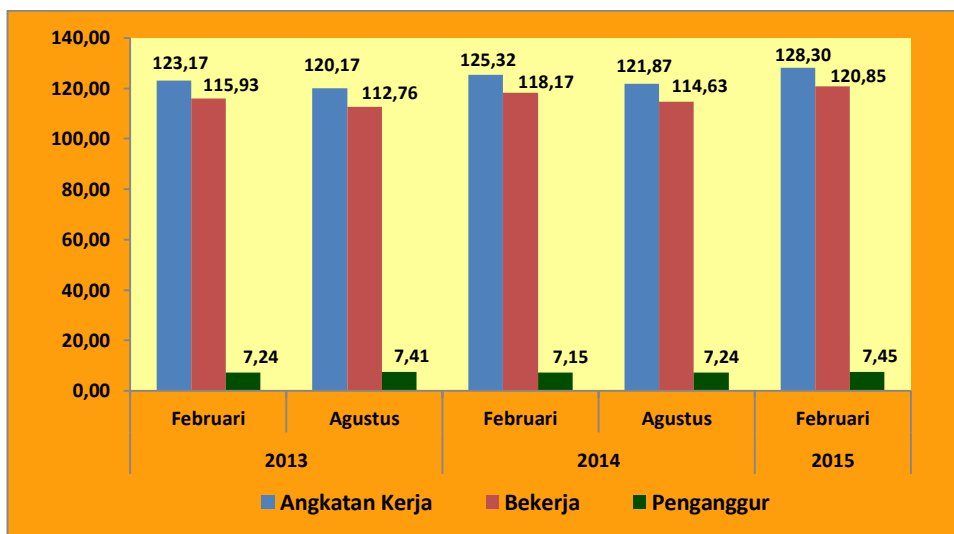
²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia pada Februari 2015 sebesar 69,50 persen mengalami kenaikan sebesar 2,90 persen jika dibandingkan dengan TPAK Agustus 2014 sebesar 66,60 persen.
3. Pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) pada Februari 2015 sebanyak 35,68 juta orang (29,52 persen) mengalami penurunan dibanding Agustus 2014 sebanyak 35,77 juta orang (31,20 persen).
4. Penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Februari 2015 mencapai 7,54 juta orang (6,24 persen), mengalami kenaikan jika dibandingkan Agustus 2014 sebanyak 6,69 juta orang (5,84 persen).
5. Pada Februari 2015 terdapat 10,04 juta orang (8,31 persen) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

B. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

1. Jumlah kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang, bertambah sebanyak 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014 atau bertambah sebanyak 3,0 juta orang dibanding Februari 2014.

Grafik 6.1
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur
2013–2015 (juta orang)



2. Jumlah Penduduk yang bekerja pada Februari 2015 sebanyak 120,8 juta orang, bertambah 6,2 juta orang dibanding keadaan Agustus 2014 atau bertambah 2,7 juta orang dibanding keadaan Februari 2014.
3. Pada Februari 2015, jumlah pengangguran mencapai 7,45 juta orang, mengalami sedikit peningkatan yaitu sebanyak 210 ribu orang dibanding Agustus 2014, dan bertambah sebanyak 300 ribu orang jika dibanding Februari 2014.

C. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

1. Komposisi lapangan pekerjaan hingga Februari 2015 tidak mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, penduduk bekerja meningkat terutama pada Sektor Industri sebanyak 1,0 juta orang (6,43 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang (5,03 persen), dan Sektor Perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,25 persen). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian sebanyak 710 ribu orang (1,74 persen), Sektor Lainnya sebanyak 200 ribu orang (10,36 persen), dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebanyak 140 ribu orang (2,63 persen).

Tabel 6.2
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
2013–2015 (juta orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	40,76	39,22	40,83	38,97	40,12
2. Industri	15,00	14,96	15,39	15,26	16,38
3. Konstruksi	6,95	6,35	7,21	7,28	7,72
4. Perdagangan	25,27	24,10	25,81	24,83	26,65
5. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,29	5,10	5,33	5,11	5,19
6. Keuangan	3,05	2,90	3,19	3,03	3,65
7. Jasa Kemasyarakatan	17,79	18,45	18,48	18,42	19,41
8. Lainnya ³⁾	1,82	1,68	1,93	1,73	1,73
Jumlah	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

³⁾ Lapangan pekerjaan utama pada Sektor Lainnya terdiri dari: Sektor Pertambangan dan Sektor Listrik, Gas, dan Air

D. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

1. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Februari 2015 sebanyak 50,8 juta orang (42,06 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 70,0 juta orang (57,94 persen) bekerja pada kegiatan informal.
2. Dalam setahun terakhir (Februari 2014–Februari 2015), penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap bertambah 70 ribu orang dan penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan bertambah sebanyak 3,3 juta orang. Keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sekitar 3,3 juta orang dan persentase pekerja formal naik dari 40,19 persen pada Februari 2014 menjadi 42,06 persen pada Februari 2015.
3. Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Februari 2014–Februari 2015), pekerja informal berkurang sebanyak 660 ribu orang, dan persentase pekerja informal berkurang dari 59,81 persen pada Februari 2014 menjadi 57,94 persen pada Februari 2015. Penurunan tersebut berasal dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Tabel 6.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
2013–2015 (juta orang)

Status Pekerjaan Utama	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Berusaha sendiri	19,50	19,21	20,32	20,49	21,65
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	19,94	19,34	19,74	19,27	18,80
3. Berusaha dibantu buruh tetap	4,13	3,86	4,14	4,18	4,21
4. Buruh/Karyawan	42,05	41,12	43,35	42,38	46,62
5. Pekerja bebas di pertanian	5,10	5,20	4,74	5,09	5,08
6. Pekerja bebas di nonpertanian	6,46	6,06	6,75	6,41	6,80
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	18,75	17,97	19,13	16,81	17,69
Jumlah	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

E. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2015 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 54,6 juta orang (45,19 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,5 juta (17,77 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 13,1 juta orang mencakup 3,1 juta orang (2,60 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 10,0 juta orang (8,29 persen) berpendidikan Universitas.

Tabel 6.4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (juta orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	55,95	53,81	55,31	53,96	54,61
2. Sekolah Menengah Pertama	20,37	20,56	21,06	20,35	21,47
3. Sekolah Menengah Atas	17,97	17,88	18,91	18,58	19,81
4. Sekolah Menengah Kejuruan	10,34	9,97	10,91	10,52	11,80
5. Diploma I/II/III	3,25	2,93	3,13	2,96	3,14
6. Universitas	8,05	7,61	8,85	8,26	10,02
Jumlah	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

2. Perbaikan kualitas penduduk yang bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah menurun dari sebanyak 76,4 juta orang (64,63

persen) pada Februari 2014 menjadi 76,1 juta orang (62,96 persen) pada Februari 2015. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 12,0 juta orang (10,14 persen) pada Februari 2014 menjadi 13,1 juta orang (10,89 persen) pada Februari 2015.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan

1. Jumlah pengangguran pada Februari 2015 mencapai 7,4 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, dimana TPT pada Agustus 2014 sebesar 5,94 persen turun menjadi 5,81 persen pada Februari 2015.
2. Pada Februari 2015, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,05 persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 8,17 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 3,61 persen.
3. Jika dibandingkan keadaan Agustus 2014, TPT yang mengalami peningkatan yaitu pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III, dan SD ke bawah.

Tabel 6.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	3,55	3,44	3,69	3,04	3,61
2. Sekolah Menengah Pertama	8,21	7,59	7,44	7,15	7,14
3. Sekolah Menengah Atas	9,45	9,72	9,10	9,55	8,17
4. Sekolah Menengah Kejuruan	7,72	11,21	7,21	11,24	9,05
5. Diploma I/II/III	5,72	5,95	5,87	6,14	7,49
6. Universitas	5,02	5,39	4,31	5,65	5,34
Jumlah	5,88	6,17	5,70	5,94	5,81

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

G. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi

1. Pada Februari 2015, TPT tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara masing-masing sebesar 9,05 persen dan 8,69 persen sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Barat masing-masing sebesar 1,37 persen dan 1,81 persen.
2. Dibanding Agustus 2014, penurunan terbesar untuk persentase tingkat pengangguran

terjadi di Provinsi Maluku dengan tingkat penurunan sebesar 3,79 persen, sedangkan yang mengalami peningkatan terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dengan peningkatan sebesar 2,36 persen.

Tabel 6.6
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi
2014–2015

Provinsi	2014				2015	
	Februari		Agustus		Februari	
	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	146,7	6,75	191,5	9,02	174,7	7,73
Sumatera Utara	402,4	5,95	390,7	6,23	421,2	6,39
Sumatera Barat	158,2	6,32	151,7	6,50	148,7	5,99
Riau	139,8	4,99	176,8	6,56	199,8	6,72
Jambi	39,3	2,50	79,8	5,08	46,2	2,73
Sumatera Selatan	154,5	3,84	192,9	4,96	202,2	5,03
Bengkulu	15,7	1,62	31,3	3,47	31,3	3,21
Lampung	204,8	5,08	184,8	4,79	139,5	3,44
Kep. Bangka Belitung	17,1	2,67	32,7	5,14	23,2	3,35
Kepulauan Riau	46,9	5,26	58,8	6,69	81,0	9,05
DKI Jakarta	510,4	9,84	429,1	8,47	463,9	8,36
Jawa Barat	1 843,6	8,66	1 775,2	8,45	1 875,9	8,40
Jawa Tengah	965,4	5,45	996,3	5,68	970,6	5,31
DI Yogyakarta	44,0	2,16	67,4	3,33	85,5	4,07
Jawa Timur	832,4	4,02	843,5	4,19	892,0	4,31
Banten	541,0	9,87	484,1	9,07	488,9	8,58
Bali	33,0	1,37	44,1	1,90	33,6	1,37
Nusa Tenggara Barat	123,8	5,30	127,7	5,75	120,1	4,98
Nusa Tenggara Timur	46,9	1,97	73,2	3,26	75,1	3,12
Kalimantan Barat	59,9	2,53	93,7	4,04	113,2	4,78
Kalimantan Tengah	33,8	2,71	38,7	3,24	40,4	3,14
Kalimantan Selatan	81,3	4,03	73,8	3,80	100,0	4,83
Kalimantan Timur	171,1	8,89	133,7	7,38	118,2	7,17
Kalimantan Utara	-	-	-	-	16,6	5,79
Sulawesi Utara	84,2	7,27	80,0	7,54	102,6	8,69
Sulawesi Tengah	41,7	2,92	49,4	3,68	42,6	2,99
Sulawesi Selatan	212,9	5,79	188,8	5,08	218,3	5,81
Sulawesi Tenggara	24,2	2,13	48,1	4,43	42,3	3,62
Gorontalo	12,7	2,44	20,9	4,18	16,3	3,06
Sulawesi Barat	9,6	1,60	12,6	2,08	11,7	1,81
Maluku	48,0	6,59	70,7	10,51	47,8	6,72
Maluku Utara	27,9	5,65	25,5	5,29	28,8	5,56
Papua Barat	15,1	3,70	20,0	5,02	18,8	4,61
Papua	58,8	3,48	57,7	3,44	63,6	3,72
Indonesia	7 147,1	5,70	7 244,9	5,94	7 454,8	5,81

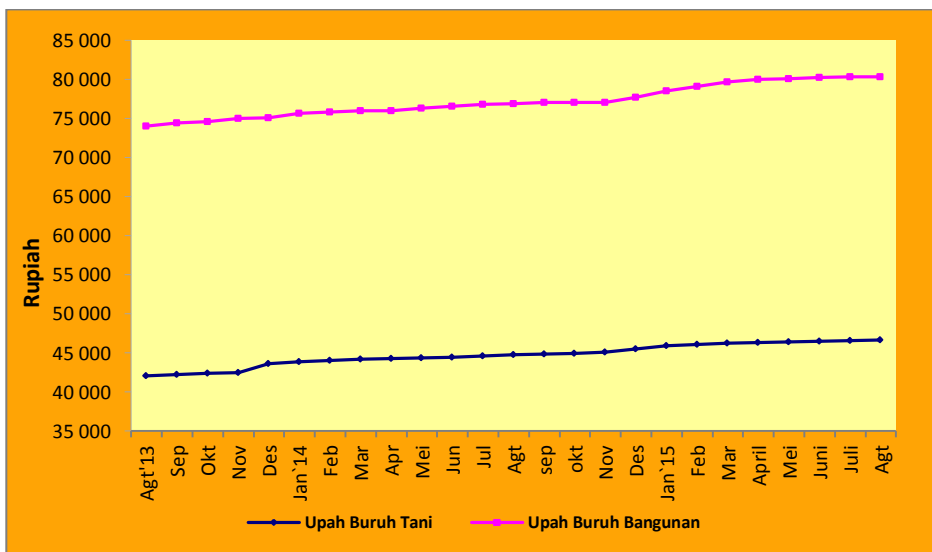
VII. UPAH BURUH AGUSTUS 2015

1. Upah Harian Buruh Tani

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Agustus 2015 naik sebesar 0,12 persen dibanding upah buruh tani bulan sebelumnya, yaitu dari Rp46.572,00 menjadi Rp46.629,00. Secara riil turun sebesar 0,34 persen, yaitu dari Rp37.887,00 menjadi Rp37.757,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Agustus 2015 sebesar Rp46.629,00, naik 0,12 persen

Grafik 7.1
Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan Agustus 2013–Agustus 2015



2. Upah Buruh Bangunan

Pada Agustus 2015, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) naik sebesar 0,06 persen dibanding upah nominal Juli 2015, yaitu dari Rp80.293,00 menjadi Rp80.342,00, sedangkan upah riil turun sebesar 0,33 persen, yaitu dari Rp66.216,00 menjadi Rp66.000,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan pada periode Agustus 2015 sebesar Rp80.342,00 naik 0,06 persen

Tabel 7.1
Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah)
Agustus 2013–Agustus 2015

Bulan	Upah Buruh Tani (harian)		Upah Buruh Bangunan (harian)	
	Nominal	Riil ¹⁾	Nominal	Riil ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Agustus 2013	42 041	26 927	73 972	50 579
September	42 217	27 017	74 414	51 059
Oktober	42 322	27 002	74 569	51 120
November	42 480	27 065	75 006	51 360
Desember	43 562	39 618	75 055	68 344
Januari 2014	43 808	39 383	75 629	68 140
Februari	43 992	39 372	75 772	68 091
Maret	44 125	39 416	75 961	68 206
April	44 212	39 514	75 987	68 242
Mei	44 314	39 516	76 326	68 436
Juni	44 430	39 330	76 535	68 328
Juli	44 569	39 134	76 756	67 896
Agustus	44 717	39 119	76 854	67 665
September	44 833	39 045	76 991	67 601
Oktober	44 924	38 955	77 011	67 305
November	45 026	38 466	77 056	66 348
Desember	45 491	37 839	77 682	65 279
Januari 2015	45 846	38 144	78 484	66 114
Februari	46 059	38 605	79 083	66 861
Maret	46 180	38 522	79 657	67 233
April	46 306	38 546	79 970	67 253
Mei	46 386	38 383	80 087	67 019
Juni	46 458	38 130	80 237	66 786
Juli	46 572	37 887	80 293	66 216
Agustus	46 629	37 757	80 342	66 000

Catatan: ¹⁾ Upah riil = upah nominal/indeks konsumsi rumah tangga pedesaan, mulai Desember 2013 menggunakan tahun dasar (2012=100)

²⁾ Upah riil = upah nominal/IHK umum perkotaan menggunakan tahun dasar (2012=100)

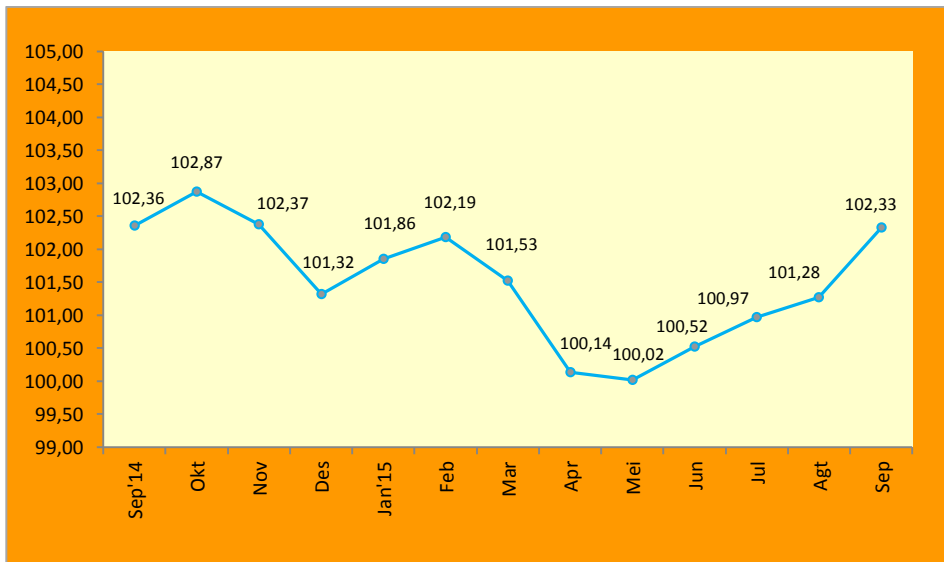
VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN SEPTEMBER 2015

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

1. NTP September 2015 tercatat 102,33 atau naik sebesar 1,04 persen dibanding NTP Agustus 2015 sebesar 101,28. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di empat subsektor yaitu Tanaman Pangan sebesar 2,51 persen, Tanaman Hortikultura 0,20 persen, Peternakan 1,26 persen, dan Perikanan 0,07 persen, sebaliknya Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun sebesar 0,44 persen.

NTP Agustus 2015 naik sebesar 0,31 persen

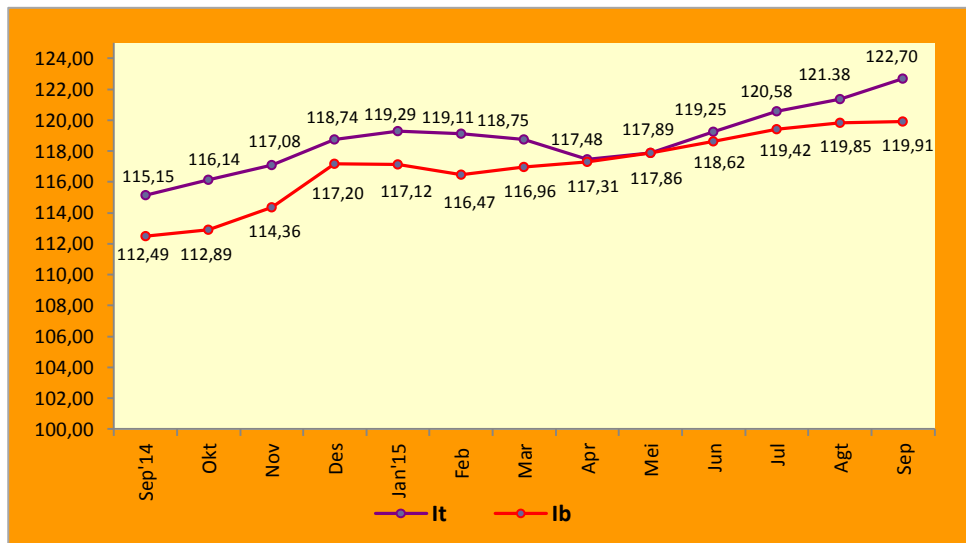
Grafik 8.1
Nilai Tukar Petani (NTP), September 2014–September 2015 (2012=100)



2. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada September 2015 naik 1,09 persen bila dibanding It pada Agustus 2015, yaitu dari 121,38 menjadi 122,70. Kenaikan indeks tersebut disebabkan naiknya It di empat subsektor, yaitu Tanaman Pangan (2,48 persen), Tanaman Hortikultura (0,23 persen), Peternakan (1,42 persen), dan Perikanan (0,22 persen). Sebaliknya, Tanaman Perkebunan Rakyat turun sebesar 0,39 persen.
3. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) pada September 2015 naik sebesar 0,05 persen

dibanding Ib Agustus 2015. Kenaikan indeks ini disebabkan turunnya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,02 persen, sedangkan indeks kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal naik sebesar 0,22 persen.

Grafik 8.2
Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
September 2014–September 2015 (2012=100)



4. NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada September 2015 naik sebesar 2,51 persen dibanding NTPP Agustus 2015. Kenaikan NTPP disebabkan It Tanaman Pangan naik (2,48 persen), sebaliknya Ib Tanaman Pangan turun (0,02 persen). NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) naik sebesar 0,20 persen. Hal ini disebabkan It Tanaman Hortikultura naik (0,23 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Hortikultura (0,03 persen). NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) turun (0,44 persen). Hal ini disebabkan It Tanaman Perkebunan rakyat turun (0,39 persen), sebaliknya Ib Tanaman Perkebunan Rakyat naik (0,04 persen). NTP Peternakan (NTPT) naik 1,26 persen disebabkan It Peternakan naik (1,42 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Peternakan (0,16 persen). NTP Perikanan (NTNP) naik 0,07 persen disebabkan It Perikanan naik (0,22 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Perikanan (0,14 persen).

Tabel 8.1
Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)

Subsektor	Agustus 2015	September 2015	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gabungan/Nasional			
a. Nilai tukar petani (NTP)	101,28	102,33	1,04
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	121,38	122,70	1,09
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	119,85	119,91	0,05
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,50	123,47	-0,02
- Indeks BPPBM	112,68	112,93	0,22
Gabungan/Nasional tanpa Perikanan			
a. Nilai tukar petani (NTP)	101,20	102,28	1,07
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	121,28	122,64	1,12
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	119,85	119,90	0,05
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,49	123,46	-0,03
- Indeks BPPBM	112,62	112,87	0,22
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai tukar petani (NTPP)	98,98	101,46	2,51
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	120,67	123,67	2,48
- Padi	119,44	122,82	2,83
- Palawija	123,85	125,73	1,52
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	121,92	121,90	-0,02
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,91	123,77	-0,11
- Indeks BPPBM	115,71	116,02	0,27
2. Tanaman Hortikultura			
a. Nilai tukar petani (NTPH)	101,59	101,80	0,20
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	122,70	122,99	0,23
- Sayur-sayuran	121,57	121,43	-0,11
- Buah-buahan	123,61	124,44	0,67
- Tanaman Obat	117,64	117,93	0,25
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	120,78	120,82	0,03
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,48	123,47	0,00
- Indeks BPPBM	112,63	112,77	0,12
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai tukar petani (NTPR)	96,68	96,26	-0,44
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	116,23	115,77	-0,39
- Tanaman Perkebunan Rakyat	116,23	115,77	-0,39
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	120,22	120,28	0,04
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	122,89	122,90	0,01
- Indeks BPPBM	111,98	112,19	0,18

Subsektor	Agustus 2015	September 2015	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Peternakan			
a. Nilai tukar petani (NTPT)	108,78	110,16	1,26
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	126,07	127,86	1,42
- Ternak Besar	127,73	130,46	2,14
- Ternak Kecil	123,85	126,16	1,86
- Unggas	123,96	123,71	-0,20
- Hasil Ternak	121,35	120,86	-0,40
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	115,89	116,07	0,16
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,57	123,60	0,03
- Indeks BPPBM	109,10	109,39	0,27
5. Perikanan			
a. Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan (NTNP)	102,70	102,77	0,07
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan pembudidaya ikan (It)	123,05	123,32	0,22
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan pembudidaya ikan (Ib)	119,82	119,99	0,14
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	123,43	123,56	0,11
- Indeks BPPBM	113,73	113,95	0,20
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai tukar nelayan (NTN)	106,89	106,60	-0,27
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	129,05	128,93	-0,09
- Penangkapan Perairan Umum	126,53	127,19	0,53
- Penangkapan Laut	129,19	129,04	-0,12
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	120,73	120,95	0,18
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	122,64	122,88	0,20
- Indeks BPPBM	117,80	117,97	0,14
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)	99,67	100,01	0,34
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)	118,74	119,28	0,46
- Budidaya Air Tawar	117,64	118,27	0,54
- Budidaya Laut	114,64	114,76	0,11
- Budidaya Air Payau	118,78	119,25	0,40
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	119,13	119,27	0,12
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	124,00	124,06	0,05
- Indeks BPPBM	110,69	110,96	0,24

BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

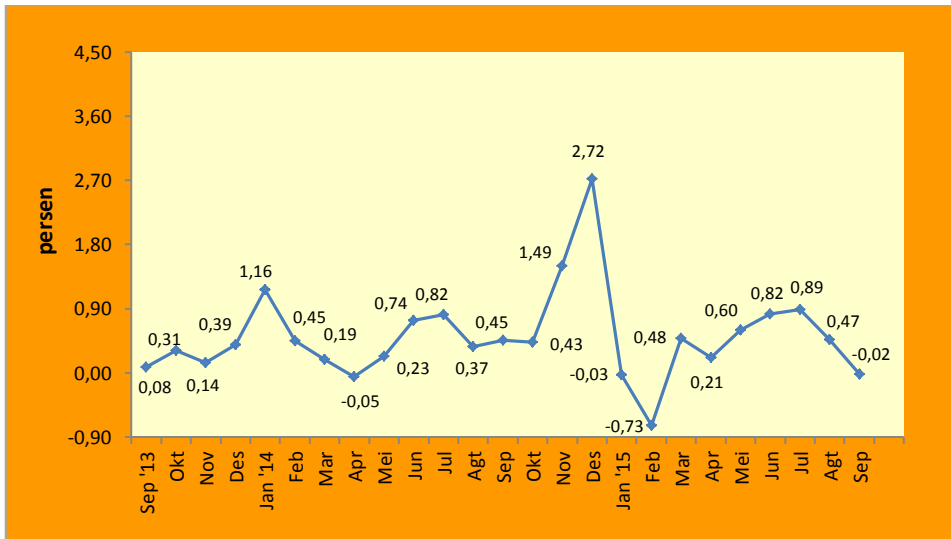
B. Inflasi Perdesaan

1. Pada September 2015 terjadi deflasi perdesaan sebesar 0,02 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 123,47. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 19 provinsi dan deflasi perdesaan di 14 provinsi. Inflasi perdesaan

Pada September 2015 terjadi deflasi perdesaan sebesar 0,02 persen

tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,11 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,06 persen. Deflasi perdesaan terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,84 persen, sedangkan deflasi perdesaan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,01 persen.

Grafik 8.3
Inflasi Perdesaan, September 2013–September 2015



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga pada September 2015, terjadi kenaikan indeks harga di enam kelompok pengeluaran, yaitu: Makanan Jadi 0,26 persen; Perumahan 0,26 persen; Sandang 0,25 persen; Kesehatan 0,26 persen; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,25 persen, serta Transportasi dan Komunikasi sebesar 0,17 persen, sebaliknya Bahan Makanan turun sebesar 0,40 persen.
3. Deflasi perdesaan September 2015 sebesar 0,02 persen dipicu oleh turunnya harga komoditas cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah dan telur ayam ras.
4. Tingkat inflasi perdesaan tahun kalender (September 2015 terhadap Desember 2014) sebesar 2,70 persen dan tingkat inflasi perdesaan *year-on-year* (September 2015 terhadap September 2014) adalah sebesar 7,53 persen.

Tabel 8.2
Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran
September 2013–September 2015

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
September 2013	-0,23	0,47	0,38	0,50	0,36	0,26	0,27	0,08
Oktober	0,31	0,36	0,29	0,26	0,33	0,25	0,26	0,31
November	0,02	0,32	0,31	0,18	0,29	0,08	0,16	0,14
Desember	0,52	0,38	0,33	0,32	0,25	0,04	0,14	0,39
Januari 2014	1,86	0,74	1,10	0,52	0,52	0,25	0,39	1,16
Februari	0,53	0,43	0,51	0,38	0,42	0,22	0,30	0,45
Maret	0,02	0,39	0,35	0,39	0,39	0,21	0,22	0,19
April	-0,48	0,27	0,28	0,21	0,36	0,11	0,09	-0,05
Mei	0,20	0,30	0,31	0,23	0,30	0,11	0,12	0,23
Juni	1,32	0,39	0,33	0,43	0,28	0,19	0,20	0,74
Juli	1,24	0,45	0,41	1,72	0,31	0,81	0,18	0,82
Agustus	0,48	0,36	0,26	0,17	0,33	0,27	0,22	0,37
September	0,48	0,51	0,61	0,08	0,38	0,22	0,33	0,45
Oktober	0,59	0,32	0,47	0,22	0,34	0,25	0,24	0,43
November	1,79	0,47	0,61	0,37	0,59	0,20	4,39	1,49
Desember	3,29	1,10	1,32	1,08	0,80	0,27	7,07	2,72
Januari 2015	0,52	0,88	1,18	0,70	0,83	0,42	-5,22	-0,03
Februari	-1,41	0,44	0,40	0,35	0,48	0,21	-2,68	-0,73
Maret	0,33	0,48	0,46	0,25	0,42	0,13	1,31	0,48
April	-0,68	0,60	0,52	0,38	0,43	0,18	2,24	0,21
Mei	0,97	0,46	0,31	0,38	0,26	0,08	0,30	0,60
Juni	1,35	0,70	0,36	0,53	0,23	0,30	0,15	0,82
Juli	1,52	0,38	0,28	1,65	0,31	0,56	0,24	0,89
Agustus	0,83	0,29	0,15	0,12	0,21	0,42	0,11	0,47
September	-0,40	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,17	-0,02

Tabel 8.3
Tingkat Inflasi Perdesaan September 2015, Tahun Kalender 2015, dan *Year on Year* 2015
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)			Inflasi Perdesaan September 2015	Tingkat Inflasi Perdesaan 2015	
	September 2014	Desember 2014	September 2015		Tahun Kalender	<i>Year-on- Year</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	114,83	120,22	123,47	-0,02	2,70	7,53
1. Bahan Makanan	119,99	126,90	130,75	-0,40	3,03	8,96
2. Makanan Jadi	111,18	113,29	118,47	0,26	4,57	6,56
3. Perumahan	110,89	113,57	118,09	0,26	3,98	6,50
4. Sandang	111,15	113,01	118,30	0,25	4,69	6,44
5. Kesehatan	108,70	110,60	114,45	0,26	3,49	5,29
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	108,67	109,46	112,29	0,25	2,59	3,33
7. Transportasi dan Komunikasi	114,59	128,39	123,85	0,17	-3,54	8,08

C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

1. Pada September 2015 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,87 persen. Hal ini karena terjadi kenaikan It (1,09 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan indeks BPBBM (0,22 persen). Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya empat subsektor penyusun NTUP yaitu Tanaman Pangan (2,21 persen), Tanaman Hortikultura (0,11 persen), Peternakan (1,15 persen), dan Perikanan (0,02 persen). Sebaliknya, NTUP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun sebesar 0,57 persen.
2. Dari 33 provinsi yang dihitung NTUP-nya, 21 provinsi mengalami kenaikan dan 12 provinsi mengalami penurunan. Kenaikan NTUP tertinggi pada September 2015 terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,22 persen, sebaliknya penurunan NTUP terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 1,09 persen.

Tabel 8.4
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya,
September 2015 (2012=100)

Subsektor	Agustus 2015	September 2015	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	104,29	106,60	2,21
2. Tanaman Hortikultura	108,95	109,06	0,11
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	103,79	103,20	-0,57
4. Peternakan	115,55	116,88	1,15
5. Perikanan	108,20	108,22	0,02
a. Tangkap	109,55	109,30	-0,23
b. Budidaya	107,27	107,50	0,22
Nasional	107,72	108,66	0,87

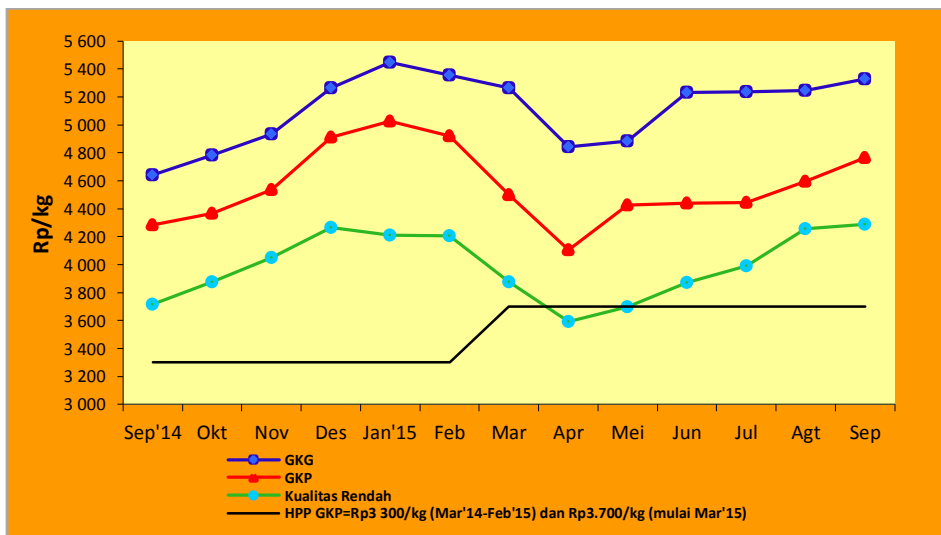
IX. HARGA PANGAN SEPTEMBER 2015

A. Harga Gabah dan Beras di Penggilingan

- Selama September 2015, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di petani naik 3,70 persen menjadi Rp4.764,68 per kg dan di penggilingan naik 3,73 persen menjadi Rp4.851,56 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKP di petani September 2015 sebesar Rp4.764,68 per kg naik 3,70 persen

Grafik 9.1
Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas
September 2014–September 2015



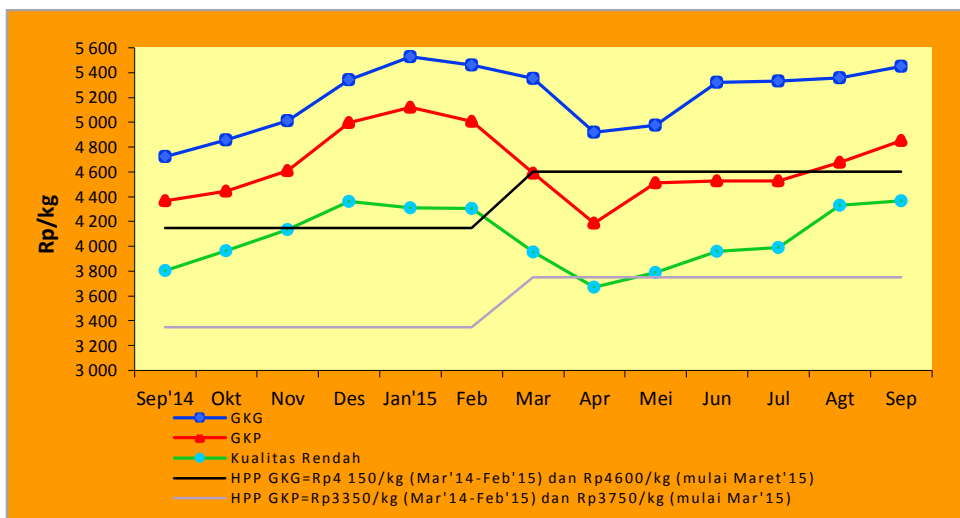
- Pada bulan yang sama, harga tertinggi di tingkat petani senilai Rp7.272,00 per kg dan di tingkat penggilingan Rp7.372,00 per kg. Sedangkan harga terendah di tingkat petani dan penggilingan masing-masing Rp3.100,00 per kg dan Rp3.250,00 per kg. Harga tertinggi di tingkat petani dan penggilingan berasal dari kualitas GKP varietas Pandak yang terjadi di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan). Sementara itu, harga terendah di tingkat petani dan penggilingan berasal dari gabah kualitas rendah varietas Ciharang di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat).

Tabel 9.1
Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, September 2014–September 2015

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah			
	Kadar Air (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubahan (%)	Kadar Air (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubahan (%)	Kadar Air (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubahan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2014 Sep	18,44	4 282,54	2,69	12,48	4 643,25	0,27	25,50	3 717,56	3,25	
Okt	18,49	4 364,75	1,92	12,54	4 782,74	3,00	26,37	3 877,30	4,30	
Nov	18,82	4 535,02	3,90	12,78	4 936,49	3,21	26,33	4 050,71	4,47	
Des	18,03	4 910,51	8,28	12,43	5 264,16	6,64	25,31	4 264,54	5,28	
2015 Jan	17,86	5 027,89	2,39	12,48	5 447,14	3,48	26,03	4 212,30	-1,22	
Feb	18,35	4 922,52	-2,10	12,60	5 357,00	-1,65	27,20	4 206,68	-0,13	
Mar	19,66	4 499,83	-8,59	12,67	5 264,01	-1,74	26,07	3 878,92	-7,79	
Apr	19,32	4 106,73	-8,74	12,61	4 842,69	-8,00	26,35	3 592,24	-7,39	
Mei	18,03	4 428,41	7,83	12,63	4 885,75	0,89	25,56	3 698,64	2,96	
Jun	18,18	4 441,70	0,30	12,69	5 234,51	7,14	25,09	3 872,75	4,71	
Jul	18,53	4 443,74	0,05	12,70	5 237,80	0,06	25,23	3 902,23	0,76	
Agt	18,54	4 594,72	3,40	12,20	5 247,92	0,19	24,91	4 255,91	9,06	
Sep	18,47	4 764,68	3,70	12,56	5 330,12	1,57	25,22	4 287,27	0,74	
Perubahan (%)			11,26				14,79	15,32		
Sep'15 thd Sep'14										

- Rata-rata harga GKG di petani selama September 2015 naik 1,57 persen menjadi Rp5.330,12 per kg, sedangkan di penggilingan naik 1,76 persen menjadi Rp5.449,82 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama bulan lalu. Demikian pula harga gabah kualitas rendah di petani dan penggilingan mengalami kenaikan masing-masing 0,74 persen menjadi Rp4.287,27 per kg dan 0,84 persen menjadi Rp4.365,12 per kg.
- Selama Periode September 2014–September 2015 di tingkat petani, rata-rata harga tertinggi untuk kualitas GKP dan GKG, masing-masing Rp5.027,89 per kg dan Rp5.447,14 per kg terjadi pada Januari 2015, sedangkan untuk gabah kualitas rendah Rp4.287,27 per kg terjadi pada September 2015. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKG Rp4.643,25 terjadi pada September 2014, sedangkan gabah kualitas GKP dan Rendah masing-masing Rp4.106,73 per kg dan Rp3.592,24 per kg terjadi pada April 2015.

Grafik 9.2
Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas
September 2014–September 2015



5. Pada periode September 2014–September 2015, di tingkat penggilingan rata-rata harga tertinggi untuk kualitas GKP dan GKG, masing-masing Rp5.118,31 per kg dan Rp5.528,47 per kg terjadi pada Januari 2015, sedangkan untuk gabah kualitas rendah Rp4.365,12 terjadi pada September 2015. Rata-rata harga terendah pada GKG Rp4.724,66 terjadi pada September 2014, sedangkan gabah kualitas GKP dan Rendah masing-masing Rp4.187,27 per kg dan Rp3.670,00 per kg terjadi pada April 2015.
6. Dibandingkan September 2014, rata-rata harga GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah di tingkat petani pada September 2015 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 11,26 persen, 14,79 persen, dan 15,32 persen. Di tingkat penggilingan rata-rata harga GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah pada September 2015 juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 11,04 persen, 15,35 persen, dan 14,71 persen dibandingkan September 2014.
7. Berdasarkan 1.240 observasi pada transaksi penjualan gabah di 23 provinsi selama September 2015, masih didominasi transaksi penjualan GKP sebanyak 945 observasi (76,21 persen), gabah kualitas rendah sebanyak 158 observasi (12,74 persen), dan GKG sebanyak 137 observasi (11,05 persen). Dari sejumlah observasi tersebut, terdapat 0,63 persen kasus harga GKP di tingkat petani di bawah HPP. Sementara di tingkat penggilingan tidak terdapat kasus harga GKP dan GKG di bawah HPP.

Tabel 9.2
Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, September 2014–September 2015

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014 Sep	18,44	4 369,26	2,82	12,48	4 724,66	0,26	25,50	3 805,19	3,56
Okt	18,49	4 445,98	1,76	12,54	4 857,39	2,81	26,37	3 963,57	4,16
Nov	18,82	4 611,82	3,73	12,78	5 013,64	3,22	26,33	4 135,83	4,35
Des	18,03	4 995,31	8,32	12,43	5 344,22	6,59	25,31	4 362,54	5,48
2015 Jan	17,86	5 118,31	2,46	12,48	5 528,47	3,45	26,03	4 309,61	-1,21
Feb	18,35	5 007,01	-2,17	12,60	5 458,93	-1,26	27,20	4 307,31	-0,05
Mar	19,66	4 590,26	-8,32	12,67	5 352,36	-1,95	26,07	3 953,42	-8,22
Apr	19,32	4 187,27	-8,78	12,61	4 920,26	-8,07	26,35	3 670,00	-7,17
Mei	18,03	4 509,17	7,69	12,63	4 975,63	1,13	25,56	3 791,45	3,31
Jun	18,18	4 524,76	0,35	12,69	5 322,26	6,97	25,09	3 959,60	4,43
Jul	18,53	4 525,24	0,01	12,70	5 331,40	0,17	25,23	3 990,02	0,77
Agt	18,54	4 677,06	3,35	12,20	5 355,69	0,46	24,91	4 328,85	8,49
Sep	18,47	4 851,56	3,73	12,56	5 449,82	1,76	25,22	4 365,12	0,84
Perubahan (%) Sep'15 thd Sep'14			11,04			15,35			14,71

8. Pada September 2015 rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan sebesar Rp9.444,06 per kg naik sebesar 3,48 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan sebesar Rp8.939,61 per kg naik sebesar 2,27 persen. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan sebesar Rp8.906,13 per kg naik sebesar 2,08 persen.

Pada September 2015 rata-rata harga beras Medium di penggilingan sebesar Rp8.939,61 per kg, naik 2,27 persen

9. Dibandingkan dengan September 2014, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada bulan September 2015 untuk kualitas premium naik 13,64 persen, kualitas medium naik 10,01 persen dan kualitas rendah naik 17,85 persen.

Tabel 9.3
Rata-Rata Harga Beras di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (*Broken*), September 2014–September 2015

Tahun/ Bulan	Premium			Medium			Rendah		
	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014 Sep	8 310,51	-0,23	6,86	8 125,93	1,45	15,36	7 557,46	-2,32	23,43
Okt	8 396,86	1,04	6,91	8 126,34	0,01	15,57	7 693,15	1,80	23,38
Nov	8 555,14	1,88	7,16	8 372,84	3,03	15,20	7 962,07	3,50	23,12
Des	9 018,39	5,41	7,21	8 992,57	7,40	15,17	8 412,28	5,65	23,23
2015 Jan	9 242,85	2,49	7,14	9 222,01	2,55	15,46	8 765,83	4,20	23,44
Feb	9 358,23	1,25	7,11	9 252,01	0,33	15,70	8 838,16	0,83	23,60
Mar	9 459,49	1,08	7,12	9 298,25	0,50	15,55	8 855,47	0,20	23,65
Apr	8 794,25	-7,03	7,08	8 597,64	-7,53	15,57	8 250,71	-6,83	23,38
Mei	8 709,81	-0,96	7,22	8 520,39	-0,90	15,62	8 061,39	-2,29	23,25
Jun	8 915,36	2,36	7,55	8 605,95	1,00	15,48	8 120,59	0,73	24,03
Jul	8 945,11	0,33	7,28	8 648,44	0,49	16,00	8 307,52	2,30	23,34
Agt	9 126,78	2,03	7,51	8 741,08	1,07	15,56	8 724,84	5,02	23,55
Sep	9 444,06	3,48	7,48	8 939,61	2,27	15,32	8 906,13	2,08	23,37
Perubahan (%) Sep'15 thd Sep'14		13,64			10,01			17,85	

Keterangan: *Premium: Maksimum beras patah (Broken) s.d. 10%*
Medium: Beras patah (Broken) 10,1% - 20%
Rendah: Beras patah (Broken) 20,1% - 25%

B. Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok

1. Secara nasional, rata-rata harga beras pada September 2015 naik 2,04 persen dibanding Agustus 2015. Dibandingkan September 2014, harga beras naik 13,43 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 6,83 persen. Artinya, pemilik beras (pedagang, petani, konsumen, BULOG, dan industri berbahan baku beras) mengalami kenaikan nilai riil sebesar 6,50 persen. Kenaikan tertinggi terjadi di Bulukumba, Purwokerto, dan Pangkal Pinang masing-masing sebesar 6 persen, serta Manado, Depok, Madiun, Cilacap, Makassar, dan Bima masing-masing sebesar 5 persen.

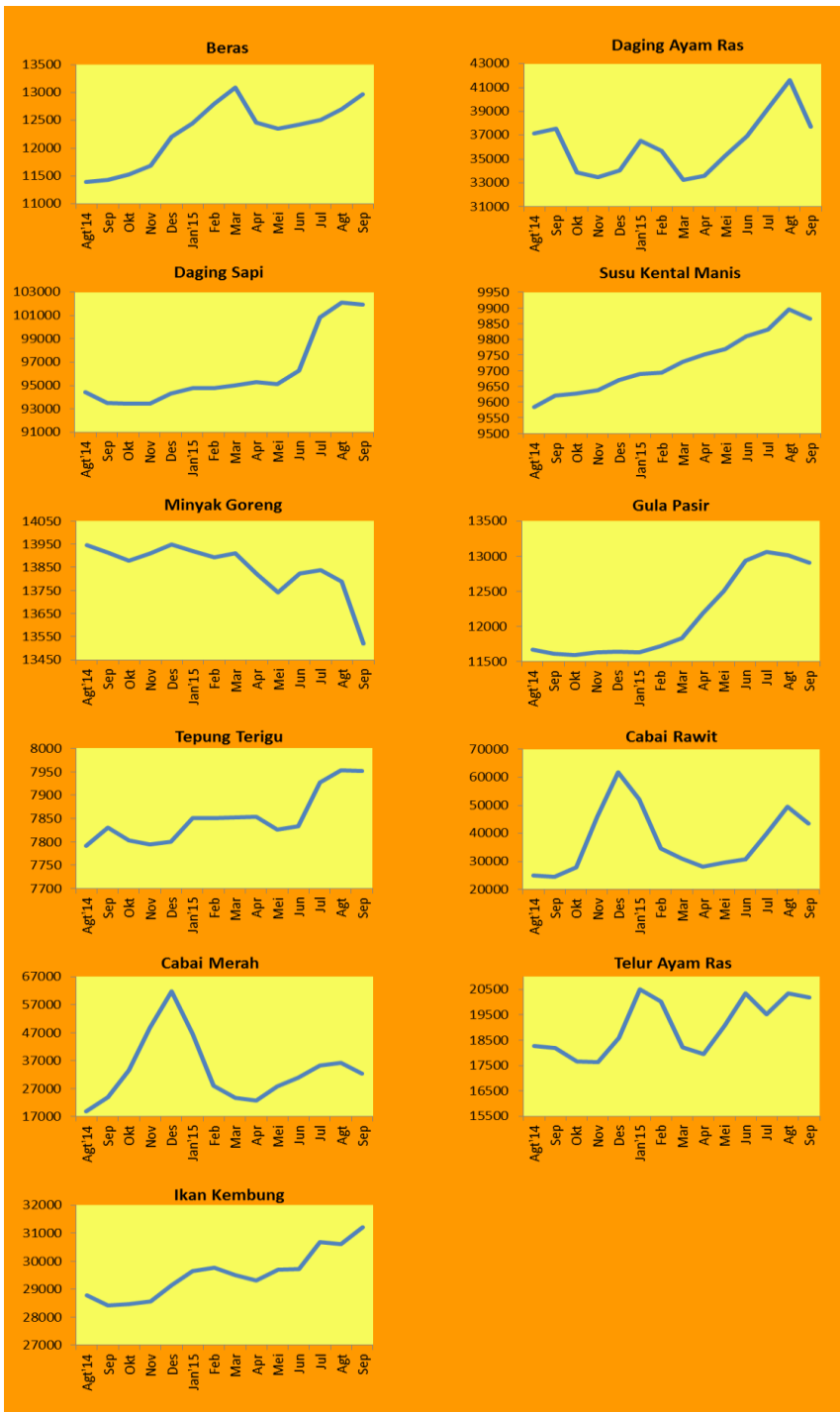
Rata-rata harga beras September 2015 sebesar Rp12.968,00 per kg, naik 2,04 persen

2. Harga ikan kembung naik 1,91 persen dibanding Agustus 2015 atau naik 9,75 persen dibandingkan September 2014. Kenaikan tertinggi terjadi di Tual (37 persen) dan Palangkaraya (22 persen). Harga cabai rawit turun 12,27 persen dibanding Agustus 2015 atau naik 77,38 persen dibanding September 2014. Penurunan tertinggi terjadi di Jambi (53 persen) serta Sumenep, Bima, dan Tasikmalaya masing-masing 41 persen. Harga cabai merah turun 10,98 persen dibanding Agustus 2015 atau naik 35,06 persen dibanding September 2014. Penurunan tertinggi terjadi di Padangsidempuan dan Jambi masing-masing sebesar 40 persen dan Lhokseumawe (38 persen). Harga daging ayam ras turun 9,31 persen dibanding Agustus 2015 atau naik 0,58 persen dibandingkan September 2014. Penurunan tertinggi terjadi di Jambi (25 persen) dan Pematang Siantar (23 persen). Harga minyak goreng turun 1,95 persen dibanding Agustus 2015 atau turun 2,83 persen dibanding September 2014. Penurunan tertinggi terjadi di Sibolga (8 persen), serta Purwokerto dan Tanjung Pinang masing-masing 5 persen.
3. Komoditas lain seperti gula pasir, telur ayam ras, susu kental manis, daging sapi, dan tepung terigu perubahannya relatif rendah.

Tabel 9.4
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
September 2014–September 2015 (rupiah)

Bulan	Beras (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Daging Sapi (kg)	Susu Kental Manis (385 gram)	Minyak Goreng (liter)	Gula Pasir (kg)	Tepung Terigu (kg)	Cabai Rawit (kg)	Cabai Merah (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Ikan Kembung (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
September'14	11 433	37 526	93 501	9 620	13 915	11 608	7 831	24 507	23 948	18 199	28 424
Oktober	11 522	33 905	93 454	9 627	13 879	11 595	7 803	27 803	33 652	17 671	28 458
November	11 691	33 474	93 473	9 639	13 911	11 630	7 794	46 011	48 785	17 636	28 566
Desember	12 210	34 043	94 324	9 670	13 950	11 637	7 800	61 843	61 874	18 599	29 137
Januari'15	12 444	36 515	94 758	9 689	13 919	11 632	7 850	52 134	46 573	20 496	29 650
Februari	12 802	35 682	94 777	9 694	13 895	11 722	7 850	34 539	28 102	20 016	29 760
Maret	13 089	33 231	95 033	9 728	13 910	11 831	7 852	30 947	23 738	18 225	29 510
April	12 458	33 570	95 299	9 752	13 820	12 188	7 854	28 202	22 850	17 964	29 312
Mei	12 348	35 279	95 137	9 770	13 743	12 509	7 826	29 432	27 927	19 065	29 687
Juni	12 425	36 944	96 279	9 809	13 824	12 941	7 834	30 698	30 884	20 350	29 708
Juli	12 509	39 231	100 862	9 831	13 838	13 065	7 927	39 957	35 319	19 512	30 671
Agustus	12 709	41 616	102 143	9 896	13 790	13 013	7 953	49 551	36 333	20 345	30 610
September	12 968	37 742	101 959	9 865	13 521	12 906	7 951	43 471	32 344	20 194	31 195
September'15 thd Agustus'15	2,04	-9,31	-0,18	-0,31	-1,95	-0,82	-0,02	-12,27	-10,98	-0,74	1,91
September'15 thd September'14 (dalam persen)	13,43	0,58	9,05	2,55	-2,83	11,18	1,53	77,38	35,06	10,96	9,75

Grafik 9.3
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
Agustus 2014–September 2015 (rupiah)



X. INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR SEPTEMBER 2015

1. Pada September 2015, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum tanpa impor migas dan ekspor migas turun sebesar 0,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada Kelompok Barang Ekspor Nonmigas, yaitu 1,24 persen dan terkecil pada Sektor Industri sebesar 0,74 persen.

Pada September 2015 IHPB tanpa impor migas dan ekspor migas turun sebesar 0,05 persen

Pada Agustus 2015 IHPB Umum naik sebesar 1,34 persen dibandingkan IHPB Umum bulan sebelumnya. Kenaikan IHPB terbesar terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 6,90 persen, sedangkan yang terendah adalah Kelompok Barang Impor sebesar 0,07 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian naik 0,45 persen, Sektor Industri naik 0,37 persen, dan Kelompok Barang Ekspor naik 1,22 persen.

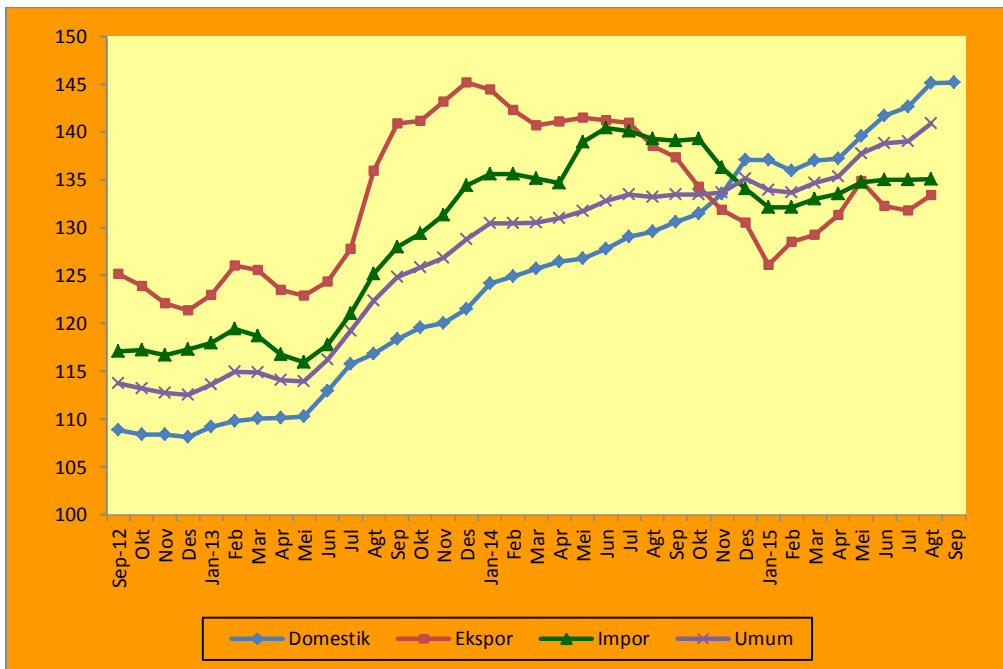
Tabel 10.3
Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (2010=100), Indonesia
Juli–September 2015

Sektor/Kelompok	Juli 2015	Agustus 2015	September 2015	Perubahan	
				Agustus 2015 terhadap Juli 2015 (%)	September 2015 terhadap Agustus 2015 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	240,51	257,10	263,79	6,90	2,60
2. Pertambangan dan Penggalian	118,82	119,36	119,97	0,45	0,51
3. Industri	129,66	130,14	129,18	0,37	-0,74
Domestik	142,64	145,10	145,18	1,72	0,05
4. Impor Nonmigas	130,84	131,40	132,58	0,43	0,90
Impor	135,00	135,10		0,07	
5. Ekspor Nonmigas	137,89	141,13	139,37	2,35	-1,24
Ekspor	131,78	133,38		1,22	
Umum Nonmigas	140,01	142,32	142,25	1,65	-0,05
Umum	139,01	140,88		1,34	

Tabel 10.4
Tingkat Inflasi Perdagangan Besar (2010=100), September 2015

Sektor/Kelompok	IHPB				Perubahan September 2015 terhadap Agustus 2015	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar	
	September 2014	Desember 2014	Agustus 2015	September 2015		Tahun Kalender 2015	Year- on- Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	179,23	216,79	257,10	263,79	2,60	21,68	47,18
2. Pertambangan dan Penggalian	119,16	120,78	119,36	119,97	0,51	-0,67	0,67
3. Industri	124,07	126,25	130,14	129,18	-0,74	2,32	4,12
4. Impor Nonmigas	123,31	125,91	131,40	132,58	0,90	5,30	7,52
5. Ekspor Nonmigas	127,24	133,69	141,13	139,37	-1,24	4,25	9,54
Umum Nonmigas	128,87	134,77	142,32	142,25	-0,05	5,55	10,38

Grafik 10.2
Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia
September 2012–September 2015



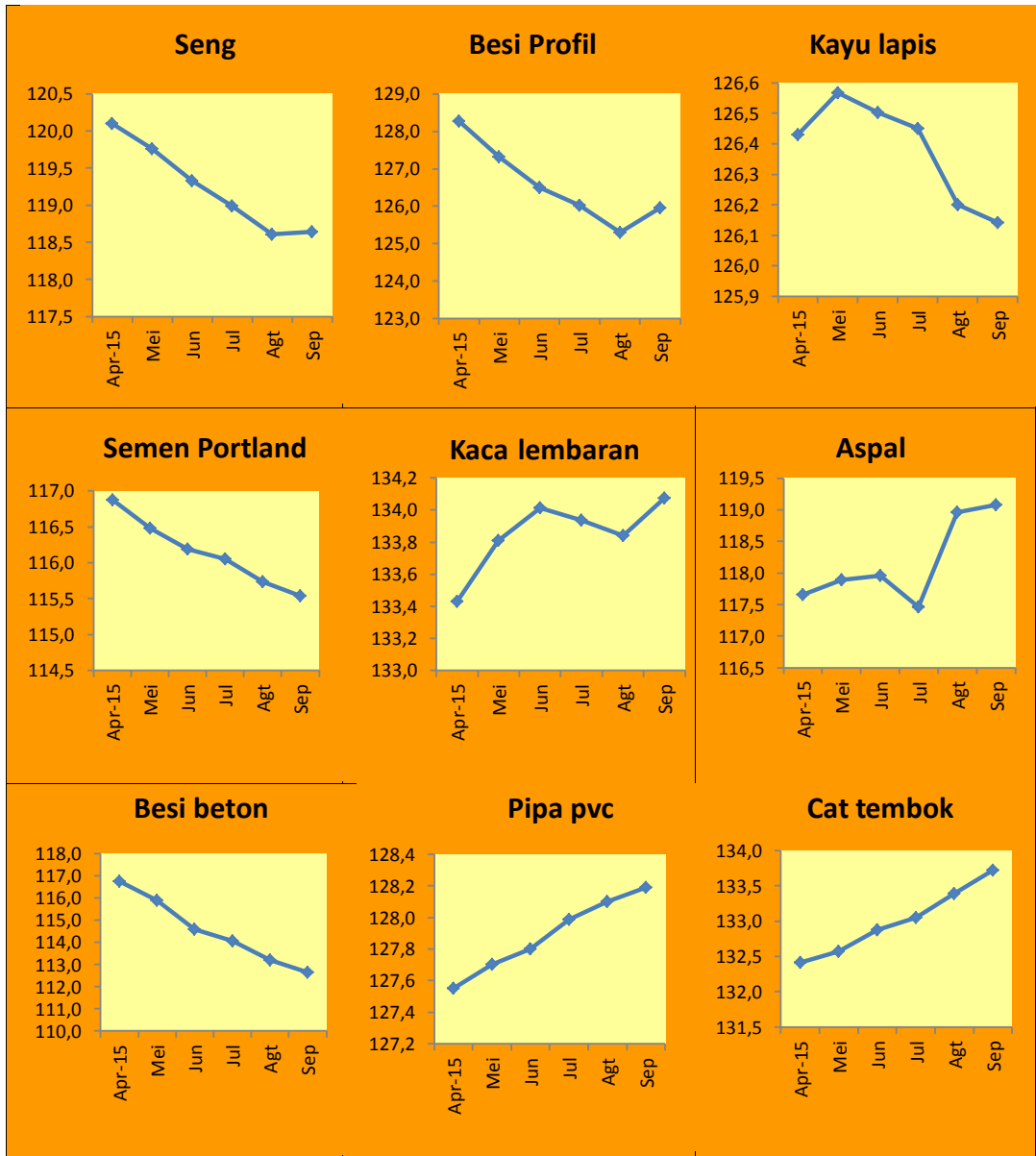
2. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi yang terdiri dari lima jenis bangunan/konstruksi pada September 2015 naik sebesar 0,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada jenis Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian sebesar 0,38 persen.

Tabel 10.5
Tingkat Inflasi Konstruksi Menurut Jenis Bangunan (2010=100)
Indonesia, September 2015

Jenis Bangunan	September 2014	Desember 2014	Agustus 2015	September 2015	Perubahan September 2015 terhadap Agustus 2015	Tingkat Inflasi	
						Tahun Kalender 2015	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal	123,00	128,07	130,13	130,17	0,03	1,63	5,83
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian	120,82	125,89	126,82	127,29	0,38	1,11	5,36
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan	119,61	123,21	124,42	124,75	0,27	1,25	4,30
Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi	121,96	125,55	127,84	128,22	0,30	2,12	5,13
Bangunan Lainnya	120,67	125,38	126,40	126,52	0,09	0,91	4,85
Konstruksi Indonesia	121,77	126,26	128,02	128,21	0,15	1,55	5,29

3. IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi (aspal, cat tembok, pipa pvc, kaca lembaran, besi profil, dan seng lembaran) pada September 2015 naik harganya dibandingkan bulan sebelumnya kecuali kayu lapis, semen portland, dan besi beton. Kenaikan tertinggi terjadi pada besi profil sebesar 0,52 persen dan terendah pada seng lembaran sebesar 0,03 persen. Komoditas lain, yaitu cat tembok naik 0,25 persen, kaca lembaran naik 0,18 persen, aspal naik 0,10 persen, dan pipa pvc naik 0,07 persen. Sedangkan kayu lapis turun 0,05 persen, semen portland turun 0,17 persen, dan besi beton turun 0,47 persen.

Grafik 10.3
Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan April–September 2015



XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN II-2015

A. INDEKS TENDENSI BISNIS (ITB)

A.1. ITB TRIWULAN II-2015

1. Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan II-2015 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nilai ITB sebesar 105,46. Pelaku bisnis di Indonesia pada triwulan II-2015 lebih optimis dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 96,30).
2. Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan II-2015 terjadi pada semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 94,39). Peningkatan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (nilai ITB sebesar 111,90), sedangkan peningkatan kondisi bisnis terendah terjadi pada lapangan usaha Real Estat (nilai ITB sebesar 102,63). Penurunan kondisi bisnis hanya terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 94,39).
3. Kondisi bisnis pada triwulan II-2015 meningkat karena adanya peningkatan pada semua komponen indeks, yaitu pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 107,04), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 107,36), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 103,35).

**Kondisi bisnis triwulan II-2015
meningkat dengan nilai
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)
sebesar 105,46**

Tabel 11.1
Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan II-2015
Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk ITB Triwulan II-2015			ITB Triwulan II-2015
	Pendapatan Usaha	Penggunaan Kapasitas Produksi/ Usaha	Rata-Rata Jumlah Jam Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	111,90	-	111,90
2. Pertambangan dan Penggalian	97,37	87,72	94,74	94,39
3. Industri Pengolahan	108,85	108,67	102,55	106,02
4. Pengadaan Listrik dan Gas	115,88	112,97	106,75	111,28
5. Pengadaan Air	108,58	105,97	101,49	104,95
6. Konstruksi	107,10	108,06	105,21	106,44
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	102,24	104,10	103,54	103,16
8. Transportasi dan Pergudangan	112,58	110,83	107,52	110,01
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,29	108,55	105,92	106,55
10. Informasi dan Komunikasi	109,52	107,50	107,69	108,33
11. Jasa Keuangan	105,50	103,37	100,50	102,88
12. Real Estat	105,60	100,00	101,27	102,63
13. Jasa Perusahaan	108,57	106,40	103,14	105,76
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	114,43	115,36	103,57	109,78
15. Jasa Pendidikan	116,13	109,68	106,45	110,63
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110,65	112,00	103,23	107,61
17. Jasa Lainnya	111,92	105,56	102,72	106,64
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	107,04	107,36	103,35	105,46

A.2. PERKIRAAN ITB TRIWULAN III-2015

- Selain pada triwulan berjalan, indeks komposit persepsi pengusaha mengenai kondisi bisnis dan perekonomian secara umum pada triwulan mendatang juga dihitung. Nilai ITB triwulan III-2015 diprediksi sebesar 106,09, artinya secara umum kondisi bisnis pada triwulan III-

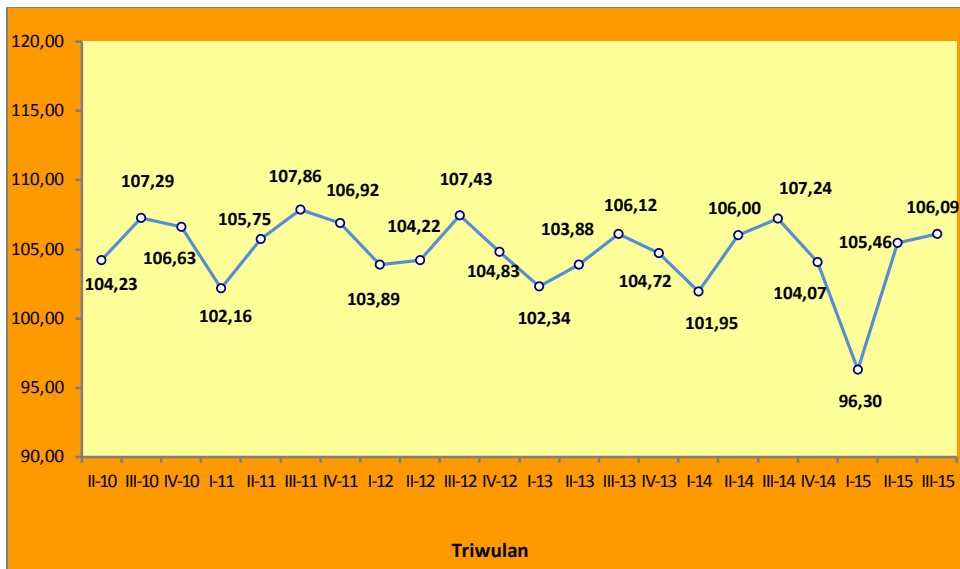
Kondisi bisnis pada triwulan III-2015 diprediksi meningkat (ITB 106,09)

2015 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan II-2015. Tingkat optimisme pelaku bisnis dalam melihat potensi bisnis pada triwulan III-2015 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2015 (nilai ITB sebesar 105,46). Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan III-2015 diperkirakan terjadi di semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 91,31). Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib diperkirakan mengalami peningkatan bisnis tertinggi dengan nilai indeks sebesar 110,71.

Tabel 11.2
Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan III-2015
Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk Perkiraan ITB Triwulan III-2015				Perkiraan ITB Triwulan III-2015
	Order dari Dalam Negeri	Order dari Luar Negeri	Harga Jual Produk	Order Barang Input	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111,42	108,18	109,38	-	110,02
2. Pertambangan dan Penggalian	98,20	83,78	100,00	84,44	91,31
3. Industri Pengolahan	108,07	101,88	114,41	99,78	105,31
4. Pengadaan Listrik dan Gas	111,27	-	109,61	108,43	109,68
5. Pengadaan Air	107,46	-	102,99	109,62	107,37
6. Konstruksi	109,00	-	122,75	102,37	109,27
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	112,72	98,68	113,13	107,83	108,84
8. Transportasi dan Pergudangan	-	-	109,93	-	109,93
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	110,51	-	110,51
10. Informasi dan Komunikasi	-	-	109,62	-	109,62
11. Jasa Keuangan	-	-	107,54	-	107,54
12. Real Estat	-	-	104,50	-	104,50
13. Jasa Perusahaan	-	-	107,43	-	107,43
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	110,71	-	110,71
15. Jasa Pendidikan	-	-	106,45	-	106,45
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	109,72	-	109,72
17. Jasa Lainnya	-	-	108,33	-	108,33
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	109,57	100,59	111,51	102,80	106,09

Grafik 11.1
Indeks Tendensi Bisnis¹ Triwulan II-2010–Triwulan II-2015 dan
Perkiraan Triwulan III-2015



Keterangan:

- ¹⁾ ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:
- Nilai ITB < 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
 - Nilai ITB = 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
 - Nilai ITB > 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.
- ²⁾ Angka perkiraan ITB triwulan III-2015.

B. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)

B.1. ITK TRIWULAN II-2015

1. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) merupakan indeks komposit persepsi rumah tangga mengenai kondisi ekonomi konsumen dan perilaku konsumsi terhadap situasi perekonomian pada triwulan

Kondisi ekonomi konsumen triwulan II-2015 meningkat (ITK 105,22)

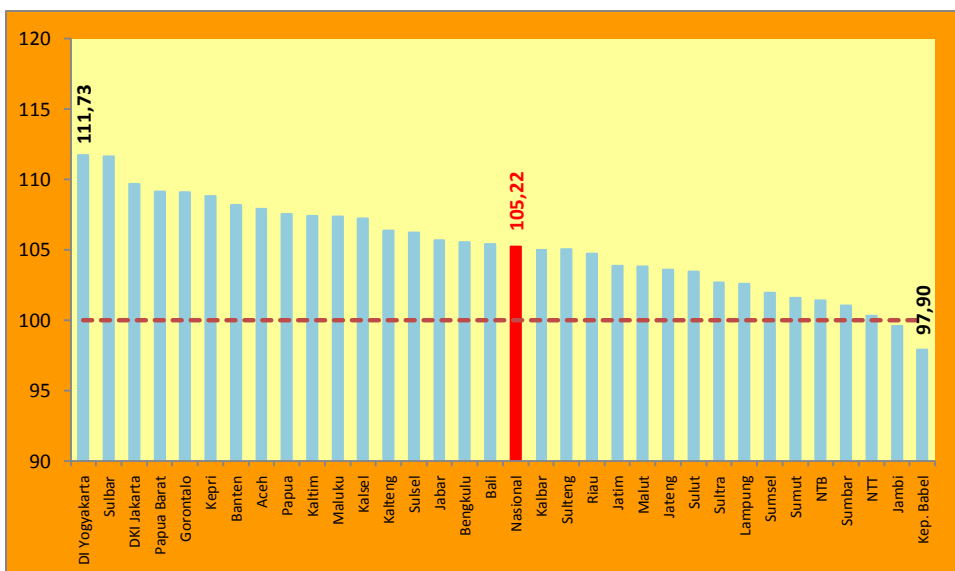
berjalan. Nilai ITK nasional pada triwulan II-2015 sebesar 105,22, artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh tingkat konsumsi yang meningkat, diikuti oleh rendahnya pengaruh kenaikan harga (inflasi) terhadap tingkat konsumsi dan meningkatnya pendapatan rumahtangga. Tingkat optimisme konsumen lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITK sebesar 100,87).

2. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 31 provinsi (93,94 persen). Penurunan kondisi ekonomi konsumen hanya terjadi di 2 provinsi yaitu provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung. Provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah DI Yogyakarta (nilai ITK sebesar 111,73). Sementara provinsi Bangka Belitung tercatat memiliki nilai ITK terendah, yaitu sebesar 97,90.

Tabel 11.3
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2015 dan Triwulan II-2015
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	ITK Triw I-2015	ITK Triw II-2015
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumah tangga	96,63	104,39
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	109,00	105,69
Tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan rekreasi)	100,65	106,59
Indeks Tendensi Konsumen	100,87	105,22

Grafik 11.2
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2015
Tingkat Nasional dan Provinsi



B.2. PERKIRAAN ITK TRIWULAN III-2015

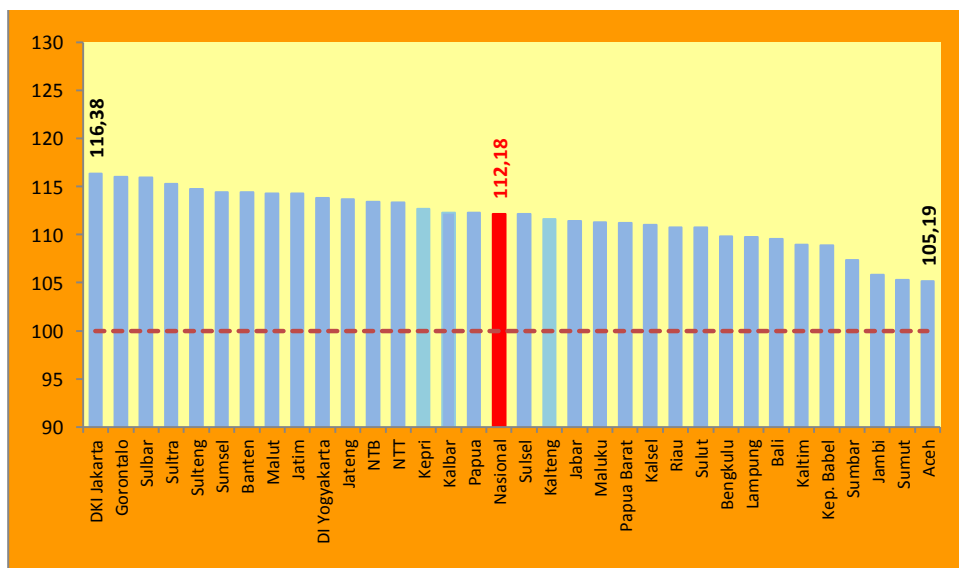
- Selain triwulan berjalan, indeks komposit persepsi rumah tangga mengenai kondisi ekonomi konsumen dan perilaku konsumsi pada triwulan mendatang juga diperkirakan. Nilai ITK nasional pada triwulan III-2015 diperkirakan sebesar 112,18, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen mendatang diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2015 (nilai ITK sebesar 105,22).
- Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen terjadi di semua provinsi di Indonesia, dimana 16 provinsi diantaranya (48,48 persen) diperkirakan memiliki nilai indeks diatas nasional. Provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah DKI Jakarta (nilai ITK sebesar 116,38), sementara Provinsi Aceh memiliki nilai ITK terendah (nilai ITK sebesar 105,19).

Kondisi ekonomi konsumen triwulan III-2015 diprediksi meningkat (ITK 112,18)

Tabel 11.4
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2015
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	Perkiraan ITK Triw III-2015
(1)	(2)
Perkiraan pendapatan rumah tangga	115,48
Rencana pembelian barang-barang tahan lama (elektronik, perhiasan, perangkat komunikasi, meubelair, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, tanah, rumah), rekreasi, dan pesta/hajatan	106,36
Indeks Tendensi Konsumen	112,18

Grafik 11.3
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2015
Tingkat Nasional dan Provinsi



Tabel 11.5
Indeks Tendensi Konsumen¹⁾ Triwulan II-2014–Triwulan II-2015 dan
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi

No.	Provinsi	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		II-2014	III-2014	IV-2014	I-2015	II-2015	III-2015 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	101,09	107,18	105,77	100,33	107,92	105,19
2.	Sumatera Utara	107,68	114,27	105,69	100,48	101,60	105,31
3.	Sumatera Barat	114,54	108,91	106,14	94,58	101,07	107,38
4.	R i a u	108,39	114,69	101,96	90,72	104,74	110,75
5.	J a m b i	106,20	114,68	104,81	91,66	99,57	105,81
6.	Sumatera Selatan	106,71	112,65	102,78	99,97	101,97	114,41
7.	Bengkulu	109,13	113,23	106,26	96,54	105,55	109,86
8.	Lampung	108,92	112,64	106,41	93,38	102,57	109,76
9.	Kep. Bangka Belitung	102,86	108,89	105,15	92,19	97,90	108,91
10.	Kep. R i a u	110,30	113,18	107,29	101,80	108,82	112,72
11.	DKI Jakarta	114,58	118,75	109,93	103,97	109,71	116,38
12.	Jawa Barat	111,07	113,72	107,09	104,43	105,67	111,40
13.	Jawa Tengah	110,43	116,00	106,02	99,71	103,60	113,68
14.	D.I. Yogyakarta	109,13	115,89	108,03	97,18	111,73	113,85
15.	Jawa Timur	105,68	115,99	110,23	100,75	103,88	114,29
16.	Banten	120,45	116,09	107,83	104,07	108,19	114,41
17.	B a l i	113,29	111,90	113,13	102,36	105,42	109,58
18.	Nusa Tenggara Barat	110,27	111,54	108,11	97,50	101,43	113,45
19.	Nusa Tenggara Timur	103,47	103,74	106,20	93,45	100,30	113,36
20.	Kalimantan Barat	116,74	112,27	107,29	100,44	105,05	112,29
21.	Kalimantan Tengah	104,32	112,33	105,54	94,98	106,37	111,62
22.	Kalimantan Selatan	102,92	109,41	103,32	94,25	107,21	111,01
23.	Kalimantan Timur	116,64	118,79	111,73	101,03	107,40	109,00
24.	Sulawesi Utara	100,84	107,16	108,91	93,15	103,46	110,75
25.	Sulawesi Tengah	104,06	112,79	108,16	91,78	105,03	114,76
26.	Sulawesi Selatan	104,98	110,67	108,19	96,29	106,24	112,14
27.	Sulawesi Tenggara	107,35	114,21	108,69	92,52	102,70	115,31
28.	Gorontalo	107,00	111,25	105,50	95,18	109,08	116,03
29.	Sulawesi Barat	103,37	111,30	104,57	100,69	111,64	115,96
30.	Maluku	109,05	115,41	102,23	102,18	107,38	111,27
31.	Maluku Utara	105,99	113,85	103,28	103,19	103,81	114,32
32.	Papua Barat	107,27	110,02	108,71	99,77	109,12	111,26
33.	Papua	109,48	107,21	111,62	93,88	107,57	112,27
	Indonesia	110,76	112,44	107,62	100,87	105,22	112,18

Keterangan:

¹⁾ ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- Nilai ITK < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITK = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- Nilai ITK > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

²⁾ Angka perkiraan ITK triwulan III-2015.

XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA TETAP (ATAP) 2014 DAN ANGKA RAMALAN I (ARAM I) 2015

A. PADI

1. Produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,85 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 0,43 juta ton (0,61 persen) dibandingkan tahun 2013. Penurunan produksi padi tersebut terjadi di Pulau Jawa sebanyak 0,83 juta ton, sedangkan di luar Pulau Jawa mengalami kenaikan sebanyak 0,40 juta ton. Penurunan produksi terjadi karena adanya penurunan luas panen seluas 37,95 ribu hektar (0,27 persen) dan produktivitas mengalami penurunan sebanyak 0,17 kuintal/hektar (0,33 persen).

Produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,85 juta ton GKG atau turun 0,61 persen dibandingkan tahun 2013
2. Produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 75,55 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 4,70 juta ton (6,64 persen) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi padi tahun 2015 diperkirakan terjadi di Pulau Jawa sebanyak 1,83 juta ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 2,88 juta ton. Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 0,51 juta hektar (3,71 persen) dan peningkatan produktivitas sebanyak 1,45 kuintal/hektar (2,82 persen).

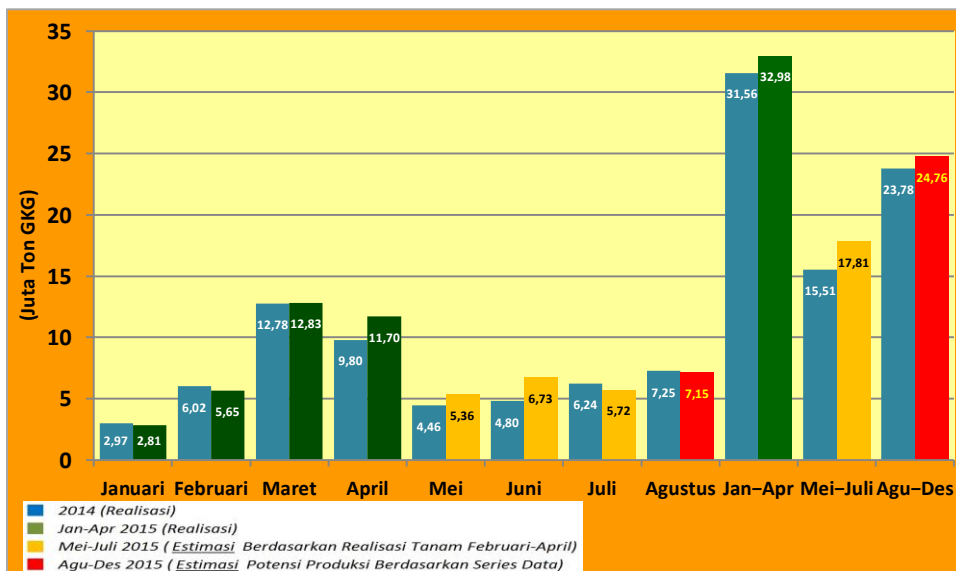
Produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 75,55 juta ton GKG atau naik 6,64 persen dibandingkan tahun 2014
3. Kenaikan produksi padi pada *subround* Januari–April 2015 sebagian besar disumbang oleh peningkatan produksi bulan April sebanyak 1,90 juta ton GKG. Sementara itu, pada *subround* Mei–Agustus 2015 diperkirakan sebagian besar kenaikan produksi padi disumbang oleh kenaikan produksi pada bulan Juni sebanyak 1,93 juta ton GKG. Produksi padi pada bulan April dan Juni 2015 masing-masing sebanyak 11,70 juta ton dan 6,73 juta ton GKG.

Tabel 12.1
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2013–2015

Uraian	2013	2014	2015 (ARAM I)	Perkembangan			
				2013–2014		2014–2015	
				Absolut	(%)	Absolut	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	6 467 073	6 400 038	6 448 127	-67 035	-1,04	48 089	0,75
- Luar Jawa	7 368 179	7 397 269	7 861 237	29 090	0,39	463 968	6,27
- Indonesia	13 835 252	13 797 307	14 309 364	-37 945	-0,27	512 057	3,71
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	57,98	57,29	59,69	-0,69	-1,19	2,40	4,19
- Luar Jawa	45,85	46,21	47,14	0,36	0,79	0,93	2,01
- Indonesia	51,52	51,35	52,80	-0,17	-0,33	1,45	2,82
c. Produksi (ton)							
- Jawa	37 493 020	36 663 049	38 489 805	-829 971	-2,21	1 826 756	4,98
- Luar Jawa	33 786 689	34 183 416	37 061 090	396 727	1,17	2 877 674	8,42
- Indonesia	71 279 709	70 846 465	75 550 895	-433 244	-0,61	4 704 430	6,64

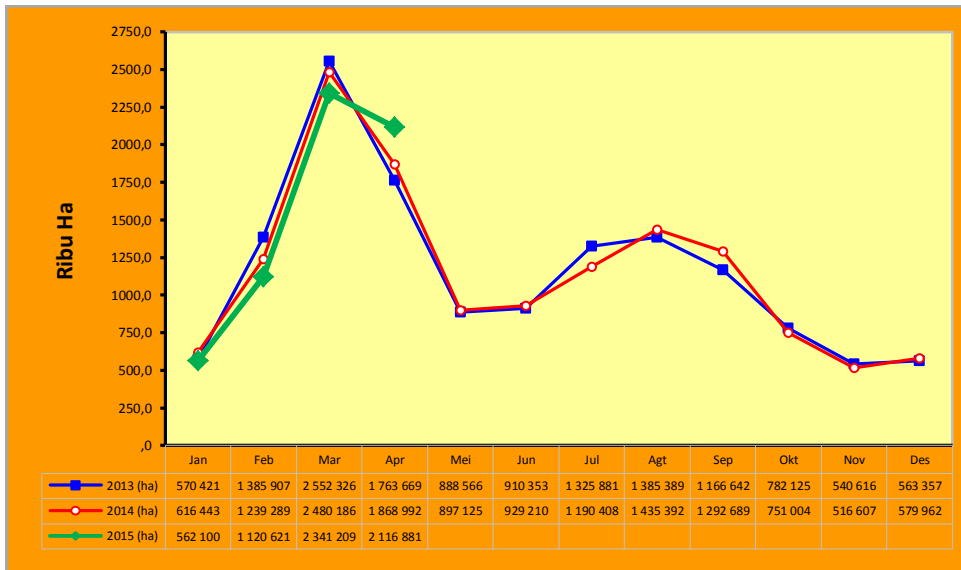
Keterangan: kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

Grafik 12.1
Produksi Padi Per Bulan, 2014–2015



4. Pola panen padi pada *subround* Januari–April tahun 2015 relatif sama dengan pola panen tahun 2014 dan tahun 2013. Puncak panen padi pada *subround* Januari–April tahun 2015, 2014, dan 2013 terjadi pada bulan Maret. Namun demikian, panen pada bulan April 2015 lebih tinggi dari tahun 2013 dan 2014 yang mengindikasikan adanya mundur tanam pada tahun 2015.

Grafik 12.2
Pola Panen Padi, 2013–2015



B. JAGUNG

1. Produksi jagung tahun 2014 sebanyak 19,01 juta ton pipilan kering, meningkat sebanyak 0,50 juta ton (2,68 persen) dibandingkan tahun 2013. Peningkatan produksi tersebut terjadi di Pulau Jawa sebanyak 0,06 juta ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 0,43 juta ton. Peningkatan produksi jagung terjadi karena kenaikan luas panen seluas 15,52 ribu hektar (0,41 persen) dan peningkatan produktivitas sebanyak 1,10 kuintal/hektar (2,27 persen).
2. Produksi jagung tahun 2015 diperkirakan sebanyak 20,67 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 1,66 juta ton (8,72 persen) dibandingkan tahun 2014.

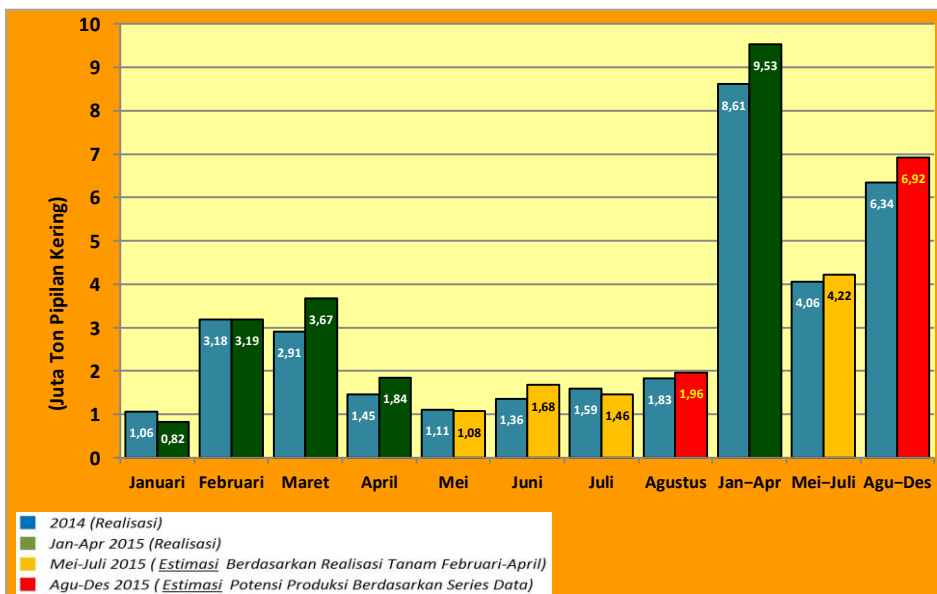
Produksi jagung tahun 2014
sebanyak 19,01 juta ton
pipilan kering atau naik 2,68
persen dibandingkan tahun
2013

Produksi jagung tahun 2015
diperkirakan sebanyak 20,67
juta ton pipilan kering atau
naik 8,72 persen
dibandingkan tahun 2014

Peningkatan produksi jagung tersebut diperkirakan terjadi di Pulau Jawa sebanyak 0,73 juta ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 0,92 juta ton. Peningkatan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 160,48 ribu hektar (4,18 persen) dan peningkatan produktivitas sebanyak 2,16 kuintal/hektar (4,36 persen).

3. Kenaikan produksi jagung pada *subround* Januari–April 2015 sebagian besar disumbang oleh peningkatan produksi bulan Maret sebanyak 0,76 juta ton pipilan kering. Sementara itu, pada *subround* Mei–Agustus 2015 diperkirakan sebagian besar kenaikan produksi jagung disumbang oleh kenaikan produksi pada bulan Juni sebanyak 0,32 juta ton pipilan kering. Produksi jagung pada bulan Maret dan Juni 2015 masing-masing sebanyak 3,67 juta ton dan 1,68 juta ton pipilan kering.

Grafik 12.3
Produksi Jagung Per Bulan, 2014–2015



C. KEDELAI

1. Produksi kedelai tahun 2014 sebanyak 955,00 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 175,01 ribu ton (22,44 persen) dibandingkan tahun 2013. Peningkatan produksi kedelai tersebut terjadi di Pulau Jawa sebanyak 100,20 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 74,80 ribu ton.

Produksi kedelai tahun 2014 sebanyak 955,00 ribu ton biji kering atau naik 22,44 persen dibandingkan tahun 2013

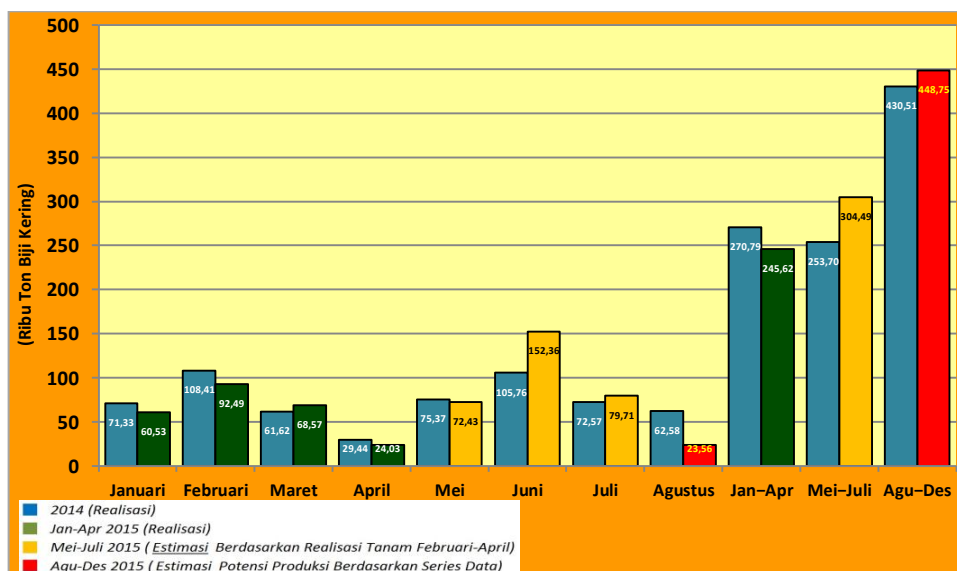
Peningkatan produksi kedelai terjadi karena kenaikan luas panen seluas 64,89 ribu hektar (11,78 persen) dan peningkatan produktivitas sebanyak 1,35 kuintal/hektar (9,53 persen).

2. Produksi kedelai tahun 2015 diperkirakan sebanyak 998,87 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 43,87 ribu ton (4,59 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi kedelai tersebut diperkirakan terjadi di Pulau Jawa sebanyak 1,31 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 42,56 ribu ton. Peningkatan produksi kedelai diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 24,67 ribu hektar (4,01 persen) dan peningkatan produktivitas sebanyak 0,09 kuintal/hektar (0,58 persen).

Produksi kedelai tahun 2015 diperkirakan sebanyak 998,87 ribu ton biji kering atau naik 4,59 persen dibandingkan tahun 2014

3. Kenaikan produksi kedelai pada *subround* Januari–April 2015 sebagian besar disumbang oleh peningkatan produksi bulan Maret sebanyak 6,95 ribu ton biji kering. Sementara itu, pada *subround* Mei–Agustus 2015 diperkirakan sebagian besar kenaikan produksi kedelai disumbang oleh kenaikan produksi pada bulan Juni sebanyak 46,60 ribu ton biji kering. Produksi kedelai pada bulan Maret dan Juni 2015 masing-masing sebanyak 68,57 ribu ton dan 152,36 ribu ton biji kering.

Grafik 12.4
Produksi Kedelai Per Bulan, 2014–2015



Tabel 12.2
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija, 2013–2015

Uraian	Satuan	2013	2014	2015 (ARAM I)	Perkembangan			
					2013–2014		2014–2015	
					Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Jagung								
-Luas Panen	ha	3 821 504	3 837 019	3 997 499	15 515	0,41	160 480	4,18
-Produktivitas	ku/ha	48,44	49,54	51,70	1,10	2,27	2,16	4,36
-Produksi (pipilan kering)	ton	18 511 853	19 008 426	20 666 702	496 573	2,68	1 658 276	8,72
2. Kedelai								
-Luas Panen	ha	550 793	615 685	640 351	64 892	11,78	24 666	4,01
-Produktivitas	ku/ha	14,16	15,51	15,60	1,35	9,53	0,09	0,58
-Produksi (biji kering)	ton	779 992	954 997	998 866	175 005	22,44	43 869	4,59
3. Kacang Tanah								
-Luas Panen	ha	519 056	499 338	489 509	-19 718	-3,80	-9 829	-1,97
-Produktivitas	ku/ha	13,52	12,79	13,43	-0,73	-5,40	0,64	5,00
-Produksi (biji kering)	ton	701 680	638 896	657 595	-62 784	-8,95	18 699	2,93
4. Kacang Hijau								
-Luas Panen	ha	182 075	208 016	212 867	25 941	14,25	4 851	2,33
-Produktivitas	ku/ha	11,24	11,76	11,67	0,52	4,63	-0,09	-0,77
-Produksi (biji kering)	ton	204 670	244 589	248 425	39 919	19,50	3 836	1,57
5. Ubi Kayu								
-Luas Panen	ha	1 065 752	1 003 494	1 016 368	-62 258	-5,84	12 874	1,28
-Produktivitas	ku/ha	224,60	233,55	235,84	8,95	3,98	2,29	0,98
-Produksi (umbi basah)	ton	23 936 921	23 436 384	23 969 869	-500 537	-2,09	533 485	2,28
6. Ubi Jalar								
-Luas Panen	ha	161 850	156 758	157 125	-5 092	-3,15	367	0,23
-Produktivitas	ku/ha	147,47	152,00	156,64	4,53	3,07	4,64	3,05
-Produksi (umbi basah)	ton	2 386 729	2 382 658	2 461 149	-4 071	-0,17	78 491	3,29

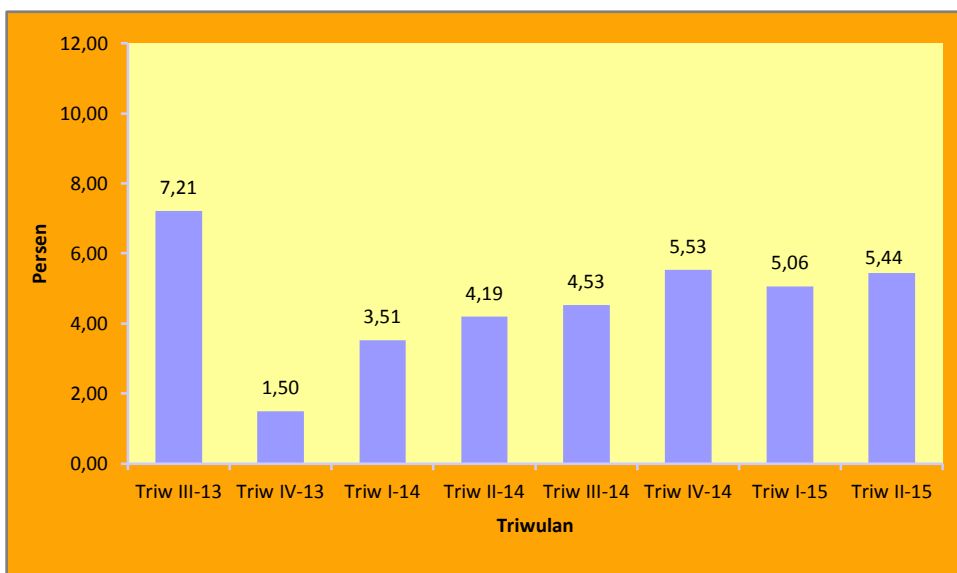
XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN II-2015

A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS)

- Pertumbuhan IBS triwulan II-2015 naik sebesar 5,44 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2014, triwulan I-2015 naik sebesar 5,06 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 5,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2013, triwulan III-2014 naik sebesar 4,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2013, triwulan II-2014 naik sebesar 4,19 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2013, triwulan I-2014 naik sebesar 3,51 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2013, dan triwulan IV-2013 naik sebesar 1,50 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2012.

Pertumbuhan produksi IBS triwulan II-2015 naik sebesar 5,44 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2014

Grafik 13.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (*y-on-y*) Triwulan III-2013–Triwulan II-2015



- Pertumbuhan produksi IBS triwulan II-2015 naik sebesar 2,34 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2015, triwulan I-2015 turun sebesar 0,70 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 1,68 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2014, triwulan III-2014 naik sebesar 2,04 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2014, triwulan

II-2014 naik sebesar 1,97 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2014, dan triwulan I-2014 turun sebesar 0,25 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2013.

3. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan II-2015 (*y-on-y*) adalah industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang naik 16,43 persen, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang naik sebesar 13,13 persen, serta jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang naik 9,43 persen.
4. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan II-2015 (*q-to-q*) adalah industri makanan yang naik 9,84 persen, industri karet, barang dari karet dan plastik naik 8,61 persen, dan industri mesin dan perlengkapan ydtl naik 8,60 persen.
5. Pertumbuhan produksi IBS *m-to-m* April 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,28 persen, dan Mei 2015 mengalami penurunan sebesar 3,35 persen. Sedangkan pada Juni 2015 mengalami kenaikan sebesar 3,56 persen.

Tabel 13.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2013–2015 (persen)
2010=100

Tahun	<i>q-to-q</i>				<i>y-on-y</i>				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013	-2,20	1,31	0,51	1,91	8,99	6,77	7,21	1,50	6,01
2014	-0,25	1,97	2,04	1,59	3,51	4,19	4,53	5,44	4,74
2015	-0,70	2,34			5,06	5,44			

Tabel 13.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2012–2015 (persen)
2010=100

Bulan	<i>y-on-y</i>			<i>m-to-m</i>		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	10,86	2,99	5,12	-0,18	-0,03	-1,29
Februari	6,32	3,82	2,63	-1,41	-0,61	-2,97
Maret	9,88	3,74	7,42	0,24	0,17	4,84
April	6,89	2,74	8,38*)	1,37	0,39	1,28*)
Mei	3,23	3,79	2,21**)	1,45	2,48	-3,35**)
Juni	6,77	6,07	5,79***)	-2,10	0,05	-3,56***)
Juli	12,49	1,54		1,71	-2,64	
Agustus	6,16	5,96		-1,65	2,63	
September	7,21	9,77		2,64	6,34	
Oktober	-0,10	5,35		1,45	-2,64	
November	1,82	4,76		-1,57	-2,12	
Desember	2,83	6,47		0,99	2,64	

Catatan: *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara
 ***) Angka Sangat Sangat Sementara

Tabel 13.3
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan II-2015
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

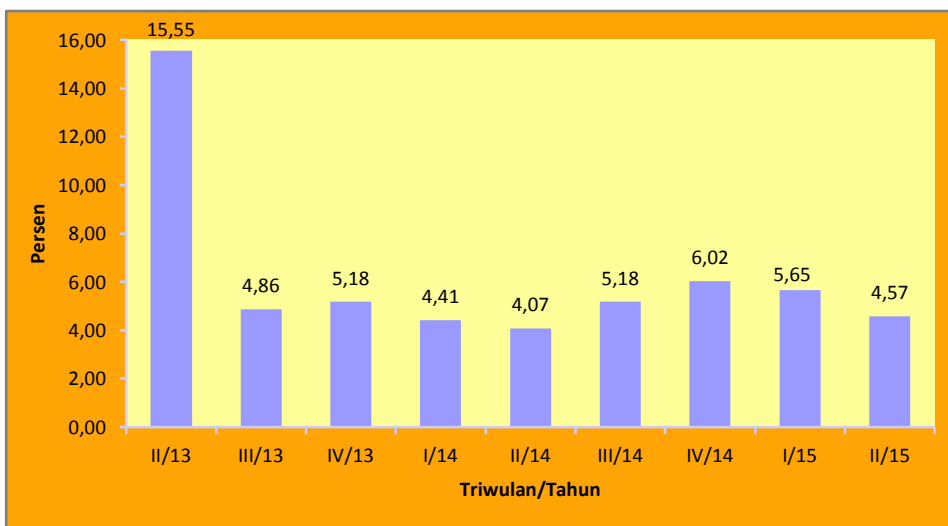
KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	9,84	8,70
11	Minuman	1,76	3,09
12	Pengolahan Tembakau	6,41	7,62
13	Tekstil	1,20	-1,98
14	Pakaian Jadi	-5,62	-12,77
15	Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	4,62	6,08
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	1,88	2,53
17	Kertas dan Barang dari Kertas	1,44	-5,63
18	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5,21	7,83
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-4,28	3,82
21	Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	0,60	13,13
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	8,61	8,66
23	Barang Galian Bukan Logam	3,58	8,97
24	Logam Dasar	2,76	6,95
25	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	5,72	16,43
26	Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	3,43	0,97
27	Peralatan Listrik	6,35	7,59
28	Mesin dan Perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya	8,60	5,32
29	Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	-0,45	6,11
30	Alat Angkutan Lainnya	-3,04	-6,52
31	Furnitur	6,58	7,62
32	Pengolahan Lainnya	3,07	4,66
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-0,04	9,43
Industri Manufaktur Besar dan Sedang		2,34	5,44

B. Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)

1. Pertumbuhan produksi IMK triwulan II-2015 naik sebesar 4,57 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2014, triwulan I-2015 naik sebesar 5,65 persen dari triwulan I-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 6,02 persen dari triwulan IV-2013, dan triwulan III-2014 naik sebesar 5,18 persen dari triwulan III-2013.

**Pertumbuhan produksi
IMK triwulan II-2015 naik 4,57
persen dari triwulan II-2014**

Grafik 13.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*)
Triwulan II-2013–Triwulan II-2015



2. Pertumbuhan Produksi IMK triwulan II-2015 naik 5,09 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2015, triwulan I-2015 naik 0,64 persen dari triwulan IV-2014, triwulan IV-2014 naik 2,39 persen dari triwulan III-2014, dan triwulan III-2014 turun 3,43 persen dari triwulan II-2014.
3. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan II-2015 (*y-on-y*) adalah Industri Kertas dan Barang dari Kertas naik 23,44 persen, Industri Mesin dan Perlengkapannya naik 15,97 persen, serta Industri Peralatan Listrik naik 12,69 persen.
4. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan II-2015 (*q-to-q*) adalah Industri Peralatan Listrik naik 10,72 persen, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki naik 10,38 persen, serta Industri Tekstil naik 9,42 persen.

Tabel 13.4
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan
Triwulan I-2013–Triwulan II-2015 (persen)

Tahun	q-to-q				y-on-y				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013	1,74	6,52	-4,45	1,58	4,84	15,55	4,86	5,18	7,51
2014	0,99	6,17	-3,43	2,39	4,41	4,07	5,18	6,02	4,91
2015	0,64	5,09			5,65	4,57			

Tabel 13.5
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan II-2015
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	5,55	3,97
11	Minuman	2,80	7,16
12	Pengolahan tembakau	-0,04	1,46
13	Tekstil	9,42	9,15
14	Pakaian jadi	7,47	7,33
15	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	10,38	3,23
16	Kayu, barang dari kayu dan gabus (kecuali furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya)	-2,80	-6,34
17	Kertas dan barang dari kertas	5,46	23,44
18	Percetakan dan reproduksi media rekaman	3,81	3,56
20	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	2,31	10,61
21	Farmasi, obat kimia dan obat tradisional	1,29	2,27
22	Karet, barang dari karet dan plastik	-4,90	0,76
23	Barang galian bukan logam	2,95	-3,82
24	Logam dasar	5,23	4,39
25	Barang logam, bukan mesin & peralatannya	4,06	-0,46
26	Komputer, barang elektronik dan optik	7,23	0,66
27	Peralatan listrik	10,72	12,69
28	Mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya)	5,80	15,97
29	Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	-3,82	2,75
30	Alat angkutan lainnya	-3,62	-4,66
31	Furnitur	5,45	10,69
32	Pengolahan lainnya	5,79	2,43
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,29	5,18
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil		5,09	4,57

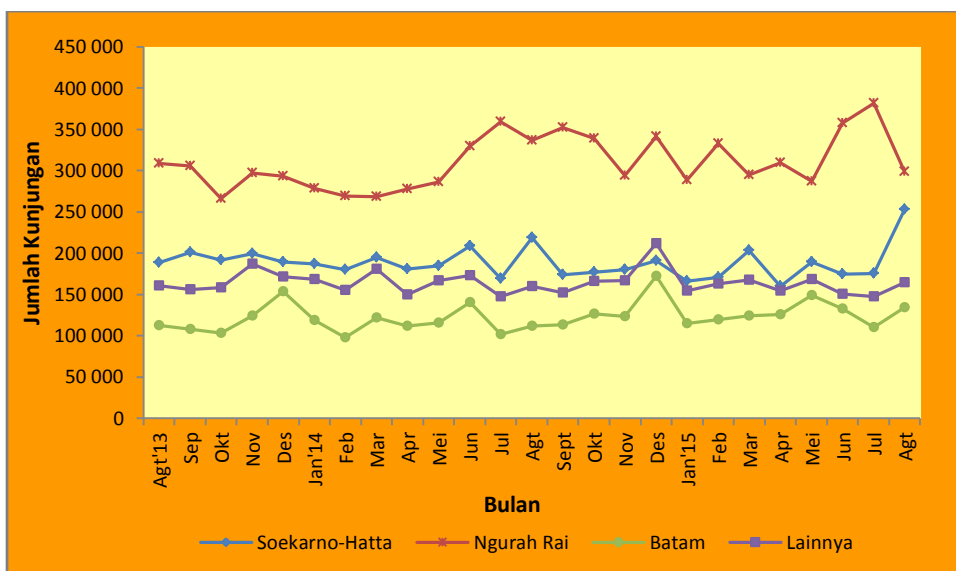
XIV. PARIWISATA AGUSTUS 2015

A. Wisatawan Mancanegara (Wisman)

1. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari–Agustus 2015 mencapai 6,32 juta kunjungan atau naik 2,71 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2014, yang tercatat sebanyak 6,16 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisman bulan Agustus 2015 naik sebesar 2,87 persen dibanding Agustus 2014, dari 826,8 ribu kunjungan menjadi 850,5 ribu kunjungan. Demikian pula, jika dibandingkan dengan Juli 2015, jumlah kunjungan wisman Agustus 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,46 persen. Pada Agustus 2015, jumlah kunjungan wisman melalui 19 pintu masuk utama naik 2,45 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2014, dan mengalami kenaikan sebesar 4,85 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Jumlah kunjungan wisman selama Januari–Agustus 2015 mencapai 6,32 juta kunjungan atau naik 2,71 persen dibanding periode yang sama tahun 2014

Grafik 14.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk Agustus 2013–Agustus 2015



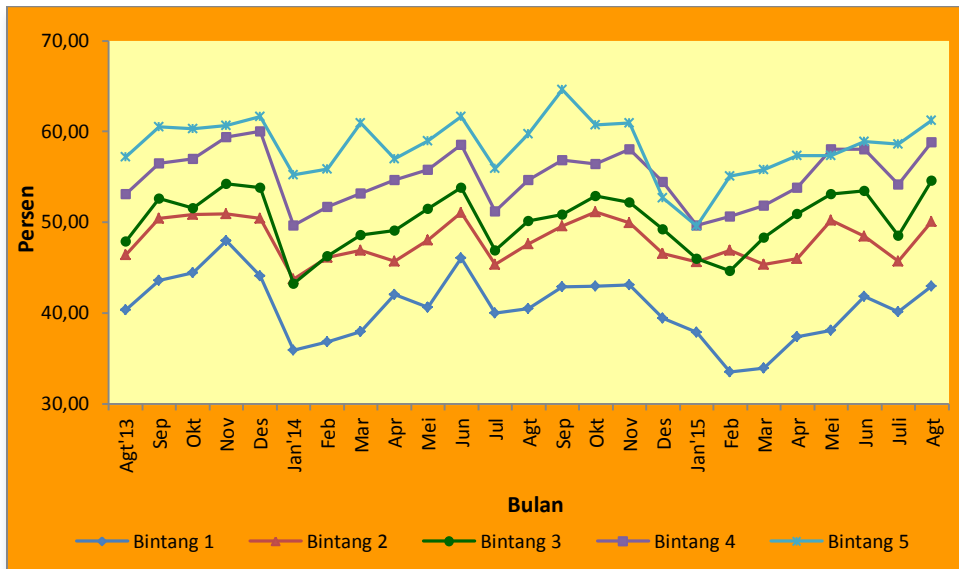
2. Jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Agustus 2015 mengalami penurunan sebesar 11,29 persen dibandingkan Agustus 2014, yaitu dari 336,6 ribu kunjungan menjadi 298,6 ribu kunjungan. Demikian pula, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman ke Bali mengalami penurunan sebesar 21,80 persen.
3. Dari sekitar 850,5 ribu kunjungan wisman yang datang ke Indonesia pada Agustus 2015, sebanyak 15,13 persen diantaranya dilakukan oleh wisman berkebangsaan Singapura, diikuti oleh wisman Tionghoa (14,95 persen), Malaysia (11,18 persen), Australia (8,35 persen), dan Jepang (5,75 persen).

B. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang

1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi selama Januari-Agustus 2015 rata-rata mencapai 51,25 persen, yang berarti terjadi kenaikan 0,17 poin dibandingkan rata-rata TPK hotel berbintang pada periode yang sama tahun 2014. TPK Agustus 2015 mencapai 55,61 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 3,59 poin dibandingkan TPK hotel berbintang pada Agustus 2014. Demikian pula, jika dibandingkan bulan sebelumnya, TPK Agustus 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,36 poin.

TPK Hotel Berbintang Agustus 2015 mencapai 55,61 persen atau naik 3,59 poin dibanding TPK Agustus 2014
2. Naik turunnya angka TPK tidak selalu mencerminkan kinerja di sektor perhotelan. Angka TPK hanya menggambarkan rata-rata tingkat hunian di masing-masing hotel tanpa memperhatikan adanya perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel. Kinerja sektor perhotelan tidak hanya diukur dari besaran TPK tetapi juga harus memperhatikan perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel yang siap dijual atau dipasarkan.

Grafik 14.2
Perkembangan Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di 27 Provinsi Indonesia, Agustus 2013–Agustus 2015



3. TPK Hotel Berbintang di Bali pada Agustus 2015 sebesar 67,49 persen, atau naik sebesar 5,42 poin dibandingkan TPK Agustus 2014. Demikian pula, jika dibandingkan dengan Juli 2015, TPK Agustus 2015 di Bali mengalami kenaikan sebesar 3,20 poin.
4. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang selama Agustus 2015 mencapai 1,93 hari, atau mengalami penurunan 0,08 hari dibandingkan rata-rata lama menginap selama Agustus 2014. Namun, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada Agustus 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,03 hari, yaitu dari 1,90 hari menjadi 1,93 hari.

Tabel 14.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel
Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Agustus 2014–Agustus 2015

Bulan/ Tahun	Wisman Nasional		Wisman Bali (Ngurah Rai)		TPK 27 Provinsi		TPK Bali		Lama Menginap Tamu (hari)	
	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata	Peru- Bahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2014	9 435 411	7,19	3 731 735	15,11	51,84	-0,66	60,34	-0,38	1,99	0,06
Jan-Agust	6 155 553	9,08	2 405 549	15,65	51,08	-0,18	60,65	0,50	2,00	0,06
Agustus	826 821	6,38	336 628	-6,21	52,02	2,93	62,07	0,67	2,01	-0,09
September	791 296	-4,30	352 017	4,57	54,21	2,19	63,87	1,80	2,02	0,01
Oktober	808 767	2,21	339 200	-3,64	54,29	0,08	62,83	-1,04	1,98	-0,04
November	764 461	-5,48	293 858	-13,37	54,45	0,16	61,36	-1,47	1,96	-0,02
Desember	915 334	19,74	341 111	16,08	50,13	-4,32	51,07	-10,29	1,91	-0,05
2015	6 322 592	2,71	2 551 854	6,08	51,25	0,17	59,27	-1,38	2,05	0,05
Januari	723 039	-21,01	288 755	-15,35	47,08	-3,05	53,45	2,38	2,12	0,21
Februari	786 653	8,80	333 072	15,35	47,59	0,51	60,03	6,58	1,98	-0,04
Maret	789 596	0,37	294 758	-11,50	49,13	1,54	54,50	-5,53	1,96	-0,02
April	749 882	-5,03	309 888	5,13	51,28	2,15	54,70	0,20	2,19	0,23
Mei	793 499	5,82	287 141	-7,34	53,72	2,44	57,51	2,81	2,12	-0,07
Juni	815 148	2,73	357 712	24,58	54,14	0,42	61,76	4,25	2,20	0,08
Juli	814 233	-0,11	381 890	6,76	51,25	-2,89	64,29	2,53	1,90	-0,30
Agustus	850 542	4,46	298 638	-21,80	55,61	4,36	67,49	3,20	1,93	0,03

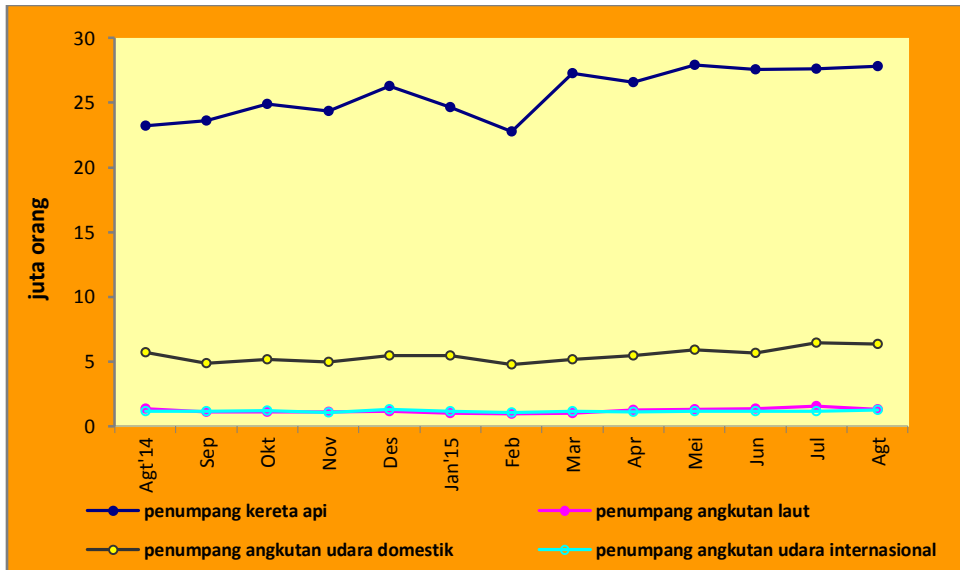
XV. TRANSPORTASI NASIONAL AGUSTUS 2015

A. Angkutan Udara

1. Jumlah penumpang angkutan udara tujuan dalam negeri (domestik) Agustus 2015 mencapai 6,3 juta orang atau turun 1,20 persen dibandingkan bulan sebelumnya, namun naik 11,26 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

Jumlah penumpang angkutan udara domestik Agustus 2015 mencapai 6,3 juta orang, naik 11,26 persen

Grafik 15.1
Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Agustus 2014–Agustus 2015



2. Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) Agustus 2015 mencapai 1,3 juta orang atau naik 9,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 11,99 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

B. Angkutan Laut Dalam Negeri

1. Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Agustus 2015 mencapai 1,3 juta orang atau turun 18,77 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan turun 6,04 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.
2. Jumlah barang yang diangkut pelayaran dalam negeri Agustus 2015 mencapai 20,1 juta ton atau naik 11,80 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,03 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Agustus 2015 mencapai 1,3 juta orang, turun 6,04 persen

C. Angkutan Kereta Api

1. Jumlah penumpang kereta api Agustus 2015 mencapai 27,8 juta orang atau naik 0,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 19,82 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.
2. Jumlah barang yang diangkut kereta api Agustus 2015 mencapai 2,9 juta ton atau naik 7,58 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 6,74 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

Jumlah penumpang kereta api Agustus 2015 mencapai 27,8 juta orang, naik 19,82 persen

Tabel 15.1
Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi
Agustus 2014–Agustus 2015

Tahun/ Bulan	Angkutan Udara				Angkutan Laut				Angkutan Kereta Api			
	Domestik		Internasional		Penumpang		Barang		Penumpang		Barang	
	(ribu org)	Perubahan (%)	(ribu org)	Perubahan (%)	(ribu org)	Perubahan (%)	(ribu ton)	Perubahan (%)	(ribu org)	Perubahan (%)	(ribu ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2014	58 919,3	-	13 684,2	-	13 088,8	-	225 517,3	-	277 503	-	33 463	-
Agustus	5 702,0	26,82	1 132,7	1,97	1 353,7	12,76	18 748,1	-4,28	23 199	3,11	2 699	9,36
September	4 834,8	-15,21	1 169,7	3,27	1 100,8	-18,68	18 902,5	0,82	23 593	1,70	3 340	23,75
Oktober	5 136,5	6,24	1 193,1	2,00	1 078,3	-2,04	18 758,5	-0,76	24 923	5,64	2 956	-11,50
November	4 957,3	-3,49	1 054,4	-11,63	1 121,6	4,02	18 585,6	-0,92	24 356	-2,28	2 775	-6,12
Desember	5 469,7	10,34	1 290,0	22,34	1 154,7	2,95	17 791,4	-4,27	26 275	7,88	3 150	13,51
2015	45 070,7	-	9 167,4	-	9 719,4	-	150 500,9	-	212 178	-	20 826	-
Januari	5 430,2	-0,72	1 135,4	-11,98	1 005,2	-12,95	19 761,3	11,07	24 676	-6,09	2 709	-14,00
Februari	4 736,5	-12,77	1 032,7	-9,05	960,3	-4,47	16 689,3	-15,55	22 790	-7,64	2 256	-16,72
Maret	5 132,2	8,35	1 136,1	10,01	1 021,9	6,41	18 136	8,67	27 267	19,64	2 520	11,70
April	5 439,0	5,98	1 122,1	-1,23	1 264,1	23,70	17 896,6	-1,32	26 565	-2,57	2 336	-7,30
Mei	5 911,3	8,68	1 157,6	3,16	1 301,0	2,92	20 134,4	12,50	27 910	5,06	2 641	13,06
Juni	5 656,6	-4,31	1 152,2	-0,47	1 329,2	2,17	19 870,0	-1,31	27 562	-1,25	2 805	6,21
Juli	6 421,0	13,51	1 162,8	0,92	1 565,8	17,80	17 947,8	-9,67	27 612	0,18	2 678	-4,53
Agustus	6 343,9	-1,20	1 268,5	9,09	1 271,9	-18,77	20 065,5	11,80	27 796	0,67	2 881	7,58

Catatan: Data penumpang angkutan udara internasional Januari s.d Maret 2015 direvisi.

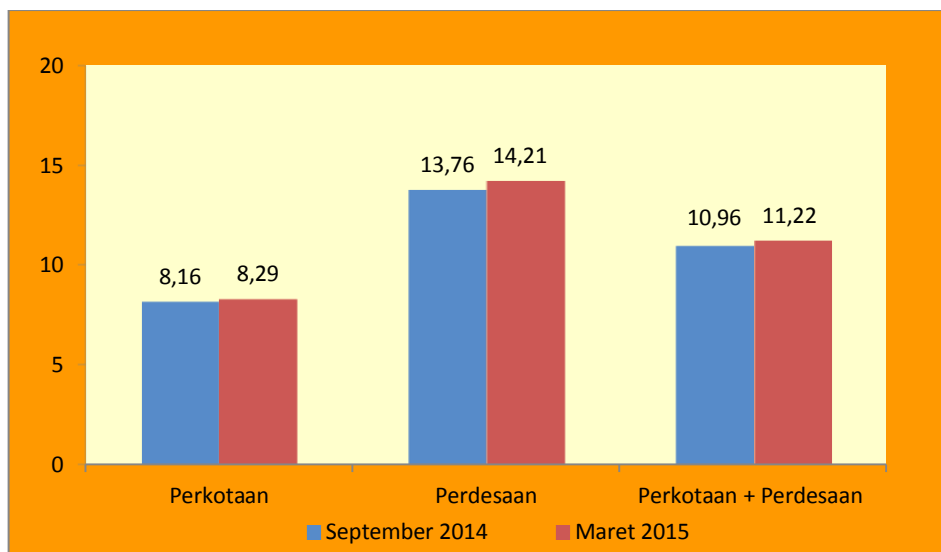
XVI. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN MARET 2015

A. Perkembangan Kemiskinan September 2014–Maret 2015

- Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang sebanyak 27,73 juta orang (10,96 persen). Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 16.1 dan Tabel 16.1.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang

Grafik 16.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
September 2014–Maret 2015



- Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat lebih banyak dibanding peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan. Selama periode September 2014–Maret 2015, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 290 ribu orang, sementara di daerah perdesaan bertambah sekitar 570 ribu orang.

3. Pada Maret 2015, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 62,74 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada September 2014 sebesar 62,65 persen.

Tabel 16.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, September 2014–Maret 2015

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan (GKM)	Bukan Makanan (GKBM)	Total (GK)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
September 2014	228 534	98 319	326 853	10,36	8,16
Maret 2015	238 278	104 263	342 541	10,65	8,29
Perdesaan					
September 2014	229 391	67 290	296 681	17,37	13,76
Maret 2015	245 357	72 524	317 881	17,94	14,21
Perkotaan+Perdesaan					
September 2014	229 469	82 859	312 328	27,73	10,96
Maret 2015	242 241	88 535	330 776	28,59	11,22

Beberapa faktor terkait bertambahnya jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 2014–Maret 2015 adalah:

- Selama periode September 2014–Maret 2015 terjadi inflasi sebesar 4,03 persen.
- Secara nasional, rata-rata harga beras mengalami peningkatan sebesar 14,48 persen yaitu dari Rp11.433,- per kg pada September 2014 menjadi Rp13.089,- per kg pada Maret 2015.
- Selama periode September 2014–Maret 2015, selain beras harga eceran beberapa komoditas bahan pokok mengalami kenaikan seperti cabe rawit serta gula pasir, yaitu masing-masing naik sebesar 26,28 persen dan 1,92 persen.
- Secara riil, rata-rata upah buruh tani per hari pada Maret 2015 turun sebesar 1,34 persen dibanding upah buruh tani September 2014, yaitu dari Rp 39.045,- menjadi Rp 38.522,-.
- Tingkat inflasi perdesaan periode September 2014–Maret 2015 sebesar 4,40 persen.

B. Perubahan Garis Kemiskinan September 2014–Maret 2015

1. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode September 2014–Maret 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,91 persen, yaitu dari Rp312.328,- per kapita per bulan pada September 2014 menjadi Rp330.776,- per kapita per bulan pada Maret 2015. Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap GK sangat dominan, yaitu mencapai 73,23 persen pada bulan Maret 2015.
2. Pada Maret 2015, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan gula pasir. Demikian juga untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan hampir sama antara daerah perkotaan dan perdesaan, seperti perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan. Nama komoditi makanan dan bukan makanan beserta nilai kontribusinya terhadap Garis Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 16.2.

Tabel 16.2
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap
Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2015

Komoditi	Perkotaan	Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Beras	23,49	Beras	32,88
Rokok kretek filter	8,24	Rokok kretek filter	7,07
Telur ayam ras	3,59	Gula pasir	2,96
Daging ayam ras	2,95	Telur ayam ras	2,91
Mie instan	2,77	Mie instan	2,44
Gula pasir	2,04	Kopi	1,82
Roti manis/roti lainnya	1,96	Tempe	1,68
Tempe	1,89	Bawang merah	1,68
Tahu	1,80	Tahu	1,52
Kopi	1,74	Daging ayam ras	1,51
Bukan Makanan			
Perumahan	9,52	Perumahan	6,64
Bensin	3,15	Bensin	2,38
Listrik	3,02	Listrik	1,73
Pendidikan	2,46	Pendidikan	1,39
Perlengkapan mandi	1,50	Kayu bakar	1,27

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2015

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

1. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
2. Pada periode September 2014–Maret 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2014 adalah 1,75 dan pada Maret 2015 mengalami kenaikan menjadi 1,97, demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,44 menjadi 0,54 pada periode yang sama (Tabel 16.3).

Tabel 16.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
di Indonesia Menurut Daerah, September 2014–Maret 2015

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2014	1,25	2,25	1,75
Maret 2015	1,40	2,55	1,97
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
September 2014	0,31	0,57	0,44
Maret 2015	0,36	0,71	0,54

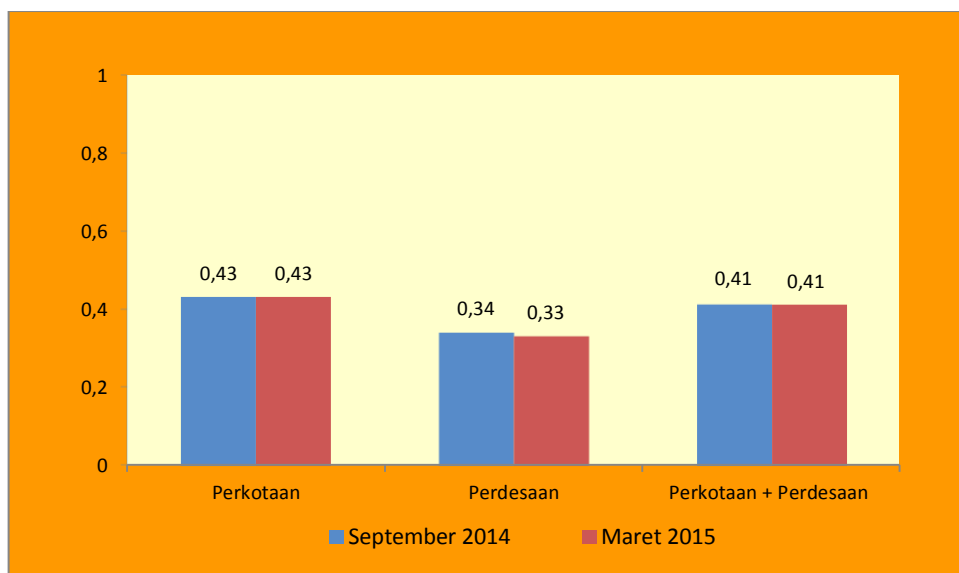
3. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,40 sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,55. Pada periode yang sama nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan adalah 0,36 sementara di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,71.

D. Perkembangan Gini Rasio September 2014–Maret 2015

1. Tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah Gini Rasio.

Gini Rasio pada Maret 2015 adalah sebesar 0,41
2. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh.
3. Pada Maret 2015, nilai Gini Rasio adalah sebesar 0,41, angka ini relatif tidak berubah apabila dibandingkan dengan kondisi September 2014. Apabila dilihat menurut daerah, maka nilai Gini Rasio untuk daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan nilai Gini Rasio di daerah perdesaan. Pada Maret 2015 nilai Gini Rasio di daerah perdesaan adalah 0,33, sementara untuk daerah perkotaan mencapai 0,43.

Grafik 16.2
Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah,
September 2014–Maret 2015



4. Provinsi dengan nilai Gini Rasio paling tinggi pada Maret 2015 adalah Provinsi Papua Barat dengan Gini Rasio sebesar 0,44, sedangkan Provinsi Maluku Utara dan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan nilai Gini Rasio paling rendah yaitu sebesar 0,28.

Tabel 16.4
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2015

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total	
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	410 414	157,57	11,13	382 117	694,01	19,44	851,58	17,08
Sumatera Utara	364 320	699,30	10,16	331 895	764,37	10,89	1 463,67	10,53
Sumatera Barat	406 335	118,03	5,73	369 753	261,58	8,35	379,61	7,31
Riau	404 802	166,45	6,79	395 659	364,94	9,46	531,39	8,42
Jambi	406 074	119,54	11,60	316 838	181,17	7,67	300,71	8,86
Sumatera Selatan	365 336	390,87	13,62	305 581	754,76	14,60	1 145,63	14,25
Bengkulu	397 489	103,13	17,79	372 171	230,94	17,93	334,07	17,88
Lampung	370 839	233,27	10,94	326 283	930,22	15,56	1 163,49	14,35
Bangka Belitung	475 478	20,13	2,98	501 532	53,96	7,75	74,09	5,40
Kepulauan Riau	454 147	89,48	5,46	420 638	32,92	10,23	122,4	6,24
DKI Jakarta	487 388	398,92	3,93	-	-	-	398,92	3,93
Jawa Barat	307 487	2 638,38	8,43	305 618	1 797,32	11,82	4 435,70	9,53
Jawa Tengah	299 011	1 837,19	11,85	296 864	2 739,85	15,05	4 577,04	13,58
DI Yogyakarta	347 787	329,65	13,43	312 249	220,57	17,85	550,22	14,91
Jawa Timur	304 918	1 524,62	8,19	305 404	3 264,50	16,18	4 789,12	12,34
Banten	344 855	408,53	5,03	318 497	293,87	7,78	702,4	5,90
Bali	332 999	109,80	4,31	304 005	86,92	5,44	196,72	4,74
Nusa Tenggara Barat	328 125	391,88	19,24	304 068	432,01	15,53	823,89	17,10
Nusa Tenggara Timur	364 920	116,16	11,28	281 022	1 043,68	25,46	1 159,84	22,61
Kalimantan Barat	334 575	82,05	5,62	318 792	301,65	9,09	383,7	8,03
Kalimantan Tengah	328 674	41,32	4,86	360 670	106,38	6,50	147,7	5,94
Kalimantan selatan	354 103	65,96	3,91	331 966	132,48	5,78	198,44	4,99
Kalimantan Timur	485 887	86,82	4,03	452 999	126,06	9,96	212,88	6,23
Kalimantan Utara	489 129	13,05	3,67	458 490	26,64	9,49	39,69	6,24
Sulawesi Utara	290 820	60,71	5,52	299 177	147,83	11,27	208,54	8,65
Sulawesi Tengah	358 399	77,97	10,93	331 855	343,66	15,90	421,63	14,66
Sulawesi Selatan	262 163	146,42	4,61	240 175	651,3	12,23	797,72	9,39
Sulawesi Tenggara	269 703	52,06	7,24	252 636	269,82	15,19	321,88	12,90
Gorontalo	263 288	25,37	6,48	263 846	181,48	24,62	206,85	18,32
Sulawesi Barat	257 004	27,39	10,52	263 110	133,09	12,87	160,48	12,40
Maluku	400 347	51,77	7,91	399 176	276,64	26,90	328,41	19,51
Maluku Utara	360 933	12,25	3,85	337 789	67,65	7,95	79,9	6,84
Papua Barat	452 022	19,34	5,86	435 207	206,03	37,97	225,37	25,82
Papua	440 697	37,27	4,61	388 095	821,88	36,66	859,15	28,17
INDONESIA	342 541	10 652,65	8,29	317 881	17 940,18	14,21	28 592,83	11,22

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2015

Tabel 16.5
Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah, September 2014–Maret 2015

Provinsi	September 2014			Maret 2015		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,38	0,28	0,34	0,37	0,29	0,33
Sumatera Utara	0,33	0,28	0,31	0,36	0,30	0,34
Sumatera Barat	0,35	0,28	0,33	0,36	0,30	0,34
Riau	0,41	0,32	0,38	0,39	0,33	0,36
Jambi	0,35	0,32	0,34	0,38	0,34	0,36
Sumatera Selatan	0,40	0,32	0,38	0,39	0,31	0,36
Bengkulu	0,38	0,33	0,36	0,41	0,35	0,38
Lampung	0,38	0,28	0,33	0,40	0,35	0,38
Bangka Belitung	0,31	0,25	0,30	0,29	0,26	0,28
Kepulauan Riau	0,43	0,31	0,44	0,36	0,29	0,36
DKI Jakarta	0,44	–	0,44	0,43	–	0,43
Jawa Barat	0,41	0,29	0,40	0,43	0,32	0,41
Jawa Tengah	0,41	0,36	0,39	0,42	0,33	0,38
DI Yogyakarta	0,44	0,38	0,43	0,44	0,33	0,43
Jawa Timur	0,43	0,34	0,40	0,44	0,34	0,42
Banten	0,43	0,29	0,42	0,41	0,27	0,40
Bali	0,45	0,34	0,44	0,38	0,33	0,38
Nusa Tenggara Barat	0,45	0,31	0,39	0,40	0,33	0,37
Nusa Tenggara Timur	0,38	0,28	0,35	0,33	0,29	0,34
Kalimantan Barat	0,42	0,36	0,40	0,35	0,30	0,33
Kalimantan Tengah	0,40	0,33	0,36	0,37	0,29	0,33
Kalimantan selatan	0,35	0,29	0,33	0,38	0,30	0,35
Kalimantan Timur	0,36	0,30	0,36	0,31	0,29	0,32
Kalimantan Utara	–	–	–	0,30	0,27	0,29
Sulawesi Utara	0,45	0,37	0,44	0,39	0,32	0,37
Sulawesi Tengah	0,41	0,28	0,35	0,43	0,33	0,37
Sulawesi Selatan	0,43	0,43	0,45	0,42	0,38	0,42
Sulawesi Tenggara	0,44	0,36	0,40	0,41	0,37	0,40
Gorontalo	0,44	0,44	0,45	0,42	0,37	0,42
Sulawesi Barat	0,43	0,34	0,38	0,39	0,35	0,36
Maluku	0,31	0,29	0,33	0,31	0,32	0,34
Maluku Utara	0,35	0,26	0,32	0,28	0,26	0,28
Papua Barat	0,37	0,35	0,41	0,34	0,48	0,44
Papua	0,40	0,38	0,46	0,34	0,38	0,42
INDONESIA	0,43	0,34	0,41	0,43	0,33	0,41

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2014 dan Maret 2015

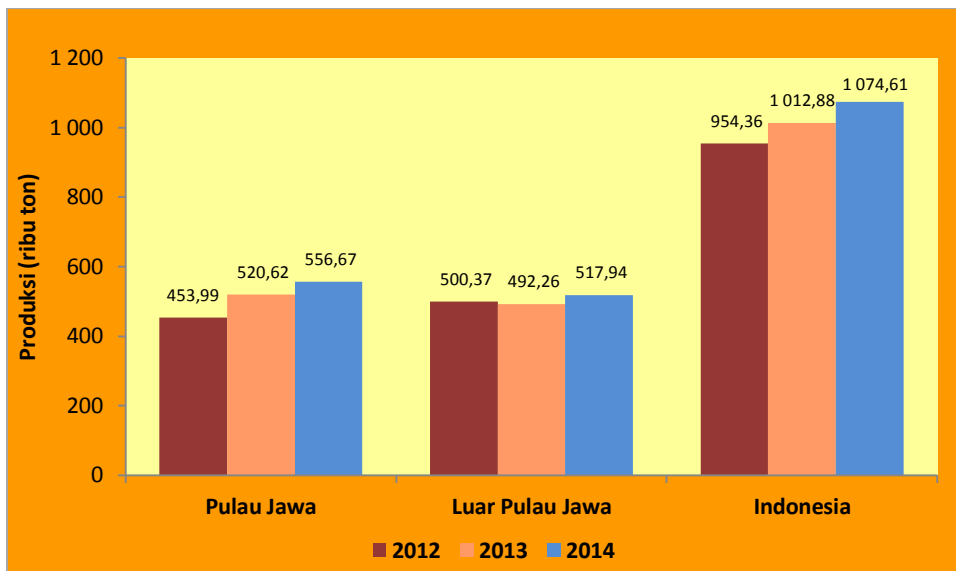
XVII. PRODUKSI HORTIKULTURA 2014

A. CABAI BESAR

1. Produksi cabai besar Indonesia tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 61,73 ribu ton (6,09 persen) dibandingkan tahun 2013. Peningkatan produksi cabai besar tahun 2014 tersebut terjadi di Pulau Jawa sebesar 36,05 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebesar 25,68 ribu ton.

Produksi cabai besar tahun 2014 sebesar 1,075 juta ton

Grafik 17.1
Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



2. Tahun 2014, persentase produksi cabai besar menurut wilayah di Pulau Jawa sebesar 51,80 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 48,20 persen. Dalam periode 2012–2014, produksi tertinggi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar 556,67 ribu ton dan 517,94 ribu ton.
3. Pada periode tahun 2013–2014, peningkatan produksi cabai besar terjadi pada setiap triwulan, yaitu triwulan I sebesar 17,97 ribu ton (6,77 persen), pada triwulan II sebesar 5,33 ribu ton (1,86 persen), triwulan III sebesar 23,11 ribu ton (9,02 persen), dan triwulan IV sebesar 15,33 ribu ton (7,51 persen).

Tabel 17.1
Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	453 990	520 616	556 671	66 626	14,68	36 055	6,93
Luar Pulau Jawa	500 373	492 263	517 940	-8 110	-1,62	25 677	5,22
Indonesia	954 363	1 012 879	1 074 611	58 516	6,13	61 732	6,09
Triwulan							
Triwulan I	264 887	265 446	283 411	559	0,21	17 965	6,77
Triwulan II	255 277	287 063	292 390	31 786	12,45	5 327	1,86
Triwulan III	235 559	256 319	279 433	20 760	8,81	23 114	9,02
Triwulan IV	198 640	204 051	219 377	5 411	2,72	15 326	7,51

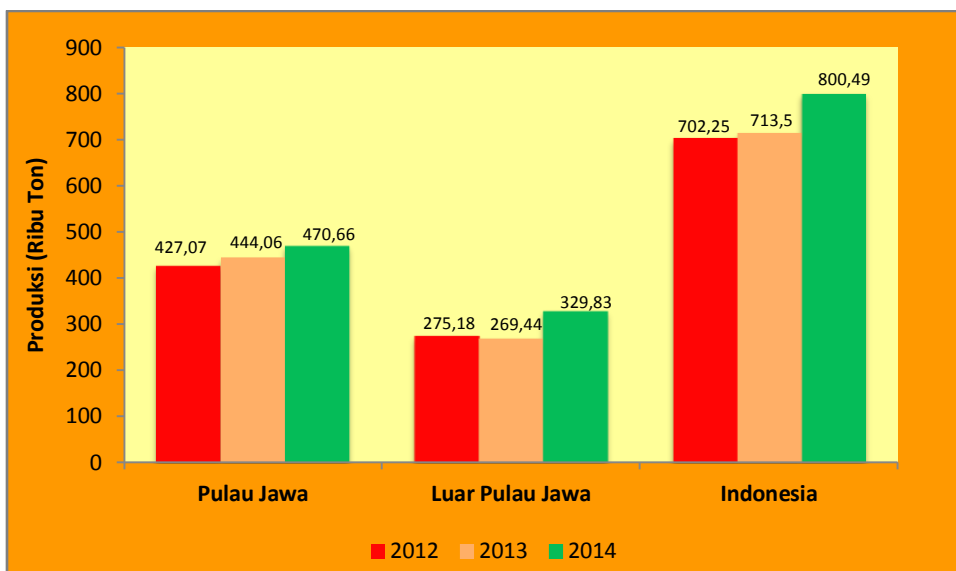
*Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai
Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau keriting*

B. CABAI RAWIT

- Produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 0,800 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 86,98 ribu ton (12,19 persen) dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi cabai rawit dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi di Pulau Jawa sebesar 26,59 ribu ton (5,99 persen) dan di luar Pulau Jawa sebesar 60,39 ribu ton (22,41 persen).
- Persentase produksi cabai rawit tahun 2014 sebesar 58,80 persen di Pulau Jawa dan 41,20 persen di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2012–2014, Pulau Jawa masih menjadi sentra produksi cabai rawit Indonesia. Produksi cabai rawit tertinggi terjadi pada tahun 2014 dibanding dua tahun sebelumnya, di Pulau Jawa sebesar 470,66 ribu ton dan di luar Pulau Jawa sebesar 329,83 ribu ton.
- Dari tahun 2013 ke tahun 2014, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 11,89 ribu ton (7,93 persen), triwulan II sebesar 36,28 ribu ton (18,77 persen), triwulan III sebesar 38,73 ribu ton (20,50 persen), dan triwulan IV sebesar 81 ton (0,04 persen).

**Produksi cabai rawit tahun
2014 sebesar 0,800 juta ton**

Grafik 17.2
Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
2012–2014



Tabel 17.2
Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2012–2013	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	427 068	444 062	470 655	16 994	3,98	26 593	5,99
Luar Pulau Jawa	275 184	269 440	329 829	-5 744	-2,09	60 389	22,41
Indonesia	702 252	713 502	800 484	11 250	1,60	86 982	12,19
Triwulan							
Triwulan I	151 785	149 858	161 749	-1 927	-1,27	11 891	7,93
Triwulan II	215 936	193 289	229 573	-22 647	-10,49	36 284	18,77
Triwulan III	186 691	188 898	227 624	2 207	1,18	38 726	20,50
Triwulan IV	147 840	181 457	181 538	33 617	22,74	81	0,04

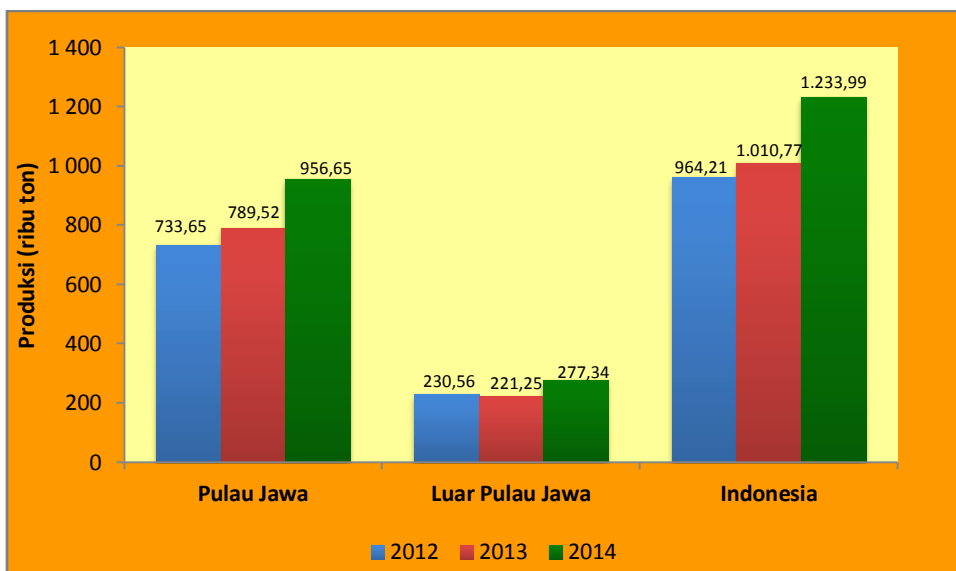
*Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai
Cabai rawit terdiri dari cabai rawit merah dan cabai rawit hijau*

C. BAWANG MERAH

1. Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 223,22 ribu ton (22,08 persen) dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan produksi tersebut disebabkan meningkatnya produksi di Pulau Jawa sebesar 167,13 ribu ton atau sebesar 21,17 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 56,08 ribu ton atau sebesar 25,35 persen.
2. Persentase produksi bawang merah Indonesia tahun 2014 menurut wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebesar 77,53 persen dan 22,47 persen. Produksi tertinggi di Pulau Jawa dicapai pada tahun 2014, dimana produksi mencapai 956,65 ribu ton. Produksi tertinggi di luar Pulau Jawa juga dicapai pada tahun 2014, dimana produksi mencapai 277,34 ribu ton.
3. Dari tahun 2013 ke tahun 2014, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 30,82 ribu ton (12,69 persen), triwulan II sebesar 85,14 ribu ton (35,81 persen), triwulan III sebesar 38,02 ribu ton (12,70 persen), dan triwulan IV sebesar 69,23 ribu ton (30,00 persen).

Produksi bawang merah tahun 2014 sebesar 1,234 juta ton

Grafik 17.3
Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 2012–2014



Tabel 17.3
Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan, 2012–2014

Uraian	2012	2013	2014	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	733 657	789 520	956 653	55 863	7,61	167 133	21,17
Luar Pulau Jawa	230 564	221 253	277 336	- 9 311	-4,04	56 083	25,35
Indonesia	964 221	1 010 773	1 233 989	46 552	4,83	223 216	22,08
Triwulan							
Triwulan I	227 560	242 929	273 753	15 369	6,75	30 824	12,69
Triwulan II	231 068	237 753	322 892	6 685	2,89	85 139	35,81
Triwulan III	300 968	299 299	337 319	-1 669	-0,55	38 020	12,70
Triwulan IV	204 625	230 792	300 025	26 167	12,79	69 233	30,00

Keterangan: Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun

XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014

A. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI TAHUN 2014

A.1 PADI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah sebesar Rp12,7 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi sawah yang terbesar adalah upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 48,23 persen dari total biaya atau sebesar Rp 6,1 juta (Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp17,2 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah sebesar Rp12,7 juta

Tabel 18.1
Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014

Uraian	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	17 174,66	-	10 249,76	-
B. Biaya Produksi	12 677,27	100,00	7 821,90	100,00
1. Bibit/Benih	406,97	3,21	282,23	3,61
2. Pupuk	1 318,60	10,40	607,27	7,76
3. Pestisida	233,96	1,85	135,33	1,73
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	6 114,71	48,23	4 877,45	62,36
5. Sewa Lahan	3 785,42	29,86	1 387,50	17,74
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	328,92	2,59	175,30	2,24
7. Bahan Bakar	86,48	0,68	70,99	0,91
8. Lainnya	402,22	3,17	285,82	3,65

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi ladang sebesar Rp7,8 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi ladang yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 62,36 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,9 juta. (Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp 10,2 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi ladang sebesar Rp 7,8 juta

A.2 JAGUNG

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman jagung yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 44,93 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta. (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp12,0 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta

Tabel 18.2
Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha
Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014

Uraian	Jagung		Kedelai	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	12 045,23	-	9 020,14	-
B. Biaya Produksi	9 140,12	100,00	9 136,50	100,00
1. Bibit/Benih	728,59	7,97	628,06	6,87
2. Pupuk	1 096,30	11,99	433,62	4,75
3. Pestisida	110,88	1,21	200,87	2,20
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	4 106,99	44,93	4 095,18	44,82
5. Sewa Lahan	2 532,35	27,71	3 255,84	35,64
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	172,50	1,89	164,69	1,80
7. Bahan Bakar	79,83	0,87	72,62	0,79
8. Lainnya	312,68	3,42	285,62	3,13

A.3 KEDELAI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman kedelai yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 44,82 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp9,0 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta

B. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN CABAI MERAH, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH, DAN JERUK TAHUN 2014

B.1 CABAI MERAH

- Total biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 47,74 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,1 juta.
- Biaya produksi tanaman cabai merah yang ditanam pada Musim Kemarau (MK) lebih tinggi dibandingkan dengan pada Musim Hujan (MH).

Tabel 18.3
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	83 935,48	–	63 692,23	–
B. Biaya Produksi	54 135,84	100,00	48 051,34	100,00
1. Benih	2 048,61	3,78	2 030,19	4,23
2. Pupuk	9 274,20	17,14	8 264,54	17,19
3. Pestisida	2 928,23	5,41	2 949,24	6,14
4. Bahan bakar	705,01	1,30	206,31	0,43
5. Jaring pelindung	51,47	0,10	22,59	0,05
6. Mulsa	3 174,66	5,86	3 426,54	7,13
7. Upah pekerja	26 257,40	48,50	22 125,04	46,05
8. Sewa lahan	5 126,78	9,47	4 837,84	10,06
9. Pengeluaran lainnya	4 569,48	8,44	4 189,05	8,72

B.2 CABAI RAWIT

- Total biaya produksi usaha tanaman cabai rawit per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp34,0 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 54,85 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp55,2 juta.
- Biaya produksi tanaman cabai rawit yang ditanam pada MK sebesar Rp37,2 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan pada MH sebesar Rp28,3 juta.

Tabel 18.4
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	63 352,41	-	40 660,34	-
B. Biaya Produksi	37 247,92	100,00	28 288,78	100,00
1. Benih	1 744,94	4,68	1 522,83	5,38
2. Pupuk	4 887,27	13,11	4 288,91	15,16
3. Pesticida	958,42	2,57	660,67	2,34
4. Bahan bakar	298,10	0,80	106,89	0,38
5. Jaring pelindung	13,90	0,04	26,34	0,09
6. Mulsa	915,26	2,46	587,71	2,08
7. Upah pekerja	20 689,82	55,54	15 061,49	53,23
8. Sewa lahan	5 263,37	14,14	4 091,63	14,47
9. Pengeluaran lainnya	2 476,84	6,66	1 942,31	6,87

B.3 BAWANG MERAH

1. Total biaya produksi usaha tanaman bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp67,2 juta. Biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,2 juta.
2. Pada tahun 2014, biaya produksi tanaman bawang merah yang ditanam pada MK (Rp64,6 juta) lebih rendah dibandingkan pada MH (Rp72,2 juta).

Tabel 18.5
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	86 575,83	-	59 833,57	-
B. Biaya Produksi	64 565,21	100,00	72 189,79	100,00
1. Benih	22 851,62	35,39	31 684,00	43,89
2. Pupuk	5 509,96	8,53	5 206,93	7,22
3. Pesticida	4 915,77	7,61	5 590,41	7,74
4. Bahan bakar	588,77	0,91	858,46	1,19
5. Jaring pelindung	27,93	0,04	23,01	0,03
6. Mulsa	571,09	0,89	599,50	0,83
7. Upah pekerja	20 185,58	31,27	20 697,02	28,68
8. Sewa lahan	6 830,34	10,58	5 180,37	7,18
9. Pengeluaran lainnya	3 084,15	4,78	2 350,09	3,24

B.4 JERUK

Total biaya produksi tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri mencapai Rp5,4 juta dan yang ditebaskan mencapai Rp5,7 juta.

Persentase biaya produksi terbesar tanaman jeruk yang dipanen sendiri adalah upah pekerja sebesar 32,07 persen (Rp1,7 juta) dan yang ditekankan adalah biaya untuk pupuk sebesar 28,41 persen (Rp1,6 juta). Nilai produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon yang dipanen sendiri dan ditekankan masing-masing sebesar Rp10,1 juta dan Rp13,0 juta.

Tabel 18.6
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditekankan 2014

Uraian	Dipanen Sendiri		Ditekankan	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	10 087,43	–	12 967,35	–
B. Biaya Produksi	5 441,21	100,00	5 666,30	100,00
1. Benih	195,35	3,59	119,65	2,11
2. Pupuk	1 078,92	19,82	1 609,97	28,41
3. Pestisida	402,93	7,41	558,95	9,86
4. Bahan bakar	52,91	0,97	117,02	2,07
5. Jaring pelindung	2,63	0,05	4,90	0,09
6. Mulsa	3,56	0,07	0,30	0,01
7. Upah pekerja	1 744,85	32,07	1 033,32	18,24
8. Sewa lahan	1 533,95	28,20	1 536,18	27,11
9. Pengeluaran lainnya	426,11	7,82	686,01	12,10

C. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN KELAPA SAWIT, KARET, DAN TEBU TAHUN 2014

Rata-rata biaya produksi usaha perkebunan tebu per hektar Setahun mencapai 77,98 persen (Rp24,2 juta) dari nilai produksi. Sementara untuk komoditas karet mencapai 71,54 persen (Rp9,2 juta) dan kelapa sawit sebesar 57,05 persen (Rp9,7 juta). Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu.

Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu

Pada usaha perkebunan kelapa sawit sebagian besar biaya digunakan untuk membayar upah tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Demikian pula untuk usaha perkebunan karet, pengeluaran terbesar untuk tenaga kerja sebesar 57,09 persen.

Pada usaha perkebunan tebu pengeluaran terbesar adalah untuk sewa lahan sebesar 32,37 persen dari seluruh total biaya. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya untuk jasa pertanian relatif cukup besar yaitu mencapai 4,74 persen.

Tabel 18.7
Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014

Subsektor	Komoditas					
	Kelapa Sawit		Karet		Tebu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. A. Nilai Produksi	17 026,01	-	12 877,97	-	31 044,66	-
B. B. Biaya Produksi	9 712,16	100,00	9 211,69	100,00	24 214,17	100,00
1. Benih/Penyisipan/Tanaman Pelindung	106,95	1,10	83,68	0,91	3 055,32	12,62
2. Pupuk	1 791,14	18,44	300,64	3,27	2 913,26	12,04
3. Stimulan	4,97	0,05	5,56	0,06	20,03	0,08
4. Pestisida	225,95	2,33	104,99	1,14	83,70	0,34
5. Tenaga Kerja	3 079,94	31,71	5 259,37	57,09	6 346,06	26,21
6. Sewa Lahan	3 008,30	30,97	2 244,74	24,37	7 838,92	32,37
7. Sewa Alat dan Sarana	231,72	2,38	183,12	1,99	259,86	1,07
8. Jasa Pertanian	156,35	1,61	48,31	0,52	1 147,87	4,74
9. Pengeluaran Lainnya	1 106,84	11,41	981,28	10,65	2 549,15	10,53

D. STRUKTUR ONGKOS USAHA SAPI POTONG, SAPI PERAH, AYAM RAS PETELUR, DAN AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2014

D.1 SAPI POTONG

1. Total biaya produksi usaha sapi potong di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp3,6 juta. Sebagian besar biaya digunakan untuk pakan Rp2,1 juta per ekor per tahun (57,78 persen) dan biaya pekerja Rp1,2 juta per ekor per tahun (33,53 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp.71 ribu per ekor per tahun dan Rp123 ribu per ekor per tahun, sedangkan sisa biaya lainnya adalah untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air.

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen)

- Dengan nilai produksi sebesar Rp4,1 juta per ekor per tahun maka usaha peternakan sapi potong mendapat keuntungan Rp523 ribu per ekor per tahun. Pada umumnya sebagian kegiatan pengusahaan sapi potong dilakukan sendiri oleh peternak dan pakan ternak tidak membeli.

Tabel 18.8
Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah 2014

Uraian	Sapi Potong		Sapi Perah	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	4 115	-	7 753	-
B. Biaya Produksi	3 592	100,00	5 596	100,00
1. Upah Pekerja	1 204	33,53	1 373	24,53
2. Pakan	2 075	57,78	3 723	66,52
Hijauan Pakan Ternak	1 662	46,27	2 007	35,86
Pakan Buatan Pabrik	45	1,24	904	16,16
Pakan Lainnya	369	10,27	812	14,50
3. Bahan Bakar Minyak	69	1,91	126	2,25
4. Listrik	18	0,50	22	0,39
5. Air	32	0,88	28	0,51
6. Pemeliharaan Kesehatan	71	1,97	77	1,37
7. Pengeluaran Lain-lain	123	3,43	248	4,43

D.2 SAPI PERAH

- Total biaya produksi usaha sapi perah di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp5,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp3,7 juta per ekor per tahun (66,52 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp1,4 juta per ekor per tahun (24,53 persen). Biaya untuk pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp77 ribu per ekor per tahun (1,37 persen) dan Rp248 ribu per ekor per tahun (4,43 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen)

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp7,8 juta per ekor per tahun, maka peternak sapi perah mendapat keuntungan Rp2,2 juta per ekor per tahun.

D.3 AYAM RAS PETELUR

1. Total biaya produksi usaha ayam ras petelur untuk 1.000 ekor dalam setahun membutuhkan Rp123,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu Rp103,3 juta per 1.000 ekor per tahun (83,58 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp12,5 juta per 1.000 ekor per tahun (10,14 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp3,1 juta per 1.000 ekor per tahun (2,47 persen) dan Rp2,7 juta per 1.000 ekor per tahun (2,15 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.
2. Dengan nilai produksi mencapai Rp146 juta per 1.000 ekor per tahun, maka peternak ayam ras petelur mendapat keuntungan Rp22,3 juta per 1.000 ekor per tahun. Produktivitas ayam ras petelur mencapai 703 butir per 1.000 ekor per hari. Dalam setahun, rata-rata periode produksi telur selama 261 hari, sedangkan rata-rata rontok bulu selama 43 hari.

Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen)

D.4 AYAM RAS PEDAGING

1. Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging untuk 5.000 ekor membutuhkan Rp113,2 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp73,2 juta per 5.000 ekor (64,69 persen) dan pembelian *Day Old Chick* (DOC) sebesar Rp21,9 juta per 5.000 ekor (19,36 persen). Selain itu, biaya untuk pekerja sebesar Rp10,8 juta per 5.000 ekor (9,57 persen), pemeliharaan kesehatan sebesar Rp2 juta per 5.000 ekor (1,81 persen), dan biaya lain-lain Rp3,7 juta per 5.000 ekor

Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen)

(3,30 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp158 juta per 5.000 ekor, peternak ayam ras pedaging mendapat keuntungan Rp44,8 juta per 5.000 ekor. Rumah tangga usaha ayam ras pedaging rata-rata memelihara 5,11 siklus setahun, dengan rata-rata lama siklus 40 hari, dan rata-rata bobot ayam per ekor 1,69 kg.

Tabel 18.9
Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014

Uraian	Ayam Ras Petelur		Ayam Ras Pedaging	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 1.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 5.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	145 970	-	158 001	-
B. Biaya Produksi	123 640	100,00	113 239	100,00
1 Upah Pekerja	12 534	10,14	10 838	9,57
2 Pakan	103 336	83,58	73 248	64,69
- Biji-bijian	18 484	14,95	620	0,55
- Pakan Buatan Pabrik	53 027	42,89	69 079	61,00
- Pakan Lainnya	31 825	25,74	3 549	3,14
3 Bahan Bakar Minyak (BBM)	885	0,72	593	0,52
4 Listrik	727	0,59	488	0,43
5 Air	438	0,35	366	0,32
6 Pemeliharaan Kesehatan	3 055	2,47	2 050	1,81
7 Pengeluaran Lain-lain	2 665	2,15	3 735	3,30
8 Pembelian <i>Day Old Chick</i> (DOC)	-	-	21 921	19,36

E. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERIKANAN TAHUN 2014**E.1 BUDIDAYA IKAN**

1. Jumlah biaya per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen), Rp4,2 juta (71,91 persen), dan Rp3,2 juta (44,16 persen) terhadap nilai produksi. Keuntungan yang diperoleh sebesar masing-masing sebesar Rp7,8 juta (51,64 persen), Rp1,6 juta (28,09 persen), dan Rp4,1 juta (55,84 persen).
2. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit yang mencapai Rp3 juta (41,33 persen), diikuti upah pekerja sebesar Rp2,5 juta (33,60 persen). Biaya terbesar usaha bandeng adalah untuk upah pekerja yang mencapai Rp965 ribu (23,21 persen) diikuti sewa lahan sebesar Rp960 ribu (23,08 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha udang windu adalah upah pekerja yang mencapai Rp796 ribu (24,73 persen) diikuti oleh biaya sewa lahan sebesar Rp758 ribu (23,56 persen).

Tabel 18.10
Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus
Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014

Uraian	Rumput Laut		Bandeng		Udang Windu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Nilai Produksi	15 182,9	-	5 784,24	-	7 290,35	-
B. Biaya Produksi	7 342,8	100,00	4 159,74	100,00	3 219,76	100,00
- Benih/Bibit	3 034,7	41,30	480,28	11,54	553,68	17,20
- Pupuk dan Obat-obatan	2,9	0,04	482,71	11,61	286,01	8,89
- Pakan	0,1	0,00	716,37	17,22	331,86	10,31
- Upah Pekerja	2 467,4	33,60	965,31	23,21	795,98	24,73
- Sewa Lahan	361,5	4,92	960,23	23,08	758,43	23,56
- Alat/Sarana Usaha	304,4	4,15	83,85	2,02	78,95	2,45
- Lainnya	1 171,8	15,96	470,99	11,32	414,70	12,88

E.2 PENANGKAPAN IKAN

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing mencapai Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen) diikuti oleh

biaya BBM masing-masing sebesar Rp876 ribu (21,21 persen) dan Rp96 ribu (21,93 persen).

Tabel 18.11
Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut
Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014

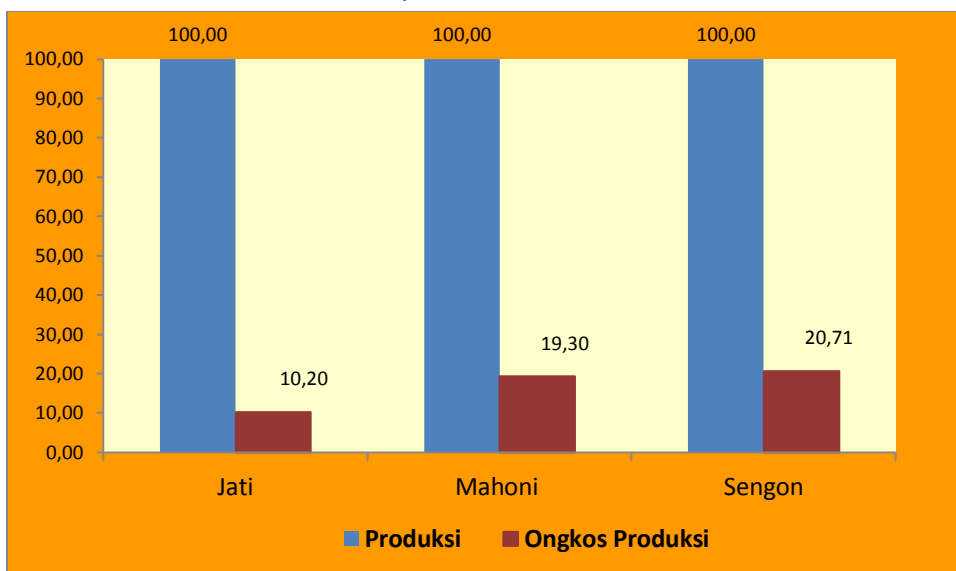
Uraian	Kapal Motor		Perahu Motor Tempel	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Produksi Hasil Penangkapan	6 211	-	813	-
B. Biaya Penangkapan	4 133	100,00	436	100,00
-Upah/gaji pekerja	1 692	40,94	177	40,47
-BBM	876	21,21	96	21,93
-Oli/Pelumas	72	1,73	13	2,93
-Garam/Es	181	4,37	15	3,55
-Perbekalan	661	15,99	64	14,58
-Sewa sarana/alat	213	5,16	19	4,28
-Pemeliharaan sarana/alat	140	3,40	14	3,15
-Penyusutan barang modal	151	3,66	16	3,74
-Biaya lainnya	146	3,53	23	5,37

F. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN JATI, MAHONI, DAN SENGON TAHUN 2014

1. Persentase ongkos produksi terhadap nilai produksi per 100 pohon untuk masing-masing tanaman jati, mahoni, dan sengon sebesar 10,20 persen, 19,30 persen, dan 20,71 persen (Gambar 18.1).
2. Pengeluaran terbesar untuk usaha tanaman kehutanan adalah untuk upah pekerja. Upah pekerja untuk usaha tanaman jati, mahoni dan sengon masing-masing sebesar 63,99 persen, 63,00 persen, dan 59,00 persen dari total pengeluaran/ongkos produksi (Tabel 18.12).

Total pengeluaran/ ongkos produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, sengon lebih dari Rp 0,5 juta

Grafik 18.1
Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014



Tabel 18.12
Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014

Uraian	Komoditas					
	Jati		Mahoni		Sengon	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Produksi	8 791,18	-	6 069,90	-	3 963,07	-
B. Ongkos Produksi	896,42	100,00	1 171,57	100,00	820,60	100,00
1. Pupuk	61,31	6,84	66,50	5,68	129,67	15,80
2. Pestisida	10,78	1,20	22,60	1,93	23,37	2,85
3. Upah Pekerja	573,63	63,99	738,13	63,00	484,17	59,00
a. Pemeliharaan/penyiangan	459,01	51,21	608,67	51,95	347,84	42,39
b. Pemupukan	35,55	3,97	50,53	4,31	76,41	9,31
c. Pengendalian OPT	7,22	0,81	21,40	1,83	15,30	1,86
d. Pemanenan/penebangan	71,84	8,01	57,53	4,91	44,61	5,44
4. Jasa Pertanian	55,58	6,20	83,09	7,09	35,33	4,31
5. Penyusutan Barang Modal	31,18	3,48	31,58	2,70	22,03	2,68
6. Sewa Alat Tanpa Operator	18,22	2,03	9,20	0,79	2,74	0,33
7. Sewa Lahan dan Bunga Modal	9,83	1,10	35,44	3,02	23,14	2,82
8. Pengeluaran Lainnya	135,90	15,16	185,04	15,79	100,15	12,20

G. KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2014

1. Jumlah rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan pada tahun 2014 sebanyak 8.643.228 rumah tangga; 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan. Dari yang menguasai lahan kawasan hutan tersebut, 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah.

Persentase rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang menguasai lahan kawasan hutan sebesar 20,39 persen

2. Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengetahui keberadaan kawasan hutan sebesar 64,80 persen dan tidak mengetahui sebesar 35,20 persen. Terjadi penurunan dari tahun 2004, hal ini dapat disebabkan karena kawasan hutan tidak semuanya berupa hutan tegakan/tumbuhan yang ada kayunya namun ada yang berupa padang savana (padang rumput) (Grafik 18.2).

Tabel 18.13
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014

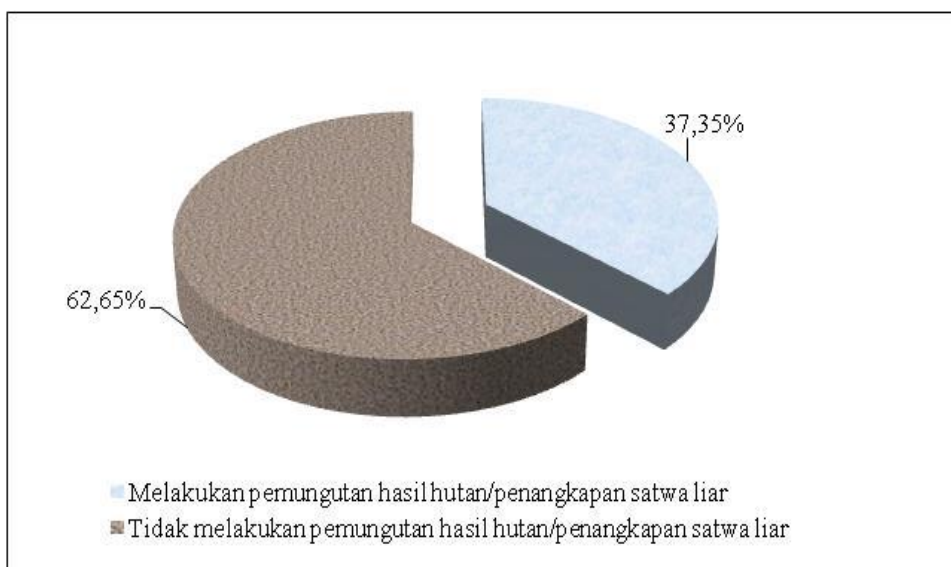
Uraian	Tahun	
	2004	2014
(1)	(2)	(3)
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan	7 804 970	8 643 228
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan berpindah	259 959	242 866
Persentase	3,33%	2,81%

Grafik 18.2
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014



3. Hutan merupakan sumber daya alam yang juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Dari hasil Survei Kehutanan 2014 (SKH 2014) rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar sebanyak 37,35 persen.

Grafik 18.3
Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014

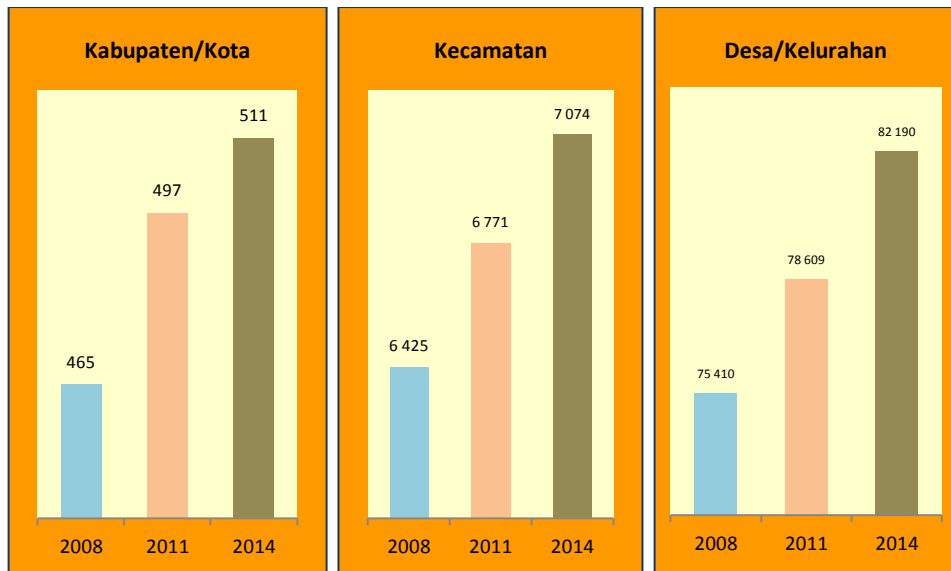


XIX. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014

A. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang didata harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah, 2) mempunyai penduduk, dan 3) mempunyai pemerintahan desa. Menurut Podes 2014, tercatat sebanyak 82.190 wilayah setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa⁵, 8.412 kelurahan, dan 69 UPT. Selain itu, juga tercatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Grafik 19.1
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014



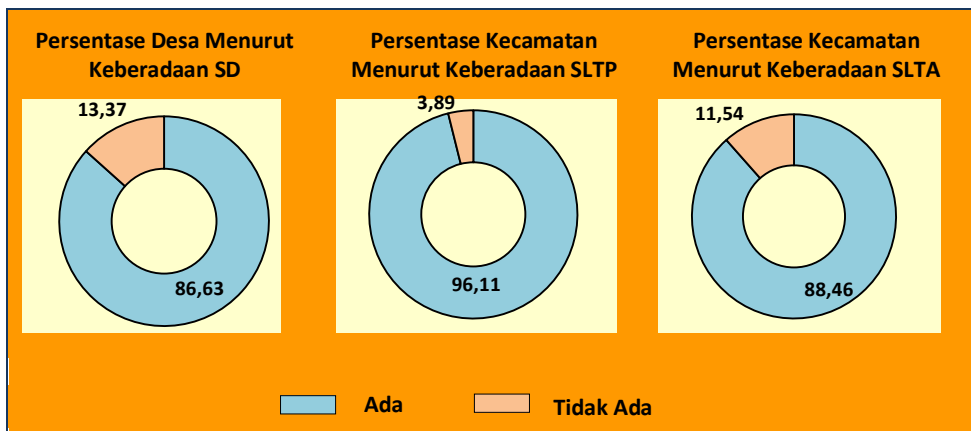
⁵ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

B. Infrastruktur

B.1 Pendidikan

1. Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa 86,63 persen desa/kelurahan mempunyai sarana SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah). Hanya 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) yang tidak mempunyai SD. Untuk desa/kelurahan tanpa SD, 2.438 desa/kelurahan (22,19 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SD terdekat lebih dari 3 km.
2. Sarana pendidikan SLTP telah ada di 6.799 kecamatan (96,11 persen). Sehingga, masih terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) yang tidak ada SLTP. Untuk kecamatan tanpa SLTP, sebanyak 184 kecamatan (66,91 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTP terdekat lebih dari 6 km.
3. Sarana pendidikan SLTA telah ada di 88,46 persen kecamatan. Sehingga, masih terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) yang tidak ada SLTA. Untuk kecamatan tanpa SLTA, sebanyak 508 kecamatan (62,33 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTA terdekat lebih dari 6 km.

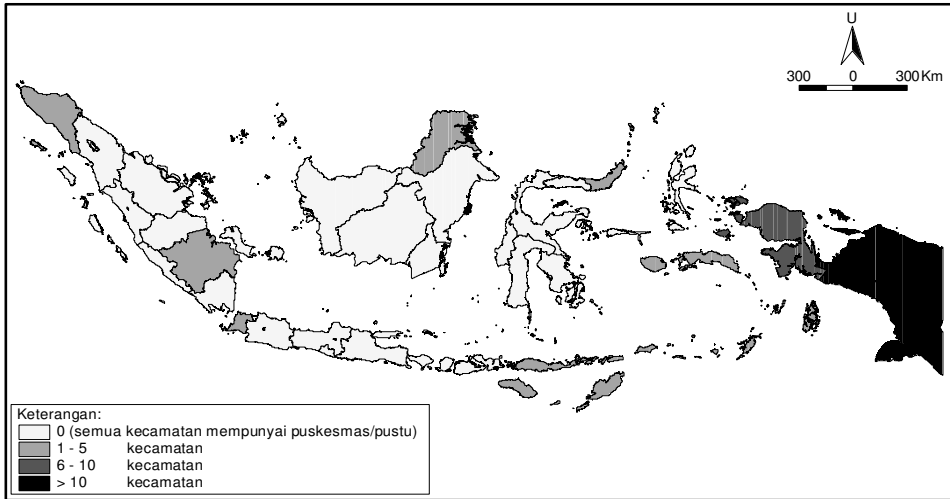
Grafik 19.2
Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014



B.2 Kesehatan

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar merupakan hak masyarakat yang menjadi pelayanan publik pemerintah. Podes 2014 menunjukkan bahwa 6.957 kecamatan (98,35 persen) telah mempunyai Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu). Sebanyak 117 kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas/Pustu tersebar di 9 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Lihat Lampiran 5.

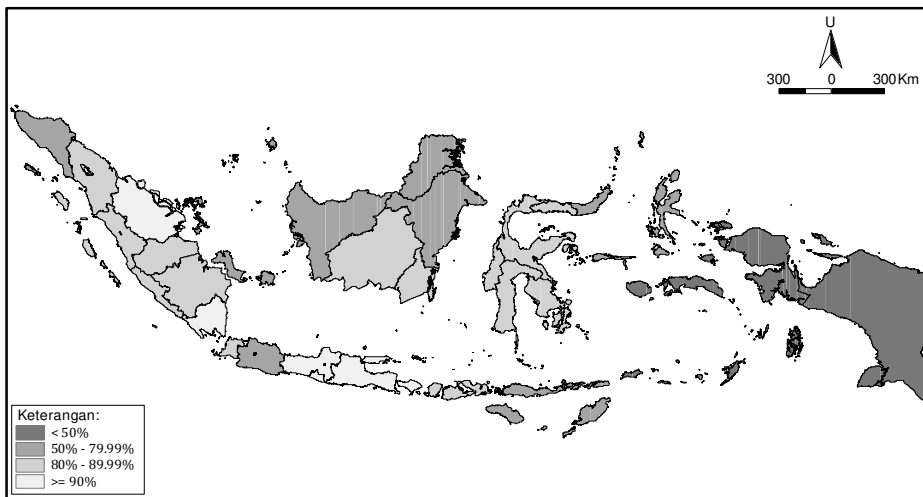
Grafik 19.3
Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014



B.3 Pasar dengan Bangunan

Tersedianya pasar di suatu wilayah menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian wilayah tersebut. Podes 2014 mencatat sebanyak 15.340 desa/kelurahan (18,66 persen) di 5.579 kecamatan, ternyata sudah ada pasar dengan bangunan (permanen atau semi permanen). Masih terdapat 1.495 kecamatan (21,13 persen) yang tidak ada pasar dengan bangunan. Lihat Lampiran 7.

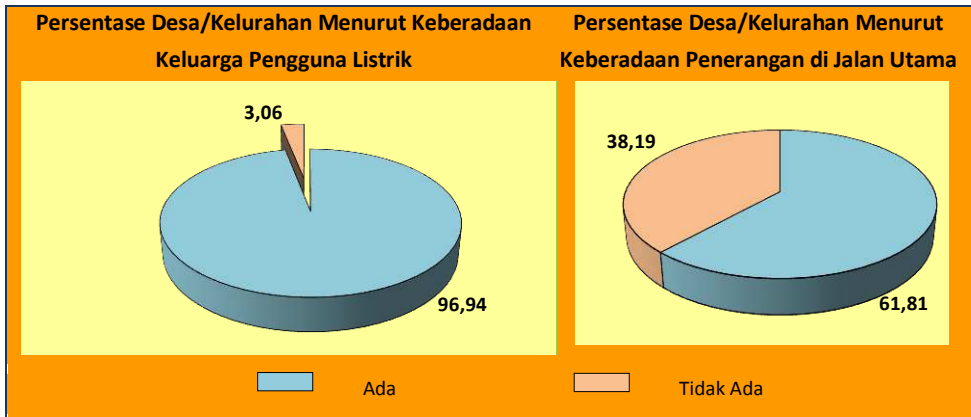
Grafik 19.4
Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014



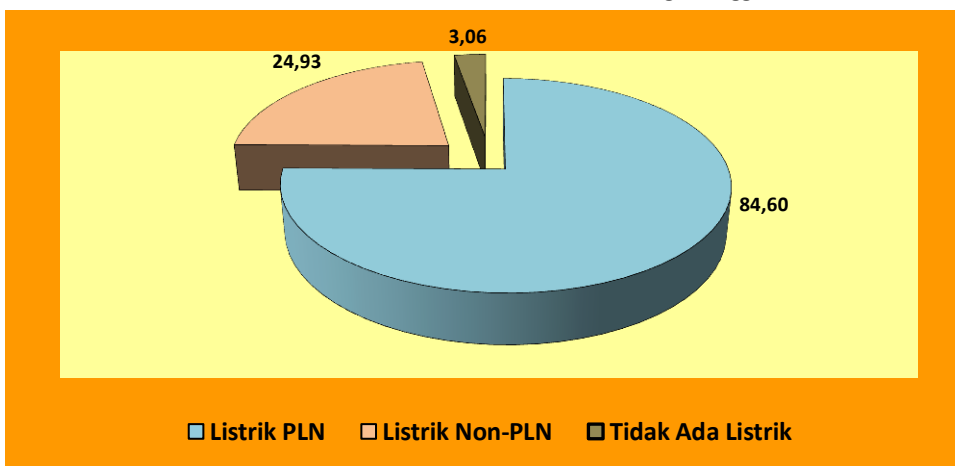
B.4 Listrik

1. Ketersediaan energi listrik sangat penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 69.531 desa/kelurahan (84,60 persen) telah ada keluarga pengguna listrik PLN. Selain itu, ada 4 provinsi yang seluruh desa/kelurahannya yang sudah ada keluarga pengguna listrik PLN. Keempat provinsi tersebut, yaitu: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Lihat Lampiran 6.
2. Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) belum tersedia penerangan di jalan utama desa/kelurahan. Papua dan Nusa Tenggara Timur adalah dua provinsi dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang tidak ada penerangan di jalan utama (diatas 90 persen).

Grafik 19.5
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama



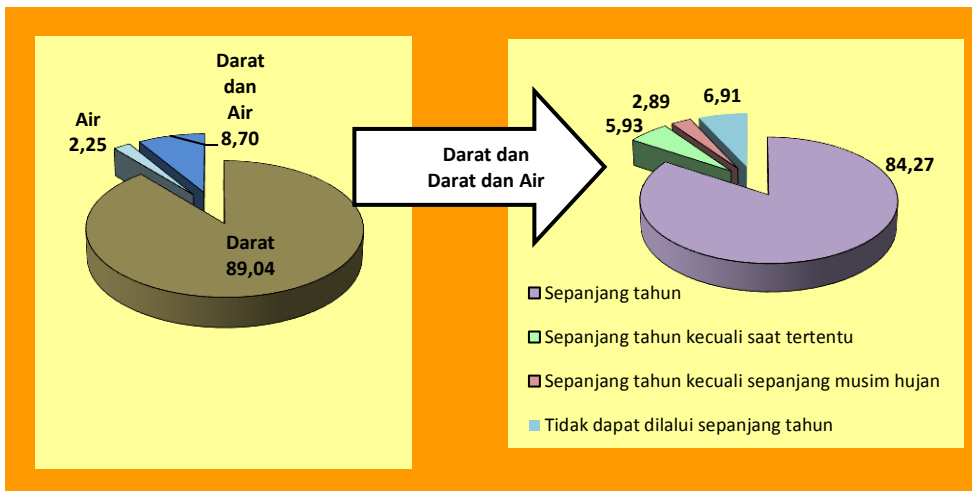
Grafik 19.6
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik



B.5 Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan jalan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 80.337 desa/kelurahan yang menggunakan sarana transportasi darat, dimana 67.701 desa/kelurahan (84,27 persen) diantaranya sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sebaliknya, masih ada 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) yang lalu-lintasnya bergantung pada kondisi jalan dan musim. Lihat Lampiran 8.

Grafik 19.7
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih



C. Desa/Kelurahan Terdepan

Desa/kelurahan terdepan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain. Menurut Podes 2014, sebanyak 258 desa/kelurahan yang letaknya terdepan, berbatasan darat secara langsung dengan wilayah negara lain. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terdepan sebanyak 191.043 jiwa. Ke-256 desa/kelurahan tersebut berada di 67 kecamatan, 17 kabupaten, dan 5 provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua.

Tabel 19.1

Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan			
		Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
				Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa Tenggara Timur	4	17	62	78 443
2	Kalimantan Barat	5	14	65	68 606
3	Kalimantan Timur	1	1	1	513
4	Kalimantan Utara	2	13	81	26 504
5	Papua	5	22	49	16 977
	Indonesia	17	67	258	191 043

D. Desa/Kelurahan Terluar

Desa/kelurahan terluar adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada di pulau kecil terluar. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 mencantumkan sebanyak 92 pulau kecil terluar. Podes 2014 mencatat ada sebanyak 313 desa/kelurahan yang wilayahnya berada di dalam 77 pulau dari 92 pulau kecil terluar. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terluar sebanyak 375.883 jiwa. Sementara itu, ada 15 pulau kecil terluar yang bukan bagian dari wilayah suatu desa/kelurahan atau tanpa penduduk. Ke-15 pulau tersebut adalah Pulau Mega (Bengkulu); Pulau Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan (Jawa Timur); Pulau Manuk (Jawa Barat); Pulau Batek (Nusa Tenggara Timur); Pulau Gosong Makasar (Kalimantan Utara); Pulau Sambit (Kalimantan Timur); Pulau Batarkusu dan Pulau Meatimjarang (Maluku); Pulau Jiew (Maluku Utara); Pulau Budd, Pulau Fani, dan Pulau Miossu (Papua Barat); dan Pulau Laag (Papua). Secara lengkap, berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan terluar menurut provinsi.

Tabel 19.2
Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Pulau Kecil Terluar		Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar			
		Menurut PP No 78 Tahun 2005	Ada Wilayah Desa/Kelurahan (Podes 2014)	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	6	6	4	6	6	2 925
2	Sumatera Utara	3	3	3	3	8	4 077
3	Sumatera Barat	2	2	1	2	2	5 714
4	Riau	1	1	1	1	1	5 994
5	Bengkulu	2	1	1	1	6	3 001
6	Lampung	1	1	1	1	1	1 761
7	Kepulauan Riau	19	19	5	11	17	19 194
8	Jawa Barat	1	-	-	-	-	-
9	Jawa Tengah	1	1	1	2	2	21 831
10	Jawa Timur	3	-	-	-	-	-
11	Banten	1	1	1	1	1	6 194
12	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	1	12 357
13	Nusa Tenggara Timur	5	4	4	14	123	150 027
14	Kalimantan Timur	2	1	1	1	4	3 677
15	Kalimantan Utara	2	1	1	5	19	37 734
16	Sulawesi Utara	11	11	5	7	18	8 484
17	Sulawesi Tengah	3	3	1	3	3	5 392
18	Maluku	18	16	3	15	72	71 134
19	Maluku Utara	1	-	-	-	-	-
20	Papua Barat	3	-	-	-	-	-
21	Papua	6	5	3	6	29	16 387
Indonesia		92	77	37	80	313	375 883

E. Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG)

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.
2. Tabel 19.3. menyajikan IKG setiap provinsi. IKG terendah sebesar 6,83 di desa Sudagaran (Jawa Tengah) dan IKG tertinggi sebesar 97,89 di desa Dorera (Papua). Nilai tengah IKG desa secara nasional adalah sebesar 40,91.

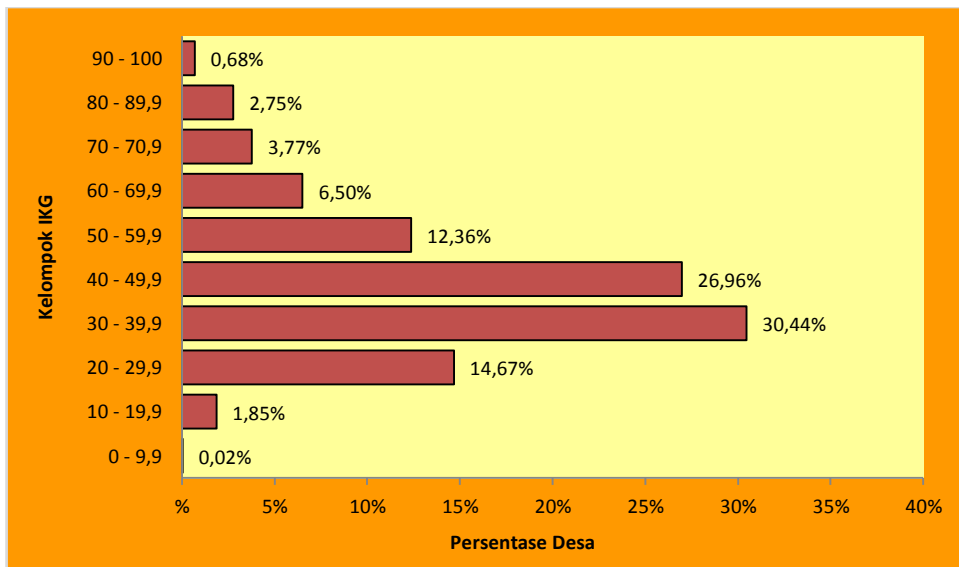
Tabel 19.3
IKG Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,10	44,65	79,90
Sumatera Utara	10,17	42,31	86,58
Sumatera Barat	12,51	33,19	87,49
Riau	14,38	40,24	77,64
Jambi	14,83	39,96	77,84
Sumatera Selatan	12,05	42,38	78,24
Bengkulu	16,66	42,65	80,55
Lampung	11,71	40,51	77,95
Kep. Bangka Belitung	15,95	34,17	70,04
Kepulauan Riau	18,28	45,60	77,64
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	9,42	32,58	82,37
Jawa Tengah	6,83	34,27	64,10
DI Yogyakarta	9,96	27,73	48,17
Jawa Timur	9,03	35,23	67,36
Banten	13,99	39,79	70,72
Bali	8,79	30,20	58,60
Nusa Tenggara Barat	16,41	35,69	67,96
Nusa Tenggara Timur	20,21	49,87	80,77
Kalimantan Barat	10,47	51,10	84,83
Kalimantan Tengah	16,42	46,94	90,52
Kalimantan Selatan	16,75	40,98	85,77

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalimantan Timur	14,78	42,61	90,20
Kalimantan Utara	19,82	59,47	87,98
Sulawesi Utara	9,54	40,21	75,81
Sulawesi Tengah	16,93	42,70	84,79
Sulawesi Selatan	14,44	36,95	80,11
Sulawesi Tenggara	19,09	48,52	79,59
Gorontalo	12,57	39,05	67,98
Sulawesi Barat	17,74	46,18	84,58
Maluku	15,11	51,91	88,24
Maluku Utara	14,33	51,69	85,20
Papua Barat	18,42	65,43	96,02
Papua	17,05	76,33	97,89

3. Jika dibedakan berdasarkan 10 kelompok, maka lebih dari 50 persen (57,40 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG antara 30 sampai dengan 50. Sementara itu, kurang dari 10 persen (7,20 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG di atas 70.

Grafik 19.8
Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014



Lampiran 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23	289	6 512
Sumatera Utara	33	440	6 104
Sumatera Barat	19	179	1 145
Riau	12	164	1 835
Jambi	11	138	1 551
Sumatera Selatan	17	231	3 237
Bengkulu	10	127	1 532
Lampung	15	225	2 632
Kep Bangka Belitung	7	47	381
Kepulauan Riau	7	66	415
DKI Jakarta	6	44	267
Jawa Barat	27	626	5 962
Jawa Tengah	35	573	8 578
DI Yogyakarta	5	78	438
Jawa Timur	38	664	8 502
Banten	8	155	1 551
Bali	9	57	716
Nusa Tenggara Barat	10	116	1 141
Nusa Tenggara Timur	22	306	3 270
Kalimantan Barat	14	176	2 109
Kalimantan Tengah	14	136	1 569
Kalimantan Selatan	13	152	2 008
Kalimantan Timur	10	103	1 026
Kalimantan Utara	5	50	479
Sulawesi Utara	15	167	1 836
Sulawesi Tengah	13	172	1 986
Sulawesi Selatan	24	306	3 030
Sulawesi Tenggara	14	209	2 272
Gorontalo	6	77	736
Sulawesi Barat	6	69	648
Maluku	11	113	1 088
Maluku Utara	10	115	1 196
Papua Barat	13	175	1 567
Papua	29	529	4 871
INDONESIA	511	7 074	82 190

Lampiran 2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Desa	Kelurahan	UPT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6 510	-	2	6 512
Sumatera Utara	5 406	695	3	6 104
Sumatera Barat	886	259	-	1 145
Riau	1 603	232	-	1 835
Jambi	1 389	162	-	1 551
Sumatera Selatan	2 851	385	1	3 237
Bengkulu	1 356	172	4	1 532
Lampung	2 423	206	3	2 632
Kep.Bangka Belitung	309	72	-	381
Kepulauan Riau	272	143	-	415
DKI Jakarta	-	267	-	267
Jawa Barat	5 321	641	-	5 962
Jawa Tengah	7 809	769	-	8 578
DI Yogyakarta	392	46	-	438
Jawa Timur	7 721	781	-	8 502
Banten	1 237	314	-	1 551
Bali	636	80	-	716
Nusa Tenggara Barat	995	142	4	1 141
Nusa Tenggara Timur	2 951	319	-	3 270
Kalimantan Barat	2 009	99	1	2 109
Kalimantan Tengah	1 427	138	4	1 569
Kalimantan Selatan	1 864	144	-	2 008
Kalimantan Timur	836	190	-	1 026
Kalimantan Utara	444	35	-	479
Sulawesi Utara	1 505	331	-	1 836
Sulawesi Tengah	1 809	174	3	1 986
Sulawesi Selatan	2 240	783	7	3 030
Sulawesi Tenggara	1 891	371	10	2 272
Gorontalo	657	72	7	736
Sulawesi Barat	575	71	2	648
Maluku	1 050	33	5	1 088
Maluku Utara	1 066	117	13	1 196
Papua Barat	1 492	75	-	1 567
Papua	4 777	94	-	4 871
INDONESIA	73 709	8 412	69	82 190

Lampiran 3. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada SD dan Kecamatan yang Ada SLTP dan SLTA Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Desa/Kelurahan yang Ada SD	Kecamatan yang Ada SLTP	Kecamatan yang Ada SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3 358	289	281
Sumatera Utara	4 957	439	414
Sumatera Barat	1 100	179	170
Riau	1 779	164	164
Jambi	1 457	137	133
Sumatera Selatan	2 938	231	225
Bengkulu	1 180	126	108
Lampung	2 499	225	218
Kep.Bangka Belitung	375	47	45
Kepulauan Riau	390	66	61
DKI Jakarta	264	44	44
Jawa Barat	5 949	626	606
Jawa Tengah	8 461	573	552
DI Yogyakarta	438	78	76
Jawa Timur	8 450	664	648
Banten	1 543	155	154
Bali	709	57	56
Nusa Tenggara Barat	1 130	116	114
Nusa Tenggara Timur	3 129	306	257
Kalimantan Barat	2 028	176	164
Kalimantan Tengah	1 540	136	131
Kalimantan Selatan	1 869	152	141
Kalimantan Timur	970	103	103
Kalimantan Utara	299	50	43
Sulawesi Utara	1 537	167	147
Sulawesi Tengah	1 882	171	153
Sulawesi Selatan	2 929	306	282
Sulawesi Tenggara	1 837	208	199
Gorontalo	658	76	67
Sulawesi Barat	627	69	68
Maluku	1 017	113	108
Maluku Utara	1 092	115	114
Papua Barat	835	144	72
Papua	1 979	291	140
INDONESIA	71 205	6 799	6 258

Lampiran 4. Jumlah Wilayah yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Jarak ke Sarana Pendidikan Terdekat dan Provinsi, 2014

Provinsi	Jumlah Desa/ Kelurahan Tidak Ada SD	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Jarak ke SD > 3 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTP	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTP > 6 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTA	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTA > 6 km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3 154	162	-	-	8	-
Sumatera Utara	1 147	132	1	-	26	9
Sumatera Barat	45	-	-	-	9	5
Riau	56	4	-	-	-	-
Jambi	94	5	1	-	5	3
Sumatera Selatan	299	19	-	-	6	-
Bengkulu	352	18	1	-	19	3
Lampung	133	9	-	-	7	2
Kep.Bangka Belitung	6	1	-	-	2	2
Kepulauan Riau	25	2	-	-	5	2
DKI Jakarta	3	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13	3	-	-	20	2
Jawa Tengah	117	2	-	-	21	2
DI Yogyakarta	-	-	-	-	2	-
Jawa Timur	52	-	-	-	16	5
Banten	8	-	-	-	1	1
Bali	7	-	-	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	11	-	-	-	2	2
Nusa Tenggara Timur	141	12	-	-	49	23
Kalimantan Barat	81	24	-	-	12	10
Kalimantan Tengah	29	13	-	-	5	4
Kalimantan Selatan	139	5	-	-	11	3
Kalimantan Timur	56	14	-	-	-	-
Kalimantan Utara	180	28	-	-	7	6
Sulawesi Utara	299	9	-	-	20	6
Sulawesi Tengah	104	11	1	-	19	9
Sulawesi Selatan	101	3	-	-	24	7
Sulawesi Tenggara	435	31	1	-	10	5
Gorontalo	78	3	1	-	10	3
Sulawesi Barat	21	2	-	-	1	1
Maluku	71	9	-	-	5	5
Maluku Utara	104	5	-	-	1	1
Papua Barat	732	233	31	20	103	81
Papua	2 892	1 679	238	164	389	306
INDONESIA	10 985	2 438	275	184	816	508

Lampiran 5. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	288	99,65
Sumatera Utara	440	100,00
Sumatera Barat	179	100,00
Riau	164	100,00
Jambi	138	100,00
Sumatera Selatan	230	99,57
Bengkulu	127	100,00
Lampung	225	100,00
Kep. Bangka Belitung	47	100,00
Kepulauan Riau	66	100,00
DKI Jakarta	44	100,00
Jawa Barat	626	100,00
Jawa Tengah	573	100,00
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	664	100,00
Banten	154	99,35
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	116	100,00
Nusa Tenggara Timur	303	99,02
Kalimantan Barat	176	100,00
Kalimantan Tengah	136	100,00
Kalimantan Selatan	152	100,00
Kalimantan Timur	103	100,00
Kalimantan Utara	49	98,00
Sulawesi Utara	163	97,60
Sulawesi Tengah	172	100,00
Sulawesi Selatan	306	100,00
Sulawesi Tenggara	209	100,00
Gorontalo	77	100,00
Sulawesi Barat	69	100,00
Maluku	112	99,12
Maluku Utara	115	100,00
Papua Barat	166	94,86
Papua	433	81,85
INDONESIA	6 957	98,35

Lampiran 6. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik		Ada Penerangan Di Jalan Utama
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6 427	296	3 663
Sumatera Utara	5 543	1 475	3 662
Sumatera Barat	1 099	350	862
Riau	1 301	1 194	1 036
Jambi	1 339	613	784
Sumatera Selatan	2 886	1 123	2 086
Bengkulu	1 470	244	693
Lampung	2 402	779	1 701
Kep. Bangka Belitung	377	153	307
Kepulauan Riau	294	293	257
DKI Jakarta	267	2	264
Jawa Barat	5 960	257	5 064
Jawa Tengah	8 566	115	8 330
DI Yogyakarta	438	9	428
Jawa Timur	8 457	291	8 055
Banten	1 551	34	950
Bali	716	20	700
Nusa Tenggara Barat	1 114	122	840
Nusa Tenggara Timur	2 624	1 694	298
Kalimantan Barat	1 380	1 239	521
Kalimantan Tengah	838	1 079	421
Kalimantan Selatan	1 903	401	1 634
Kalimantan Timur	647	662	462
Kalimantan Utara	180	380	133
Sulawesi Utara	1 789	258	1 132
Sulawesi Tengah	1 601	897	1 257
Sulawesi Selatan	2 777	734	2 165
Sulawesi Tenggara	1 786	896	785
Gorontalo	690	298	534
Sulawesi Barat	403	440	184
Maluku	654	540	366
Maluku Utara	785	598	453
Papua Barat	443	914	364
Papua	824	2 093	412
INDONESIA	69 531	20 493	50 803

Lampiran 7. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kecamatan yang Ada Pasar Dengan Bangunan	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	227	78,55
Sumatera Utara	367	83,41
Sumatera Barat	161	89,94
Riau	157	95,73
Jambi	117	84,78
Sumatera Selatan	203	87,88
Bengkulu	109	85,83
Lampung	208	92,44
Kep. Bangka Belitung	37	78,72
Kepulauan Riau	37	56,06
DKI Jakarta	41	93,18
Jawa Barat	469	74,92
Jawa Tengah	560	97,73
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	639	96,23
Banten	124	80,00
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	93	80,17
Nusa Tenggara Timur	244	79,74
Kalimantan Barat	104	59,09
Kalimantan Tengah	109	80,15
Kalimantan Selatan	133	87,50
Kalimantan Timur	78	75,73
Kalimantan Utara	25	50,00
Sulawesi Utara	109	65,27
Sulawesi Tengah	151	87,79
Sulawesi Selatan	271	88,56
Sulawesi Tenggara	188	89,95
Gorontalo	68	88,31
Sulawesi Barat	61	88,41
Maluku	54	47,79
Maluku Utara	58	50,43
Papua Barat	58	33,14
Papua	184	34,78
INDONESIA	5 579	78,87

Lampiran 8. Jumlah Desa/Kelurahan yang Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan Melalui Darat atau Darat dan Air Menurut Kondisi Jalan dan Provinsi, 2014

Provinsi	Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih				Total
	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu	Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan	Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5 742	445	241	71	6 499
Sumatera Utara	5 004	344	307	422	6 077
Sumatera Barat	1 068	34	15	22	1 139
Riau	1 279	170	107	237	1 793
Jambi	1 311	114	49	73	1 547
Sumatera Selatan	2 652	288	168	98	3 206
Bengkulu	1 381	85	56	5	1 527
Lampung	2 261	239	89	40	2 629
Kep. Bangka Belitung	370	2	4	2	378
Kepulauan Riau	295	12	5	29	341
DKI Jakarta	259	2	-	2	263
Jawa Barat	5 761	118	77	6	5 962
Jawa Tengah	8 448	78	46	4	8 576
DI Yogyakarta	436	2	-	-	438
Jawa Timur	8 356	87	45	13	8 501
Banten	1 472	42	28	4	1 546
Bali	709	3	4	-	716
Nusa Tenggara Barat	1 073	47	13	6	1 139
Nusa Tenggara Timu	2 608	383	189	63	3 243
Kalimantan Barat	1 123	448	161	270	2 002
Kalimantan Tengah	804	314	123	158	1 399
Kalimantan Selatan	1 698	118	22	146	1 984
Kalimantan Timur	741	158	44	44	987
Kalimantan Utara	238	98	32	49	417
Sulawesi Utara	1 717	37	5	51	1 810
Sulawesi Tengah	1 674	86	30	144	1 934
Sulawesi Selatan	2 686	143	79	75	2 983
Sulawesi Tenggara	1 937	150	67	83	2 237
Gorontalo	669	37	12	17	735
Sulawesi Barat	468	67	45	65	645
Maluku	556	97	39	256	948
Maluku Utara	736	108	46	154	1 044
Papua Barat	867	98	49	285	1 299
Papua	1 302	309	124	2658	4 393
INDONESIA	67 701	4 763	2 321	5 552	80 337

XX. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH AGUSTUS 2015

A. Dolar Amerika (USD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) rupiah terhadap dolar Amerika, selama periode akhir Juli hingga Agustus 2015 cenderung terdepresiasi di 34 provinsi di Indonesia. Level terendah nilai tukar (kurs tengah) rupiah pada minggu terakhir Juli 2015 tercatat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp13.555,50 sementara pada minggu terakhir Agustus 2015 terjadi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Rp14.139,58 per dolar AS. Sedangkan untuk level tertinggi, nilai tukar pada minggu terakhir Juli 2015 terjadi di Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai tengah sebesar Rp13.271,00 per dolar AS dan pada minggu terakhir Agustus 2015 terjadi di Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai tengah Rp13.873,00 per dolar AS.
2. Memasuki Agustus 2015, jika dibandingkan dengan minggu terakhir Juli 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata di 34 provinsi melemah 47,29 poin atau 0,35 persen. Sebagian besar provinsi mengalami depresiasi. Depresiasi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 170,00 poin atau 1,27 persen.
3. Pada minggu terakhir Agustus 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata di 34 provinsi melemah 629,32 poin atau sekitar 4,69 persen, dibanding kurs pada minggu terakhir Juli 2015. Pelemahan rupiah terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Barat yang terdepresiasi sebesar 750,00 poin atau 5,62 persen. Sebaliknya, depresiasi terendah terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 317,50 poin atau 2,34 persen. Pada minggu ini seluruh provinsi mengalami depresiasi.

Rupiah terdepresiasi 629,32 poin atau 4,69 persen terhadap dolar Amerika di Agustus 2015. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Barat.

B. Dolar Australia (AUD)

1. Kurs rupiah terhadap dolar Australia cenderung terdepresiasi selama Agustus 2015 jika dibanding dengan minggu terakhir Juli 2015. Rata-rata kurs rupiah di 34 provinsi terdepresiasi sebesar 45,89 poin di minggu pertama atau melemah sebesar 0,47 persen. Depresiasi juga terjadi di minggu terakhir Agustus 2015, yaitu sebesar 198,60 poin atau 2,02 persen dibanding minggu terakhir Juli 2015.
2. Level terendah nilai tukar (kurs tengah) rupiah terhadap dolar Australia pada minggu terakhir Juli 2015 terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar Rp10.059,50, sementara pada minggu terakhir Agustus 2015 terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp10.172,00 per dolar Australia. Di sisi lain, level tertinggi nilai tukar terhadap dolar Australia pada minggu terakhir Juli 2015 tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebesar Rp9.624,00 per dolar Australia, dan pada minggu terakhir Agustus 2015 tercatat di Provinsi Lampung, yaitu sebesar Rp9.922,50 per dolar Australia.
3. Pada minggu pertama Agustus 2015, pelemahan rupiah yang terbesar terhadap dolar Australia terjadi di Provinsi Aceh yaitu sebesar 150,00 poin atau terdepresiasi sebesar 1,54 persen dibanding minggu terakhir Juli 2015. Sebaliknya, penguatan rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 143,50 poin atau terapresiasi sebesar 1,43 persen. Pada minggu terakhir Agustus 2015, pelemahan rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu terdepresiasi sebesar 330,00 poin atau melemah sebesar 3,43 persen dibanding minggu terakhir Juli 2015. Hampir seluruh provinsi mencatat nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Australia kecuali Provinsi Gorontalo yang mencatat apresiasi sebesar 41,25 poin atau menguat sebesar 0,41 persen.

Rupiah terdepresiasi 198,60 poin atau 2,02 persen terhadap dolar Australia di Agustus 2015. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Yen Jepang (JPY)

1. Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada minggu pertama Agustus 2015 secara rata-rata di 34 provinsi menguat 0,12 poin atau 0,11 persen. Penguatan tertinggi pada minggu pertama Agustus 2015 terjadi di Provinsi Gorontalo, yaitu 1,13 poin atau 1,03 persen. Sebaliknya, pada minggu terakhir Agustus 2015 secara rata-rata tercatat melemah 8,35 poin atau 7,71 persen dibanding minggu terakhir Juli 2015. Depresiasi terbesar pada minggu terakhir Agustus 2015 tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 10,00 poin atau melemah 9,85 persen.
2. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap mata uang yen Jepang pada minggu terakhir Juli 2015 tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp109,67 per yen Jepang dan level tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp101,50 per yen Jepang. Sedangkan pada minggu terakhir Agustus 2015, level terendah tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp119,19 per yen Jepang dan level tertingginya terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp111,50 per yen Jepang.

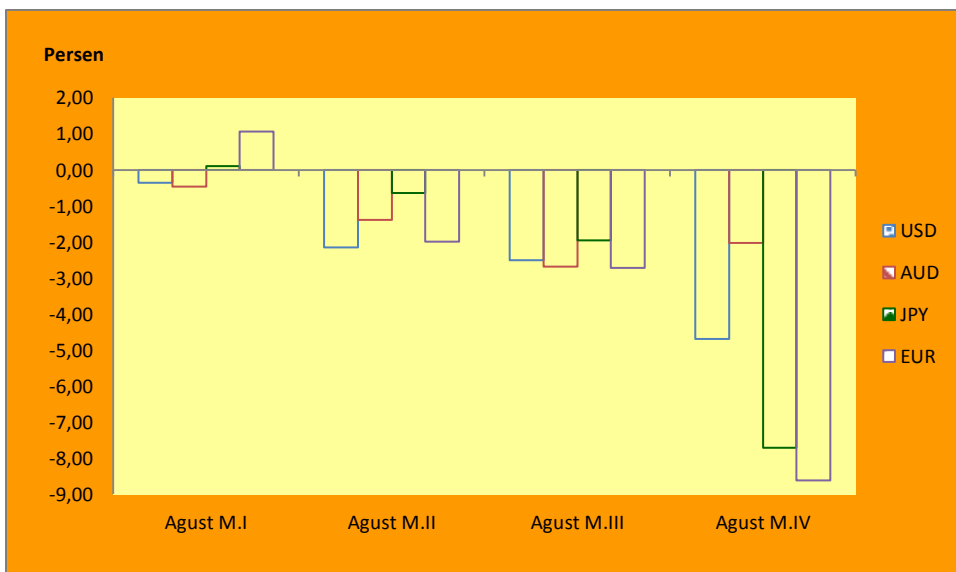
Rupiah terdepresiasi 8,35 poin atau 7,71 persen terhadap yen Jepang di Agustus 2015. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Euro (EUR)

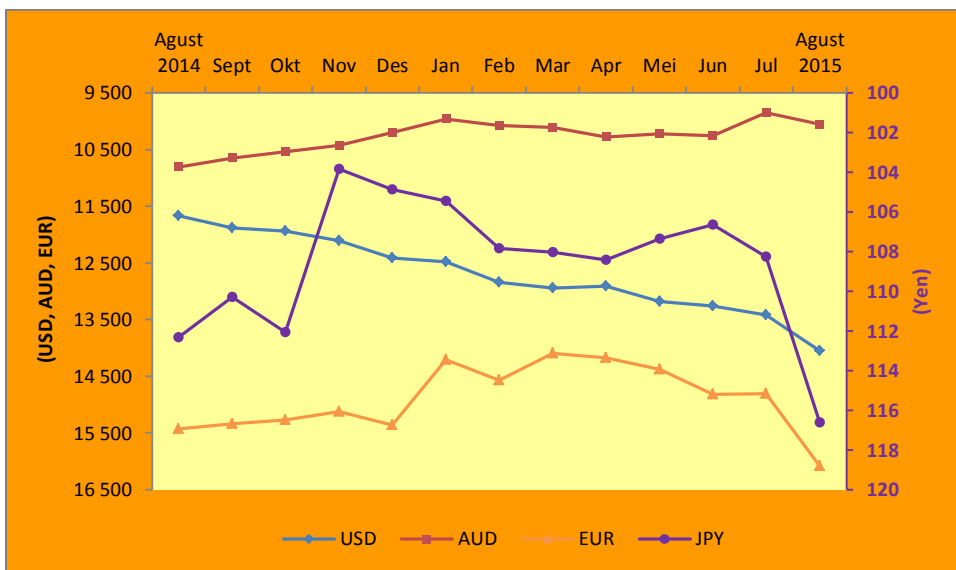
1. Selama Agustus 2015 terjadi fluktuasi kurs rupiah terhadap euro jika dibanding dengan minggu terakhir Juli 2015. Secara rata-rata di 34 provinsi, rupiah terapresiasi sebesar 157,99 poin di minggu pertama atau menguat sebesar 1,07 persen dan sebaliknya terdepresiasi sebesar 1.274,67 poin di minggu terakhir atau melemah sebesar 8,61 persen dibanding minggu terakhir Juli 2015.
2. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap euro (kurs tengah), pada minggu terakhir Juli 2015 maupun pada minggu terakhir Agustus 2015 berturut-turut terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Rp14.943,00 dan Rp16.315,00 per euro. Sementara itu, level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap euro tercatat di Provinsi Maluku sebesar Rp14.009,00 per euro pada minggu terakhir Juli 2015 dan sebesar Rp14.912,50 per euro pada minggu terakhir Agustus 2015.
3. Pada minggu pertama Agustus 2015, nilai tukar rupiah mengalami penguatan terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 645,75 poin atau 4,35 persen. Sebaliknya, pelemahan terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat yang mencapai 52,50 poin atau 0,36 persen. Pada minggu terakhir Agustus 2015, seluruh provinsi mengalami depresiasi. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 1.468,00 poin atau 9,92 persen. Sebaliknya, depresiasi terkecil terjadi di Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai 556,00 poin atau 3,74 persen.

Rupiah terdepresiasi 1.274,67 poin atau 8,61 persen terhadap euro di Agustus 2015. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Grafik 20.1
Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
(Agustus dibanding Juli M.V)



Grafik 20.2
Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
(Minggu Terakhir)



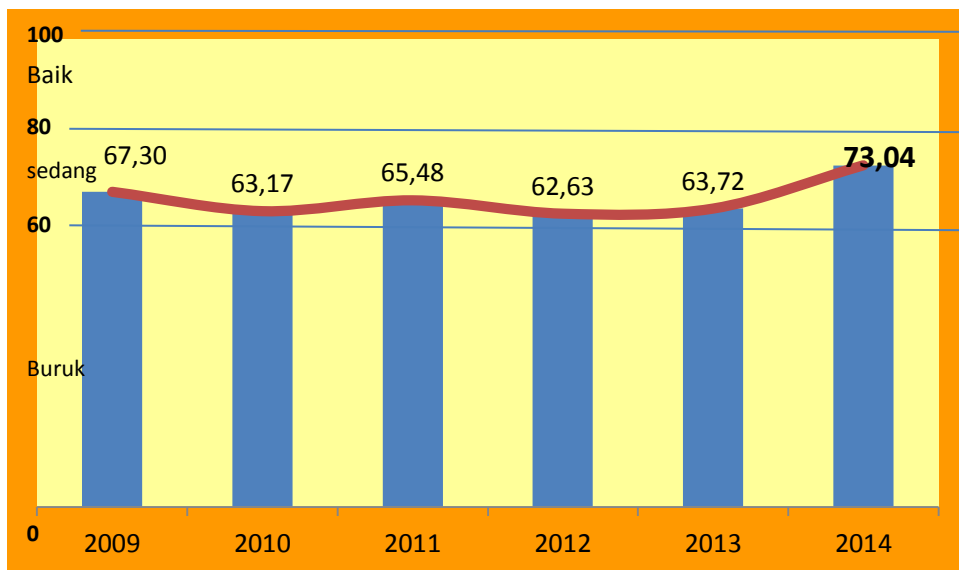
XXI. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2014

A. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Nasional 2014

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional 2014 mencapai **73,04** dalam skala indeks 0 sampai 100. Berarti naik **9,32** poin dibandingkan dengan IDI 2013 yang capaiannya sebesar 63,72. Berdasarkan tingkat demokrasi yang dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni: “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60), maka meskipun mengalami peningkatan cukup bermakna, tingkat demokrasi Indonesia secara tersebut masih dalam kategori “sedang”. Namun capaian ini sudah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 yang dipatok sebesar 73,00 (grafik 21.1)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional 2014 sebesar 73,04 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 9,32 poin dibandingkan dengan IDI 2013 sebesar 63,72

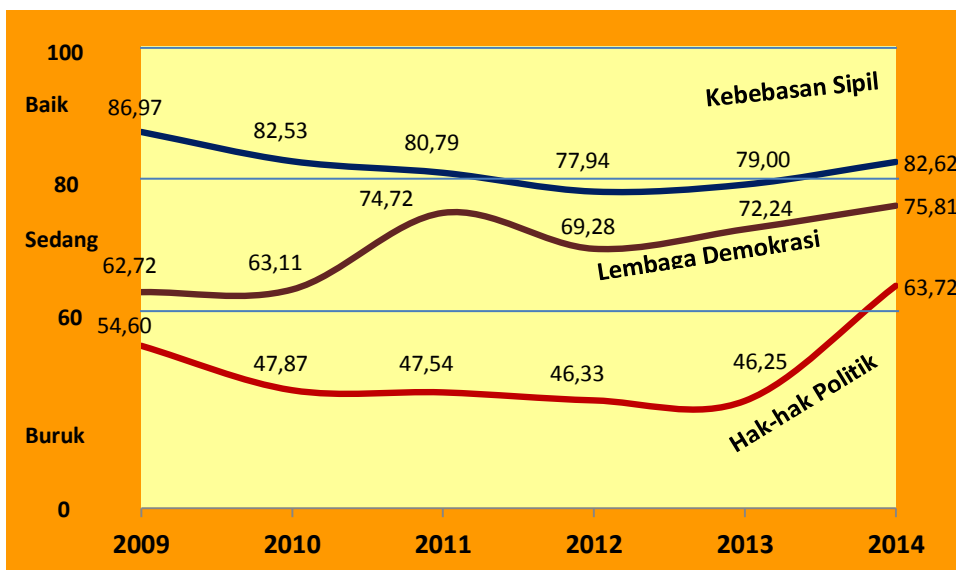
Grafik 21.1
Perkembangan IDI Nasional Tahun 2009–2014



2. Kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*) yang naik 3,62 poin dari 79,00 pada 2013 menjadi 82,62 pada 2014, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) yang naik 17,67 poin dari 46,25 pada 2013

menjadi 63,72 pada 2014, dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) yang naik 3,57 poin dari 72,24 pada 2013 menjadi 75,81 pada 2014.

Grafik 21.2
Perkembangan Indeks Aspek, 2009–2014

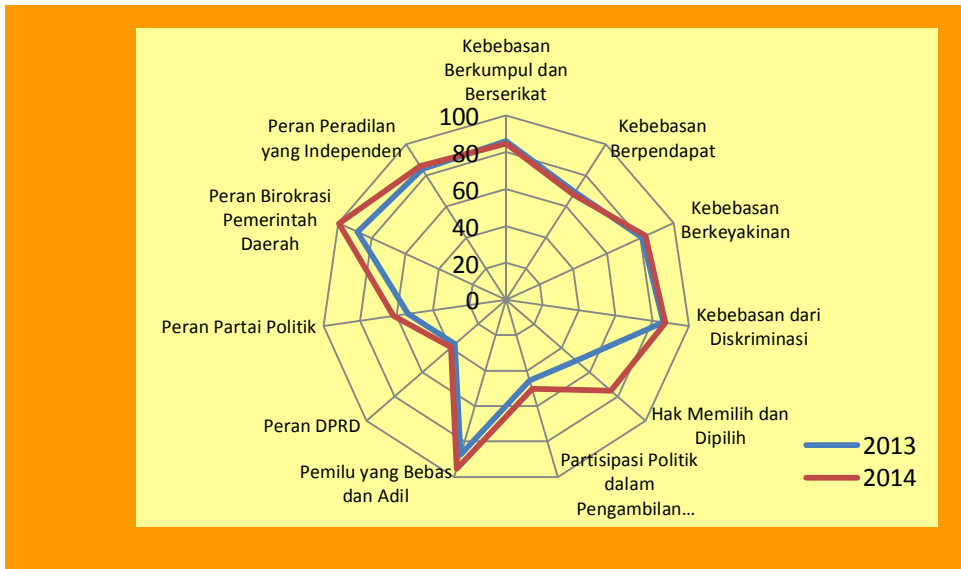


3. Dari sisi indeks variabel IDI 2014 terdapat sembilan variabel yang mengalami peningkatan indeks dan dua variabel mengalami penurunan. Dari sembilan variabel yang mengalami kenaikan, empat diantaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar terjadi

Terdapat 9 variabel yang mengalami peningkatan pada IDI 2014

pada indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih. Pada Grafik 21.3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2013 dengan plot tahun 2014, memperlihatkan variabel Hak Memilih dan Dipilih meningkat tajam, dari kategori buruk menjadi sedang, dari 50,31 pada 2013 menjadi 75,27 pada 2014.

Grafik 21.3
Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional, 2013–2014



4. Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, lalu variabel Peran Partai Politik, dan variabel Pemilu yang Bebas dan Adil. Selebihnya berubah tidak cukup bermakna meskipun naik atau turun. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat juga dilihat pada Tabel 21.1.

Tabel 21.1
Perkembangan Skor Variabel, 2013–2014

No	Nama Variabel	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	86,06	84,62
2	Kebebasan Berpendapat	69,15	67,76
3	Kebebasan Berkeyakinan	81,13	83,22
4	Kebebasan dari Diskriminasi	86,22	87,02
5	Hak Memilih dan Dipilih	50,31	75,27
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	45,61	50,28
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	87,67	95,36
8	Peran DPRD	36,62	39,51
9	Peran Partai Politik	53,51	61,76
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	88,58	99,38
11	Peran Peradilan yang Independen	83,94	86,29

5. Pada IDI 2014 terdapat 16 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 27 dan 28 (lihat tabel 17.2 perkembangan skor indikator 2013 dan 2014). Namun, masih terdapat masalah kronis (kinerja demokrasi buruk yakni merupakan indikator yang memiliki skor di bawah 60) yang ditunjukkan melalui indikator 15, 16, 20, 21, 22, dan 23. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah (15) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, (16) Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, (20) Alokasi Anggaran Pendidikan/kesehatan, (21) Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, (22) Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, dan (23) Kegiatan Kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

Pada 2014, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan melalui indikator 15, 16, 20, 21, 22, dan 23

Tabel 21.2
Perkembangan Skor Indikator 2013 dan 2014

No	Indikator	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kebebasan Sipil		
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	85,76	83,03
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	88,18	95,76
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	73,54	68,89
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	47,27	62,12
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	82,35	81,95
6	Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	78,18	81,44
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	78,18	89,39
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	80,81	80,30
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	86,97	91,29
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	92,02	91,41
	Hak-Hak Politik		
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	84,52	95,75
12	Ketersediaan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	50,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	74,64
14	Voters turnout	73,82	75,26
15	Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	54,84	53,26
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	18,71	23,73
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	72,51	76,83

No	Indikator	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Lembaga Demokrasi			
18	Keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu	91,46	98,90
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	83,89	91,83
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	48,59	49,91
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	20,60	23,27
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	7,36	16,02
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	50,00	58,74
24	Perempuan pengurus partai politik	85,13	88,95
25	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol	92,04	99,90
26	Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu	85,12	98,85
27	Keputusan hakim yang kontroversial	92,73	88,03
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	75,15	84,55

B. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi 2014

1. Data IDI 2014 menunjukkan seluruh provinsi mengalami perubahan nilai indeks. Terdapat 4 provinsi yang mengalami kenaikan kategori dari kinerja demokrasi sedang menjadi baik (nilai indeks diatas 80 poin) yakni pertama, DKI Jakarta yang naik dari 71,18 pada 2013 menjadi 84,70 pada 2014. Kedua, DI Yogyakarta yang naik dari 72,36 pada 2013 menjadi 82,71 pada 2014. Ketiga, Kalimantan Barat yang naik dari 67,51 pada 2013 menjadi 80,58 pada 2014 dan Keempat, Sulawesi Utara yang naik dari 73,11 pada 2013 menjadi 83,94 pada 2014. Sementara itu pada 2014 sebanyak 29 provinsi berada dalam kinerja demokrasi sedang (nilai indeks antara 60–80 poin).

Tabel 21.3
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2013–2014

Provinsi	IDI 2013				IDI 2014			
	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	63,56	71,78	48,59	76,97	72,29	69,76	63,94	88,73
Sumatera Utara	58,80	73,65	49,50	54,90	68,02	79,86	61,97	62,75
Sumatera Barat	54,11	54,88	38,97	77,17	63,99	47,21	61,82	88,56
Riau	68,37	77,71	52,19	82,32	68,40	74,35	59,74	74,69
Jambi	64,41	84,95	41,91	74,34	71,15	78,23	54,01	89,48
Sumatera Selatan	67,12	91,45	50,32	63,22	74,82	86,09	63,57	78,53
Bengkulu	59,17	71,57	49,28	59,28	71,70	79,49	63,98	74,16
Lampung	63,13	70,75	45,47	81,58	71,62	72,06	63,69	83,66
Kep. Bangka Belitung	68,79	85,16	50,60	77,09	75,32	89,80	56,48	87,01
Kepulauan Riau	66,50	80,08	49,63	76,21	68,39	82,47	58,35	66,61
DKI Jakarta	71,18	88,72	55,08	74,69	84,70	91,72	73,94	92,97
Jawa Barat	65,18	79,84	46,74	76,05	71,52	83,95	65,22	65,89
Jawa Tengah	60,84	79,18	46,29	60,89	77,44	87,87	67,08	80,77
D.I.Yogyakarta	72,36	90,78	50,65	83,69	82,71	86,25	76,07	88,82
Jawa Timur	59,32	71,37	35,43	82,10	70,36	81,62	56,29	78,54
Banten	69,79	81,39	51,03	85,00	75,50	81,10	63,68	87,22

Provinsi	IDI 2013				IDI 2014			
	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bali	72,22	92,55	52,87	77,38	76,13	92,16	61,27	79,56
Nusa Tenggara Barat	57,22	59,68	49,60	66,24	62,62	58,73	62,08	68,38
Nusa Tenggara Timur	73,29	95,59	58,83	68,23	68,81	85,92	65,13	53,12
Kalimantan Barat	67,52	97,54	49,36	58,61	80,58	98,44	63,12	85,84
Kalimantan Tengah	64,15	81,89	50,69	63,21	79,00	92,93	66,42	81,48
Kalimantan Selatan	63,71	58,03	56,35	82,54	70,84	58,43	76,45	77,53
Kalimantan Timur	68,13	92,14	55,36	58,20	77,77	93,28	70,42	69,94
Sulawesi Utara	73,11	92,44	62,55	65,56	83,94	93,56	80,89	76,68
Sulawesi Tengah	64,50	90,03	36,78	76,44	74,36	86,56	59,01	83,42
Sulawesi Selatan	65,20	81,30	50,62	68,10	75,30	86,27	73,99	63,58
Sulawesi Tenggara	52,61	84,32	28,95	50,32	70,13	90,89	53,20	70,92
Gorontalo	67,21	79,31	58,26	66,22	73,82	82,19	63,67	79,41
Sulawesi Barat	64,02	88,51	44,05	64,94	76,69	90,22	63,64	80,39
Maluku	66,23	81,52	50,53	71,95	72,72	90,85	60,03	70,09
Maluku Utara	64,06	83,67	48,94	63,40	67,90	76,90	60,61	68,16
Papua Barat	60,70	92,33	35,93	60,26	65,65	97,93	39,29	66,93
Papua	60,92	90,21	31,37	71,01	62,15	85,69	42,51	63,75
Indonesia	63,72	79,00	46,25	72,24	73,04	82,62	63,72	75,81

XXII. SUPLEMEN: METODOLOGI

1. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebaliknya, perubahan negatif IHK disebut deflasi. IHK tersebut dihitung dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres*.

Bahan dasar penyusunan diagram timbang (bobot) IHK adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH) atau *Cost of Living Survey*. SBH diadakan 5 (lima) tahun sekali, SBH terakhir diadakan tahun 2012, mencakup 136,080 rumah tangga di Indonesia yang dipantau baik pengeluaran konsumsinya maupun jenis barang/jasa yang dikonsumsi selama setahun penuh.

Berdasarkan hasil SBH diperoleh paket komoditas yang representatif, dapat dipantau harganya, dan selalu tersedia di pasaran. Paket komoditas nasional sebanyak 859 barang/jasa, bertambah dari 774 barang/jasa pada paket komoditas tahun 2007. Hal ini sejalan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Bobot awal setiap barang/jasa merupakan persentase nilai konsumsi setiap barang/jasa terhadap total rata-rata nilai konsumsi per rumah tangga per bulan, berdasarkan hasil SBH. Sejak Januari 2014, penghitungan inflasi mulai menggunakan tahun dasar 2012 (sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007) berdasarkan hasil SBH 2012. Cakupan kota bertambah dari 66 menjadi 82 kota.

Jumlah barang/jasa yang dicakup bervariasi antarkota, yang terkecil di Kota Singaraja sebanyak 225 barang/jasa, sedangkan yang terbanyak di Jakarta sebanyak 462 barang/jasa. Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Inflasi umum (*headline inflation*)

Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

a. Inflasi inti (*core inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasa inti sebanyak 751, antara lain: kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

b. Inflasi yang harganya diatur pemerintah (*administered prices inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya secara umum diatur oleh pemerintah. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasanya sebanyak 23, antara lain: bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

c. Inflasi bergejolak (*volatile goods*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2012, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditas sebanyak 85, antara lain : beras, minyak goreng, cabai, daging ayam ras, dan sebagainya.

Responden

Harga dari paket komoditas dikumpulkan/dicatat setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu, atau setiap bulan dari pedagang atau pemberi jasa eceran. Mereka termasuk yang berada di pasar tradisional, pasar modern, dan outlet mandiri (seperti toko eceran, praktek dokter, restoran siap saji, bengkel, rumah tangga yang mempunyai pembantu, dan sebagainya),

2. Produk Domestik Bruto

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (produk) akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDB atas dasar harga berlaku (nominal PDB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDB adalah (1) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari proses produksi setiap lapangan usaha/aktivitas ekonomi, (2) pendekatan pendapatan, menghitung semua komponen nilai tambah, dan (3) pendekatan pengeluaran, menghitung semua komponen pengeluaran PDB. Secara teoritis, ketiga pendekatan ini akan menghasilkan nilai PDB yang sama.

3. Ekspor-Impor

Data Nonmigas diperoleh dari KPPBC (Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai), data Migas dari KPPBC, Pertamina dan BP Migas, Sistem pencatatan statistik ekspor menggunakan *General Trade* (semua barang yang keluar dari Daerah Pabean Indonesia tanpa kecuali dicatat), sedangkan impor pada awalnya menggunakan *Special Trade* (dicatat dari Daerah Pabean Indonesia kecuali Kawasan Berikat yang dianggap sebagai “luar negeri”), namun sejak bulan Januari 2008 sistem pencatatan statistik impor juga menggunakan *General Trade*, Sistem pengolahan data menggunakan sistem *carry over* (dokumen ditunggu selama satu bulan setelah transaksi, apabila terlambat dimasukkan pada pengolahan bulan berikutnya),

Data ekspor-impor yang disajikan pada bulan terakhir merupakan angka sementara

4. Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi, Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Data dasar perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 adalah data penduduk hasil SP2010. Penghitungan proyeksi penduduk ini dilakukan dengan menggunakan program RUP (*Rural Urban Projection*).

Penghitungan proyeksi penduduk mempertimbangkan perapihan umur, dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan yang ada dalam data. Penentuan asumsi merupakan proses yang paling penting, mencakup asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Asumsi kelahiran dibuat berdasarkan tren tingkat kelahiran di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan berhubungan dengan tingkat kelahiran di masa mendatang. Asumsi tingkat kematian dibuat berdasarkan tren tingkat kematian di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan terkait dengan kesehatan. Asumsi migrasi, untuk proyeksi nasional menyangkut migrasi internasional (melintasi batas negara) masih dianggap nol, yaitu seimbang antara yang keluar dan masuk. Sedangkan untuk proyeksi provinsi diperhitungkan migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi.

Proyeksi penduduk Indonesia dibangun dengan dasar kesepakatan dari berbagai pihak baik kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan pakar kependudukan.

Hasil proyeksi ini digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi kinerja pemerintah.

5. Ketenagakerjaan

Data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pengumpulan data berbasis sampel, dengan pendekatan rumah tangga. Estimasi ketenagakerjaan Februari 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk, sedangkan Februari–Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk yang digunakan pada Februari 2014

Definisi yang digunakan antara lain:

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

Setengah Penganggur (*Underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

Pekerja Paruh Waktu (*Part time worker*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Pengangguran Terbuka (*Unemployment*), adalah mereka yang tidak bekerja tetapi berharap mendapatkan pekerjaan, yang terdiri dari mereka yang mencari

pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

6. Upah Buruh

Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh, Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan upah nominal buruh tani dan upah buruh industri menggunakan rata-rata tertimbang, sedangkan upah nominal buruh bangunan menggunakan rata-rata hitung biasa.

Pengumpulan data upah buruh tani dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dengan responden petani, Data upah buruh bangunan diperoleh dari Survei Harga Konsumen Perkotaan dengan responden buruh bangunan, Sedangkan data upah buruh industri dikumpulkan melalui Survei Upah Buruh dengan responden perusahaan Industri besar dan sedang.

Survei Harga Perdesaan dilaksanakan di 32 provinsi, sedangkan Survei Harga Konsumen Perkotaan dilaksanakan di 66 kota, Sedangkan Survei Upah Buruh dilaksanakan di 33 provinsi.

7. Nilai Tukar Petani (NTP) 2012=100

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Indeks harga yang diterima petani (I_t) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani (I_b) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

NTP dihitung dengan menggunakan formula:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Formula atau rumus yang digunakan dalam penghitungan I_t dan I_b adalah formula Indeks Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres Indices*). Pengumpulan data harga untuk penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dan Survei Konsumen Perdesaan, dengan cakupan 33 provinsi di Indonesia yang meliputi lima subsektor, yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Responden Survei Harga Perdesaan adalah petani produsen, sedangkan responden Survei Harga Konsumen Perdesaan adalah pedagang di pasar perdesaan.

NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (I_t) terhadap indeks harga yang dibayar petani (I_b), dimana komponen I_b hanya terdiri dari BPPBM. Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani (I_b), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

8. Harga Produsen Gabah dan Beras di Penggilingan

Harga di Tingkat Petani adalah harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen.

Harga di Tingkat Penggilingan adalah harga di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga minimal yang harus dibayarkan pihak penggilingan kepada petani sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah. Penetapan harga dilakukan secara kolektif antara Departemen Pertanian, Menko Bidang Perekonomian, dan Bulog.

Gabah Kering Panen (GKP) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 10,0 persen.

Gabah Kering Giling (GKG) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen.

Gabah Kualitas Rendah adalah gabah yang mengandung kadar air minimum dari 25,0 persen dan hampa/kotoran minimum 10,0 persen.

Survei Monitoring Harga Gabah dilaksanakan di 25 provinsi di Indonesia yang meliputi 158 kabupaten terpilih (sampel). Dari masing-masing kabupaten terpilih diambil tiga kecamatan tetap dan satu kecamatan tidak tetap. Responden adalah petani produsen yang melakukan transaksi penjualan gabah. Pencatatan harga dilaksanakan setiap bulan, tetapi saat panen raya (Maret s.d. Mei dan Agustus)

pencatatan harga dilakukan setiap minggu. Panen dengan sistem tebasan tidak termasuk dalam pencatatan ini.

Beras Kualitas Premium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) maksimum 10 persen.

Beras Kualitas Medium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 10,1-20 persen.

Beras Kualitas Rendah adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 20,1 - 25 persen.

Survei harga produsen beras di tingkat penggilingan dilakukan di 26 provinsi. Responden survei harga produsen beras di penggilingan adalah unit penggilingan di tingkat kecamatan yang memiliki kapasitas giling cukup besar dan dianggap representatif. Jumlah sampel survei tersebut sebanyak 478 penggilingan, dengan periode survei dilakukan setiap bulan.

9. A. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen (IHP) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi (PDB/PDRB), distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya.

Sesuai dengan *Manual Producer Price Index (PPI)*, penghitungan IHP yang ideal dirancang menurut tingkatan produksi-*Stage of Production (SoP)*, yakni *preliminary demand* (produk awal), *intermediate demand* (produk antara), dan *final demand* (produk akhir). Namun IHP (2010=100) yang disajikan BPS baru mencakup *final demand* (produk akhir).

IHP dihitung menggunakan formula *Laspeyres* yang dimodifikasi, dengan tahun dasar 2010=100. Hal ini berkaitan dengan sumber data yang digunakan untuk menyusun diagram timbang yaitu Tabel Input-Output 2010 Updating. Data IHP tersebut disajikan BPS secara triwulanan, dan baru sampai tingkat/level nasional dalam bentuk indeks gabungan, indeks sektor dan indeks subsektor.

Harga yang digunakan untuk menghitung IHP bersumber dari Survei Harga Produsen dan data sekunder. Pengumpulan harga dilakukan setiap bulan (tanggal 1-15). Pemilihan responden dilakukan secara *purposive*, sedangkan pemilihan komoditas menggunakan kriteria *cut off point*. Pengelompokan komoditas dalam IHP didasarkan pada Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI).

Mulai tahun 2014, pengumpulan data Survei Harga Produsen mengalami perluasan cakupan yaitu Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman. Pengumpulan data dilakukan setiap bulan, tanggal 1-15 di 18 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua). Pada triwulan I-2015, penyajian data IHP (2010=100) selain terdiri dari IHP Gabungan yang meliputi Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan, juga disajikan IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman.

B. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB adalah harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah, Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor,

IHPB Konstruksi adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi dapat digunakan sebagai dasar untuk penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No,8 Tahun 2003, dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No,105/PMK,06/2005 tanggal 9 November 2005, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No,11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005, Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IHPB Konstruksi diambil dari data *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan konstruksi,

Penghitungan IHPB tahun dasar 2010=100 mencakup 317, sedangkan perdagangan internasional masing-masing mencakup 93 kelompok Harmonized System (HS) untuk IHPB ekspor maupun impor, IHPB disajikan dalam 3 sektor yakni: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri, Data harga yang digunakan dalam penghitungan IHPB dikumpulkan dari 34 provinsi di Indonesia setiap bulannya, Formula yang digunakan untuk menghitung IHPB adalah formula Modified Laspeyres, Penimbang (*weight*) yang digunakan dalam penghitungan IHPB adalah nilai barang yang dipasarkan oleh pedagang grosir untuk setiap komoditas terpilih yang diolah dari Tabel Input-Output 2010 Updating,

10. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang datanya diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan oleh BPS

bekerja sama dengan Bank Indonesia, Survei ini dilakukan setiap triwulan di beberapa kota besar terpilih di seluruh provinsi di Indonesia, Jumlah sampel STB sebanyak 2,400 perusahaan besar dan sedang, dengan responden pimpinan perusahaan,

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan BPS melalui Survei Tendensi Konsumen (STK), Sebelum triwulan I-2011, BPS hanya melaksanakan STK di wilayah Jabodetabek, tetapi sejak triwulan I-2011 pelaksanaan STK diperluas di seluruh provinsi, Jumlah sampel pada triwulan I-2012 sebanyak 14,232 rumah tangga,

ITB dan ITK dihitung dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa variabel, Tujuan penghitungan ITB dan ITK adalah memberikan informasi dini tentang perkembangan perekonomian baik dari sisi pengusaha maupun sisi konsumen serta perkiraan kondisi bisnis dan kondisi konsumen triwulan mendatang,

11. Produksi Tanaman Pangan

Angka produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (rata-rata hasil per hektar).

Angka Tetap (ATAP) 2014, merupakan angka realisasi. Data realisasi luas panen diperoleh dari laporan bulanan Mantri Pertanian/Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD) secara lengkap dari seluruh kecamatan di Indonesia. Data realisasi produktivitas diperoleh dari hasil Survei Ubinan yang dilakukan setiap *subround* (caturwulan/empat bulanan) oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian setempat.

Angka Ramalan I (ARAM I) 2015, terdiri dari angka realisasi Januari–April 2015 dan angka ramalan Mei–Desember 2015 berdasarkan realisasi luas tanaman akhir bulan April 2015.

Penghitungan produksi ARAM I 2015 dilakukan menurut *subround* sebagai berikut:

1. **Produksi *subround* 1** (Januari–April) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround* 1 dengan realisasi produktivitas *subround* 1.
2. **Produksi *subround* 2** (Mei–Agustus) merupakan hasil perkalian antara angka ramalan luas panen *subround* 2 dengan angka ramalan produktivitas *subround* 2.
3. **Produksi *subround* 3** (September–Desember) merupakan hasil perkalian antara angka ramalan luas panen *subround* 3 dengan angka ramalan produktivitas *subround* 3.

4. **Produksi Januari–Desember** merupakan penjumlahan produksi *subround 1*, *subround 2*, dan *subround 3*.
5. **Luas panen Januari–Desember** merupakan penjumlahan luas panen *subround 1*, *subround 2*, dan *subround 3*.
6. **Produktivitas Januari–Desember** adalah hasil bagi antara produksi Januari–Desember dengan luas panen Januari–Desember.

12. Industri

Industri yang dimaksudkan adalah industri manufaktur (*manufacturing industry*) dengan cakupan perusahaan industri berskala besar, sedang, kecil, dan mikro, Perusahaan industri berskala besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, perusahaan industri berskala sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang, perusahaan industri berskala kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 orang, sedangkan perusahaan industri berskala mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang, Indeks produksi industri besar dan sedang merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) yang dilakukan secara bulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala besar dan sedang, Banyaknya perusahaan IBS yang ditetapkan sebagai sampel adalah 1.703 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi bulanan menggunakan “Metode Divisia”, Indeks produksi industri mikro dan kecil merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang dilakukan secara triwulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala mikro dan kecil, Banyaknya perusahaan IMK yang ditetapkan sebagai sampel adalah 24.000 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi IMK triwulanan menggunakan “Metode Paasche yang dimodifikasi”, Semua Indeks disajikan pada level 2-digit KBLI 2009 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009), Indeks produksi IBS dan IMK digunakan sebagai dasar penghitungan tingkat pertumbuhan produksi IBS dan IMK, yang disajikan dalam BRS Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur triwulanan,

13. Pariwisata

Data wisatawan mancanegara (wisman) diperoleh setiap bulan dari laporan Ditjen Imigrasi, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia, Wisman yang masuk dirinci menurut WNI (berdasarkan jenis paspor) dan WNA (berdasarkan jenis visa), termasuk di dalamnya *Crew WNA*, baik laut

maupun udara, Untuk data karakteristik wisman yang lebih detil diperoleh dari hasil pengolahan kartu kedatangan dan keberangkatan (*arrival/departure card*),

Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel diperoleh dari hasil Survey Hotel yang dilakukan setiap bulan terhadap seluruh hotel bintang serta sebagian (sampel) hotel non bintang (hotel melati) di seluruh Indonesia, Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kamar tersedia, jumlah kamar terpakai, jumlah tamu yang datang (menginap) maupun jumlah tamu yang keluar dari hotel setiap harinya,

Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun,

TPK Hotel adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia,

Rata-rata lamanya tamu menginap adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya.

14. Transportasi Nasional

Data transportasi diperoleh setiap bulan dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II, Kantor Bandara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara, PT (Persero) KAI (Kantor Pusat dan Divisi Jabodetabek), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I s,d, IV, dan Kantor Pelabuhan yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut, Data yang disajikan mencakup jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang dimuat dalam negeri, Khusus untuk transportasi udara disajikan jumlah penumpang berangkat baik domestik maupun internasional.

15. Kemiskinan

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan

- secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
 - d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
 - e. Gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna (seluruh penduduk mempunyai pendapatan yang sama). Sementara Gini Rasio bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai Gini Rasio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
 - f. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan dan Gini Rasio Maret 2015 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bulan Maret 2015. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKGD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

16. Produksi Hortikultura

Pengumpulan data produksi dan luas panen hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data Tingkat Kecamatan dengan metode perkiraan pengamatan lapang. Pengumpulan data menggunakan daftar register kecamatan dan daftar isian Statistik Pertanian Hortikultura (SPH). Daftar nama kecamatan yang digunakan keadaan pada Semester I Tahun 2013 dengan jumlah kecamatan sebanyak 6.911 kecamatan. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasilnya diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. Validasi data dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pencatatan dan pengolahan baik di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi maupun tingkat nasional.

Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai. Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau keriting.

Bentuk hasil produksi cabai rawit (cabai rawit merah dan cabai rawit hijau) adalah buah segar dengan tangkai.

Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun.

17. Struktur Ongkos Usaha Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan 2014

Survei usaha rumah tangga pertanian menggunakan 2 jenis kerangka sampel yaitu kerangka sampel pemilihan blok sensus dan pemilihan rumah tangga. Untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 yang distratifikasi menurut jenis komoditas utama yang diurutkan menurut strata.

Blok sensus yang memenuhi syarat (*eligible*) adalah blok sensus yang memiliki jumlah *eligible* rumah tangga sebanyak 10 atau lebih. Sedangkan, kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga, yaitu daftar nama kepala rumah tangga usaha tanaman pangan hasil pemutakhiran rumah tangga di setiap blok sensus terpilih yang diurutkan menurut komoditas utama dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, budidaya ikan dan penangkapan ikan, serta tanaman kehutanan siap tebang.

Komoditas yang dicakup dalam survei ini adalah komoditas yang menjadi prioritas pembangunan pertanian dan memiliki batas minimal usaha yang ditentukan kementerian terkait.

Batas Minimal Usaha dan Jumlah Sampel

Subsektor Pertanian	Komoditas	Batas Minimal Usaha	Jumlah Sampel		
			Musim Kemarau	Musim Hujan	Jumlah
Tanaman Pangan	Padi Sawah	1.700 m ²	55.964	61.291	117.255
	Padi Ladang	1.700 m ²	2.448	3.949	6.397
	Jagung	1.500 m ²			67.100
	Kedelai	2.000 m ²			9.382
Tanaman Hortikultura	Cabai Merah	200 m ²	13.542	6.090	19.632
	Cabai Rawit	200 m ²	24.067	10.265	34.332
	Bawang Merah	140 m ²	6.604	2.993	9.597
	Jeruk	25 pohon			7.300
Tanaman Perkebunan	Kelapa Sawit	15 pohon			27.726
	Karet	250 pohon			46.569
	Tebu	650 m ²			8.831
Pternakan	Sapi Perah				1.420
	Sapi Potong				59.537
	Ayam Ras Pedaging				897
	Ayam Ras Petelur				568
Budidaya Perikanan	Rumput Laut				8.011
	Bandeng				9.444
	Udang Windu				3.550
Penangkapan Ikan	Kapal Motor				6.733
	Perahu Motor Tempel				22.354
Budidaya Kehutanan	Jati				28.917
	Mahoni				9.880
	Sengon				26.203

Metode sampling yang digunakan adalah dua tahap. Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus, dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga usaha subsektor hasil pencacahan lengkap (ST2013-L). Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih sejumlah rumah tangga secara sistematis. Rumah tangga usaha pertanian terpilih diwawancarai oleh petugas yang telah dilatih.

Pengumpulan data biaya produksi berpedoman pada prinsip *opportunity cost*, yaitu dilakukan penilaian harga pasar untuk lahan milik sendiri, benih produksi sendiri, dan pekerja keluarga tidak dibayar.

Usaha pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).

Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Untuk tanaman pangan, termasuk juga yang bertujuan untuk konsumsi sendiri atau tidak dijual.

Nilai Produksi:

- Tanaman pangan: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumahtangga dari usaha per satu hektar komoditas tanaman pangan per musim tanam.
- Tanaman hortikultura: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan usaha per 100 pohon tanaman menghasilkan selama setahun yang lalu untuk tanaman tahunan (jeruk).
- Tanaman perkebunan: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman perkebunan untuk tanaman semusim (tebu) dan tanaman tahunan (kelapa sawit dan karet) selama setahun yang lalu.
- Peternakan: adalah total nilai produksi yang bersumber dari penambahan bobot, produksi telur dan susu, produksi ikutan, dan jasa peternakan selama setahun dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha peternakan per ekor (sapi potong dan sapi perah) atau per 1.000 ekor (ayam ras petelur), atau per 5.000 ekor (ayam ras pedaging) yang cara pemeliharaan tenak dikandangan.
- Budidaya ikan: adalah nilai produksi budidaya yang dihasilkan rumah tangga usaha budidaya ikan per siklus per satuan tertentu (rumput laut, bandeng dan udang windu dalam satuan hektar).
- Penangkapan ikan: adalah nilai dari produksi hasil tangkapan rumah tangga usaha penangkapan ikan dalam satu trip yang dihitung mulai dari berangkat melakukan penangkapan ikan sampai kembali ke tempat asal.
- Tanaman kehutanan: adalah nilai produksi (selisih nilai dari tanaman kehutanan pada saat pencacahan dengan nilai tanaman setahun yang lalu untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang) dan ongkos produksi untuk usaha budidaya tanaman kehutanan yang siap tebang dan atau ditebang selama setahun yang lalu per 100 pohon.

Ongkos/Biaya Produksi:

- Tanaman pangan: adalah total ongkos/biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk usaha satu hektar komoditas tanaman pangan per musim

tanam yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (padi adalah gabah kering panen/GKP, jagung adalah pipilan kering, dan kedelai adalah biji kering) dan sudah memasukkan perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas bunga yang dihitung dengan cara imputasi sesuai harga pasar.

- Tanaman hortikultura: adalah rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk usaha satu hektar tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan per 100 pohon untuk tanaman tahunan yang menghasilkan (jeruk) pada periode pencacahan yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (cabai merah dan cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai, bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun, dan jeruk adalah buah segar) dan sudah memperkirakan/mengimputasi besarnya sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan bunga kredit model sendiri/bebas bunga.
- Tanaman perkebunan: adalah seluruh ongkos/biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu untuk seluruh bidang tanaman untuk tanaman semusim dan pada seluruh pengeluaran tanaman perkebunan semusim yang panen. Benih, tanaman pelindung, pupuk, stimulan, dan pestisida yang bukan pembelian diperkirakan nilai sesuai harga setempat.
- Peternakan: adalah biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu oleh rumah tangga yang cara pemeliharaan ternak dikandangan. Biaya tersebut adalah biaya yang benar-benar dibayarkan oleh peternak ditambah dengan imputasi dari biaya yang tidak dibayarkan oleh peternak seperti biaya pakan yang tidak dibeli, biaya pengurusan ternak oleh pekerja tidak dibayar (peternak atau pekerja keluarga).
- Budidaya ikan: adalah biaya yang meliputi biaya benih/bibit, pupuk dan obat-obatan, pakan dihitung baik yang berasal dari pembelian maupun bukan pembelian (diperkirakan nilainya), upah pekerja baik pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (diperkirakan upahnya), dan biaya lainnya mencakup sewa lahan (termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri dan bebas sewa), alat/sarana usaha (termasuk perkiraan bebas sewa dan perbaikan kecil/pemeliharaan) dan lainnya

(bunga kredit/pinjaman, penyusutan barang modal, pajak tak langsung, pengangkutan, jasa perikanan, dan sebagainya).

- Penangkapan ikan: adalah biaya yang meliputi upah pekerja dihitung untuk pekerja dibayar maupun perkiraan upah untuk pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah), oli/pelumas, garam/es, perbekalan baik yang berasal dari pembelian maupun perkiraan nilai dari bukan pembelian, biaya lainnya (sewa alat/sarana, penyusutan barang modal), dan lainnya (umpan, pajak tak langsung, jasa perikanan, wadah, dan sebagainya).
- Tanaman kehutanan: adalah seluruh ongkos/biaya yang dikeluarkan yang sudah termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas sewa selama setahun yang lalu per 100 pohon untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang (tanaman yang sudah cukup umur dan secara ekonomis sudah dapat dipanen/ditebang atau digunakan kayunya).

Periode tanam musim kemarau (MK) adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Februari–September 2013 dan atau Februari–Mei 2014.

Periode tanam musim hujan (MH) adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Oktober 2013–Januari 2014.

Produktivitas ayam ras petelur adalah jumlah butir telur yang dihasilkan dari 1.000 ekor ayam ras petelur produktif per hari.

Survei Kehutanan 2014

Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling dua tahap terstratifikasi. Pada tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus (blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 pada desa-desa yang terletak di kawasan hutan (yang di-*overlay* dengan peta kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan) dan diurutkan menurut strata), dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga hasil ST2013-L. Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih 10 rumah tangga secara sistematis. Jumlah sampel untuk Survei Kehutanan sebanyak 99.993 rumah tangga.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan.

Perladangan berpindah adalah suatu kegiatan usaha tani tanaman semusim/pangan secara tradisional/pindah-pindah di dalam maupun di luar kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek pelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air.

Pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar adalah kegiatan memungut/mengambil hasil hutan dan juga menangkap satwa-satwa liar di hutan seperti: memungut kayu, getah, kulit kayu, buah-buahan, rumput, rotan, tumbuhan obat, gaharu, serta menangkap ayam hutan, babi hutan, rusa, dan sebagainya.

18. Pendataan Potensi Desa (Podes)

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Podes 2014 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (yaitu: desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait). Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Salah satu tujuan podes adalah menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi wilayah, seperti perkotaan-perdesaan, wilayah tertinggal, wilayah pesisir dan sebagainya. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan klasifikasi wilayah desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG.

BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. IKG disusun melalui metode Analisis Faktor. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai

skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

19. Nilai Tukar Eceran Rupiah

Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata uang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor, swap, derivative, dan lain-lain, dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, transaksi eceran penukaran mata uang melalui money changer (tempat penukaran mata uang) yang tersebar di seluruh Indonesia menggambarkan tingkat retail spot rate suatu mata uang.

BPS melaporkan informasi nilai tukar eceran rupiah secara periodik. Statistik yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat pengaruh nilai tukar transaksi besar terhadap nilai tukar transaksi eceran, perkembangan nilai tukar rupiah transaksi eceran, melengkapi informasi real-time yang beredar di internet, dan sebagainya.

Mata uang asing yang dimonitor mencakup empat jenis, yaitu dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR) dengan alasan merupakan mata uang yang hampir selalu diperdagangkan di 34 provinsi di Indonesia, sehingga dapat dimonitor transaksinya.

20. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Aspek demokrasi tersebut adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).
2. Dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
3. Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator, variabel, dan aspek; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Demokrasi Indonesia.
4. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 1–100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah tingkat terendah

dan 100 adalah tingkat tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 1–100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

ISSN 2087-930X



9 772087 930006